



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);  
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan rencana strategis Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan;
  - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
  - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
  - e. BAB V : Penutup.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV MANAJEMEN RISIKO

##### Pasal 4

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
  - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
  - d. memperkuat akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Tahapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan konteks;
  - b. identifikasi Risiko;
  - c. analisis Risiko;
  - d. evaluasi Risiko; dan
  - e. pengendalian Risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
  - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
  - b. perumusan Program dan Kegiatan;
  - c. penetapan target Kinerja; dan
  - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

#### BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 18 September 2025

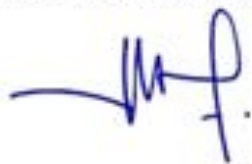
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.  
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 50 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa

# RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 - 2029



TAHUN  
**2025**

[www.diskanak.sumedangkab.go.id](http://www.diskanak.sumedangkab.go.id)

f Diskanak Kab Sumedang

📺 diskanak62

## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen perencanaan yang sangat penting dalam rangka mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang selama lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2029, dan memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di tingkat lokal. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan perencanaan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan hingga indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, transparansi dalam perencanaan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam proses penyusunan Rencana Strategis ini. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman kerja yang strategis dan operasional bagi seluruh aparatur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, serta menjadi acuan bersama dalam mendorong pelayanan yang lebih baik, pemerintahan yang lebih adaptif, dan pembangunan yang lebih partisipatif. Kami juga membuka ruang evaluasi dan pembaruan secara berkala sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Dinas Perikanan dan Peternakan yang lebih maju, responsif, dan berdaya saing dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 16 September 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Sumedang.



**ASEP AAN DAHLAN**  
NIP. 196912211990031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR GRAFIK .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.....</b>	<b>14</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan.....	14
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan.....	76
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>93</b>
3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 .....	93
3.2 Sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 .....	95
3.3 Strategi Rencana Strategis dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 .....	96
3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 .....	98
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>110</b>
4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan.....	110
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan .....	166
4.3 Indikator Kinerja Utama.....	223
4.4 Indikator Kinerja Kunci .....	224
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>226</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>227</b>

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1.1	Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan dan Sektoral Lainnya .....	3
2.1	Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan .....	30
3.1	Konsep Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan.....	100
3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 ...	100
4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 .....	112

## DAFTAR GRAFIK

Grafik		
2.3.1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 - 2025 Dinas Perikanan dan Peternakan .....	58
2.2	Peta Isu Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan .....	100

## **DAFTAR TABEL**

Tabel		
2.1	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan.....	90
3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 .....	101
3.2	Penahapan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2026 - 2029 .....	103
3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 .....	105
4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 .....	114
4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 .....	168
4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah .....	222
4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2030 .....	224
4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2030 .....	225

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Rencana strategis ini disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang memberikan arahan normatif bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki peran penting dalam menjabarkan dan melaksanakan arah kebijakan pembangunan Daerah secara lebih operasional di tingkat Perangkat Daerah. Rencana strategis ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan lima tahunan, tetapi juga menjadi instrumen manajerial dalam pengelolaan Program dan Kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks pembangunan, Dinas Perikanan dan Peternakan dihadapkan pada berbagai tantangan seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan antar wilayah, penguatan kapasitas aparatur, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dokumen perencanaan yang mampu merespons dinamika sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah.

Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai unit organisasi yang merupakan bagian dari unit organisasi yang lebih besar yaitu Pemerintah Daerah. Untuk itu Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan harus selaras atau sejalan dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan). Dalam RPJMD telah disusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasarannya untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan harus selaras atau sejalan dengan RPJMD. Berdasarkan Sasaran RPJMD tersebut, selanjutnya disusunlah atau diturunkan menjadi

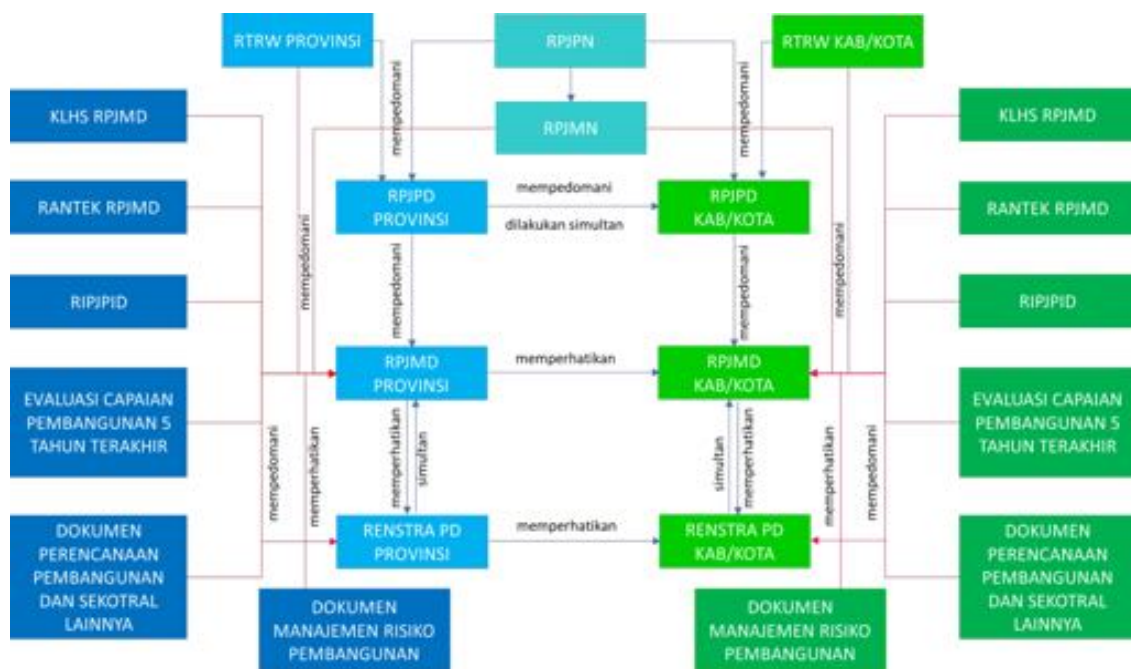
Tujuan di Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan. Berkenaan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran di RPJMD, maka dapat diturunkan kepada Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Subkegiatan di Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan. Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Sumedang adalah “Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Berdasarkan visi tersebut diturunkan menjadi 5 (lima) misi. Adapun misi yang terkait dengan Dinas Perikanan dan dan Peternakan adalah misi yang ke 2 yaitu “Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif yang berarti Birokrasi pemerintahan yang berintegritas, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan serta mampu merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat, dan misi ke 4 (empat) yaitu “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Inklusif berarti yang merangkul semua golongan, termasuk masyarakat rentan, miskin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta berkelanjutan berarti tidak merusak lingkungan dan memperhatikan generasi mendatang). Adapun tujuan misi ke 2 ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif berbasis teknologi digital dan tujuan misi ke 4 yang terkait adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya sasaran dari tujuan terkait pada misi ke 2 ini adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah, dan sasaran dari tujuan terkait pada misi ke 4 ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah berbasis inovasi dan teknologi dengan indikator sasaran.

Sasaran RPJMD yang terkait dengan Dinas Perikanan dan Peternakan tersebut, selanjutnya menjadi tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan, yaitu (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dengan indikator sasaran adalah Nilai Skor LPPD Kabupaten, dan (2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi dengan indikator sasaran terkait adalah Rasio PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Berdasarkan indikator sasaran yang terkait tersebut, selanjutnya akan diturunkan menjadi sasaran strategis Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unit organisasi dari Pemerintah Daerah, dimana dalam penyusunan dokumen perencanaannya harus selaras atau terkait dengan dokumen perencanaan induknya yaitu RPJMD Kabupaten Sumedang, RPJPD Kabupaten Sumedang serta

dokumen perencanaan lainnya yaitu : RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Barat, RPJPN, serta Rencana Strategis Kementerian terkait Dinas Perikanan dan Peternakan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian. Berikut ini disajikan Bagan Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, sebagai berikut:

**Gambar 1.1.**  
**Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 – 2029 dengan Dokumen Perencanaan dan Sektoral Lainnya**



Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta berlandaskan pada data dan informasi yang valid. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan setiap tahunnya, sekaligus sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja serta pengendalian pembangunan di tingkat Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas Dinas Perikanan dan Peternakan. Dokumen ini disusun untuk menjamin keselarasan antara kebijakan daerah dan pelaksanaan teknis pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat Perangkat Daerah.

Sebagai unit organisasi pemerintahan Teknis Perikanan dan Peternakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan *riil* masyarakat. Dalam konteks ini, Rencana Strategis berperan sebagai instrumen penting yang menjabarkan arah pembangunan daerah secara lebih operasional dan kontekstual sesuai karakteristik dan tantangan Dinas Perikanan dan Peternakan.

Dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang, Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dan berbasis data yang valid. Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang adaptif dan berorientasi pada hasil, serta mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan wilayah yang merata, berkelanjutan dan berkeadilan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran Kasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedag Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Sumedang Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 58);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 12);
33. Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 191).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan keputusan bagi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 yaitu **Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045**.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan Dinas Perikanan dan Peternakan berupa indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif Dinas Perikanan dan Peternakan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan informasi berikut :

##### **1.1 Latar Belakang**

Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Rencana Strategis Perangkat Daerah.

##### **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang relevan dan signifikan disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Menguraikan maksud dan tujuan.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing BAB.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan**

Bab ini menguraikan informasi berikut:

##### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Terdiri dari :

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Sumber Daya Perangkat Daerah.
- b. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

c. Kelompok Sasaran Layanan.

Berisi penjelasan mengenai :

- a. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
- b. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
- c. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.
- 2) Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

b. Isu Strategis

- 1) Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah / lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- 2) Merumuskan isu strategis Daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari: permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional), dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

3.1 Tujuan

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- c. Direkomendasikan agar Rencana Strategis Perangkat Daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
- d. Jika Perangkat Daerah mampu lebih dari satu urusan, tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
- e. Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan: kalimat kondisi; dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; disusun

dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta merupakan *intermediate outcome*.

### 3.2 Sasaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

### 3.3 Strategi

Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, terdiri dari :

- a. Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program/Kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan/Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- b. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel 3.4.

### 3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

## Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Berisi tentang Operasional NSPK, Arah Kebijakan RPJMD, dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

a. Program, Kegiatan dan subkegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuatannya

b. Daftar Program, Kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai Kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2030.

4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

a. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

b. IKU berlaku dari Tahun 2025 hingga tahun 2030

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

a. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

b. IKK berlaku dari Tahun 2025 hingga tahun 2030.

Bab V Penutup

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dinas Perikanan dan Peternakan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan. Dengan kedudukannya tersebut, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai peran sangat strategis di Daerah, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan**

Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai salah satu Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Orientasi utama kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan adalah memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan responsif kepada masyarakat, sekaligus memastikan bahwa seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan dan Peternakan dapat terlaksana secara efektif dan akuntabel. Posisi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah menuntut adanya sinergi yang kuat antara aparatur, sarana

prasarana, serta tata kelola layanan yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi.

Pelayanan di Dinas Perikanan dan Peternakan dilaksanakan melalui beragam program yang saling terintegrasi. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan teknis perikanan dan peternakan menjadi tulang punggung dalam memberikan layanan urusan perikanan dan sebagian urusan pertanian dalam hal ini fungsi peternakan. Program ini berfokus pada kemudahan akses, kepastian prosedur, dan kecepatan proses layanan, yang didukung oleh optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kompetensi aparatur.

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perikanan dan Peternakan**

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan dan Peternakan membentuk Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi Subbagian Umum dan Keuangan;
3. Bidang Perikanan;
4. Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan;
5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 191 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan, Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan Peternakan. Untuk melaksanakan tugas pokok, uraian tugas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b) merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di bidang perikanan dan peternakan;
- c) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yang meliputi kesekretariatan, Perikanan, dan Peternakan;
- d) merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan dan peternakan;
- e) menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang perikanan dan peternakan;
- f) menyelenggarakan pembinaan pelayanan umum bidang perikanan dan peternakan;
- g) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan;
- h) menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang perikanan dan peternakan;
- i) menyelenggarakan dan mengendalikan pembinaan administrasi dinas perikanan dan peternakan;
- j) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan dengan instansi atau pihak lainnya yang terkait;
- k) menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan secara berkala;
- l) mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Peternakan; dan

- m) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

## **2. Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik Daerah, kepegawaian, keuangan, rencana kerja dan pelaporan Dinas Perikanan dan Peternakan. Uraian tugas Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan;
- c) menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar pelayanan operasional prosedur pada Dinas Perikanan dan Peternakan dan pada lingkup sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan;
- d) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- f) merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- h) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- i) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan;

- j) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Perikanan dan Peternakan;
- k) merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
- l) merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- m) merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
- n) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Keuangan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Umum dan Keuangan;
- b) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan pada Subbagian Umum dan Keuangan;
- c) melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
- d) melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas Perikanan dan Peternakan;
- e) melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
- f) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
- g) menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Perikanan dan Peternakan;

- h) menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- i) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
- j) melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Perikanan dan Peternakan;
- k) melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- l) menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan;
- m) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Keuangan; dan
- n) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Perikanan**

Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Perikanan. Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Perikanan. Uraian tugas Kepala Bidang Perikanan adalah sebagai berikut :

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup bidang perikanan;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar pelayanan operasional prosedur di bidang perikanan;
- c) merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan perikanan serta pengelolaan kawasan perikanan;
- d) mengendalikan pelaksanaan penerapan kebijakan alat, mesin, sarana dan prasarana Perikanan;
- e) mengendalikan pelaksanaan penerapan kebijakan pembiayaan, kredit program, asuransi pola kerjasama dan kemitraan usaha ikan;
- f) merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan bidang perikanan;

- g) mengendalikan pelaksanaan penerapan kebijakan, standar, prosedur dan norma pembinaan usaha perikanan;
- h) mengawasi pelaksanaan penerapan kebijakan, standar, prosedur dan norma panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran perikanan;
- i) mengendalikan pengembangan sistem statistik dan informasi perikanan;
- j) mengendalikan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan alat penangkapan ikan;
- k) mengendalikan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudidayaan ikan, pembenihan dan mutu benih ikan/induk ikan;
- l) mengendalikan pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- m) mengendalikan pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih ikan serta pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
- n) mengendalikan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan, perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
- o) mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan penerapan manajemen mutu terpadu atau *hazard analysis and critical control point* di alat pengangkut, di unit penyimpanan hasil, di produksi budidaya ikan dan di unit pengolahan hasil;
- p) mengawasi pelaksanaan kebijakan perbenihan, pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan;
- q) merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional dan pengembangan UPTD;
- r) mengendalikan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan penyuluhan Perikanan;
- s) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan; dan
- t) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan**

Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan. Kepala Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan. Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup pembinaan mutu dan pengawasan Perikanan;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar pelayanan operasional prosedur di bidang pembinaan mutu dan pengawasan Perikanan;
- c) menyelenggarakan pembinaan teknis dan operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan mutu perikanan dan pengawasan sumberdaya perikanan;
- d) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan mutu perikanan dan pengawasan sumberdaya perikanan;
- e) menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan mutu perikanan, pengawasan perikanan tangkap dan pengawasan perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
- f) menyelenggarakan teknis operasional pemberdayaan pembinaan mutu perikanan, pengawasan perikanan tangkap dan pengawasan perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
- g) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan mutu dan pengawasan perikanan; dan

- h) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

## **5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. Uraian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup bidang peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar pelayanan operasional prosedur layanan di bidang peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c) membagi tugas dan memberi petunjuk kegiatan pembibitan, produksi dan pemasaran serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d) menyelenggarakan kegiatan pembibitan, peningkatan produksi dan pemasaran produksi hijauan pakan ternak;
- e) menyelenggarakan kegiatan kesehatan hewan seperti pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, penerbitan rekomendasi teknis kesehatan hewan, penerbitan keterangan kesehatan hewan, penerbitan izin/rekomendasi usaha obat hewan dan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- f) menyelenggarakan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner seperti rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan, sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan, penilaian penerapan

hygiene dan sanitasi usaha produk hewan, bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan kurban dan fasilitasi unit usaha produk hewan;

- g) menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan kajian teknis untuk penyebaran dan pengembangan ternak antar wilayah;
- h) menyelenggarakan kegiatan pelayanan asuransi ternak, data produksi dan populasi ternak;
- i) menyelenggarakan penerapan teknologi pembibitan, produksi dan pemasaran serta fasilitasi promosi produk hewan;
- j) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- k) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugasnya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan dan Peternakan**

UPTD Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan. Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pelayanan Perikanan dan Peternakan sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya, Uraian Tugas Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kerja dan program UPTD Perikanan dan Peternakan;
- b) melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Perikanan dan Peternakan;
- c) menyelenggarakan pelayanan perikanan dan peternakan;
- d) menyelenggarakan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak dan ikan yang diakibatkan oleh virus dan bakteri atau parasit;
- e) melaksanakan pendataan statistik perikanan dan peternakan;

- f) melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan dan obat ternak dan ikan;
- g) melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan ikan;
- h) melaksanakan bimbingan teknis peternakan dan perikanan kepada masyarakat dan kelompok;
- i) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Perikanan dan Peternakan; dan
- j) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugasnya Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a) menyusun bahan rencana kerja dan program UPTD Perikanan dan Peternakan;
- b) melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Perikanan dan Peternakan;
- c) melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Perikanan dan Peternakan; dan
- e) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan**

UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Balai Benih Ikan. Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang

pengelolaan balai benih ikan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, uraian tugas Kepala UPTD Balai Benih Ikan adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kerja dan program UPTD Balai Benih Ikan;
- b) melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Balai Benih Ikan;
- c) menyelenggarakan pelayanan bidang pengelolaan balai benih ikan;
- d) menyusun kebutuhan dan potensi benih ikan;
- e) melaksanakan pengadaan benih ikan;
- f) melaksanakan pengujian dan pengembangan benih ikan;
- g) melaksanakan distribusi benih ikan;
- h) mengendalikan pembenihan ikan dan merumuskan sertifikasi benih ikan;
- i) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Perikanan dan Peternakan; dan
- j) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugasnya, Kepala UPTD Balai Benih Ikan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a) menyusun bahan rencana kerja dan program UPTD Balai Benih Ikan;
- b) melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Balai Benih Ikan;
- c) melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Ikan; dan

- e) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

### **8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Potong Hewan**

UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Rumah Potong Hewan. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis penyelenggaraan dan pengawasan pemotongan Hewan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, uraian tugas Kepala UPTD Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kerja dan program UPTD Rumah Potong Hewan;
- b) melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Rumah Potong Hewan;
- c) melaksanakan pelayanan pemotongan hewan;
- d) menyusun dan merumuskan kebutuhan dan potensi daging hewan;
- e) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan rumah potong hewan;
- f) melaksanakan pendataan/pendaftaran dan mengendalikan rumah potong hewan;
- g) melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan pada rumah potong hewan;
- h) menyusun dan merumuskan standar manajemen rumah potong hewan;
- i) melaksanakan pendataan dan bimbingan teknis standar manajemen pengelolaan rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan/ tempat pemotongan unggas;
- j) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- k) melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugasnya, Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala

Subbagian Tata Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya, Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a) menyusun bahan rencana kerja dan program UPTD Rumah Potong Hewan;
- b) melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Rumah Potong Hewan;
- c) melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- e) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

#### **9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembibitan Ternak**

UPTD Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Pembibitan Ternak. Kepala UPTD Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang Pembibitan Ternak. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya, Uraian Tugas Kepala UPTD Pembibitan Ternak adalah sebagai berikut :

- a) melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Pembibitan Ternak;
- b) menyusun rencana kerja dan program UPTD Pembibitan Ternak;
- c) menyelenggarakan pelayanan bidang pembibitan Ternak;
- d) menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana inseminasi buatan, fasilitasi alih mudigah serta potensi bibit ternak;
- e) melaksanakan fasilitasi inseminasi buatan dan alih mudigah;
- f) melaksanakan pengujian kualitas semen beku yang digunakan untuk inseminasi buatan;
- g) melaksanakan fasilitasi pembuatan surat izin melaksanakan inseminasi buatan;

- h) melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi pengujian dan sertifikasi bibit ternak;
- i) melaksanakan fasilitasi inseminasi buatan sarana prasarana pendukung;
- j) melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan ternak untuk tujuan pembibitan;
- k) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pembibitan Ternak; dan
- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya, Kepala UPTD Pembibitan Ternak dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pembibitan Ternak dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a) menyusun bahan rencana kerja dan program UPTD Pembibitan Ternak;
- b) melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pembibitan Ternak;
- c) melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pembibitan Ternak; dan
- e) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### **10. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Hewan**

UPTD Pasar Hewan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Pasar Hewan. Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis Pasar Hewan.

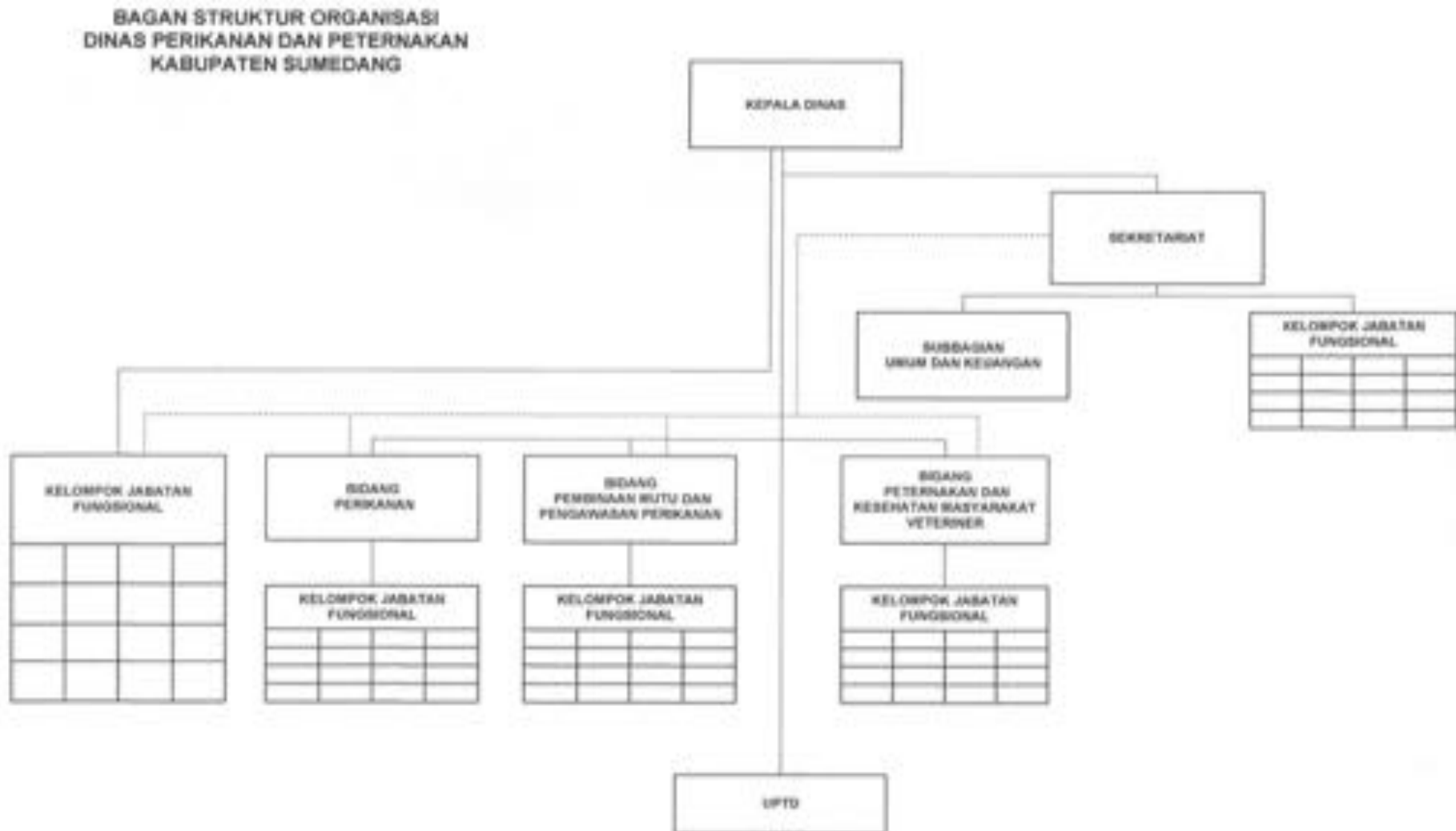
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, uraian tugas Kepala UPTD Pasar Hewan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kerja dan program UPTD Pasar Hewan;
- b) melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Pasar Hewan;
- c) menyelenggarakan pelayanan di lingkup pasar hewan;
- d) melaksanakan pendataan/pendaftaran dan mengendalikan pasar hewan;
- e) menyusun dan merumuskan kebutuhan pasar hewan;
- f) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan pasar hewan;
- g) menyusun dan merumuskan standar manajemen pasar hewan;
- h) melaksanakan dan mengendalikan distribusi hewan;
- i) pendataan hewan yang dipasarkan dan laku terjual di pasar hewan;
- j) melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD; dan
- k) melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya, Kepala UPTD Pasar Hewan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pasar Hewan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a) menyusun bahan rencana kerja dan program UPTD Pasar Hewan;
- b) melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pasar Hewan;
- c) melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pasar Hewan; dan
- e) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Gambar 2. 1  
Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan



## **B. Sumber Daya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan.

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan kondisi per Agustus 2025 adalah berjumlah 156 orang, yang terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) sebanyak 102 orang, dan Non ASN sebanyak 54 orang.

Khusus untuk ASN (PNS dan PPPK), kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 (Agustus 2025) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### **1. Jumlah pegawai menurut kelompok umur**

Berdasarkan tabel di bawah, jumlah pegawai menurut kelompok umur sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur**

<b>No</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah Pegawai ASN</b>	<b>Persentase</b>
1	< 25 tahun	3	2,94
2	25 -34 tahun	19	18,63
3	35 – 44 tahun	33	32,35
4	45 – 54 tahun	31	30,39
5	≥ 55 tahun	16	15,69
<b>JUMLAH</b>		<b>102</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, 2025*

Tabel tersebut menyajikan distribusi jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS dan Calon PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan kelompok umur. Jumlah seluruh ASN sebanyak 102 orang, dengan rincian untuk PNS sebanyak 61 orang, CPNS sebanyak 5 orang dan PPPK sebanyak 36 orang. Data ini penting untuk melihat struktur usia

sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Perikanan dan Peternakan serta untuk merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terdapat Pegawai yang usianya di bawah 25 tahun (Pegawai Muda) sebanyak 3 orang atau 2,94 persen. Mereka ini adalah CPNS. Jumlah ini paling sedikit dibanding dengan komposisi umur lainnya.
- b. Untuk pegawai yang usianya 25 – 35 tahun terdapat sebanyak 19 orang atau sebesar 18,63 persen yang merupakan CPNS, PNS dan PPPK.
- c. Untuk pegawai berusia 35 – 44 tahun sebanyak 33 orang atau sebesar 32,35 persen, yang merupakan PNS dan PPPK. Kelompok umur ini merupakan yang terbanyak dibanding dengan komposisi usia lainnya.
- d. Untuk pegawai yang berusia 45 – 54 tahun sebanyak 31 orang atau sebesar 30,39 persen yang merupakan PNS dan PPPK, yang merupakan kelompok kedua terbesar pada kelompok umur ini.
- e. Selanjutnya untuk kelompok umur lebih dari atau sama dengan 55 tahun sebanyak 16 orang atau sebesar 15,69 orang. Kelompok umur ini merupakan usia yang sudah mendekati purna bakti (usia pensiun).

Berdasarkan keadaan tersebut maka dapat dinyatakan komposisi pegawai pada setiap kelompok umur sudah cukup bagus, dimana didominasi oleh pegawai pada umur yang sangat produktif, walaupun untuk kelompok yang paling muda masih sangat sedikit, dimana kelompok ini dipersiapkan untuk mengganti atau estafet ke periode berikutnya bagi pegawai-pegawai yang akan purna bakti.

Implikasi Strategis:

- a. Urgensi regenerasi SDM: sedikitnya pegawai muda menjadi tantangan besar dalam kesinambungan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan. Perlu dirancang strategi rekrutmen dan pengkaderan aparatur baru yang memiliki kompetensi teknis, digital, dan inovatif.
- b. Peningkatan produktivitas dan transfer pengetahuan: Pegawai senior dapat menjadi mentor untuk proses transfer pengetahuan

dan pengalaman kerja, namun perlu juga mendapat dukungan dari sisi kesehatan, pelatihan teknologi, dan manajemen beban kerja.

- c. Perencanaan suksesi dan reformasi SDM: Ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan ASN (Analisis Jabatan dan Beban Kerja), serta menjadi pertimbangan dalam rencana reformasi birokrasi berbasis peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 menunjukkan dominasi kelompok usia produktif dan diukung dengan yang usia paling muda walaupun jumlahnya sangat sedikit. Hal ini penting untuk segera dilakukan revitalisasi dan regenerasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.

## 2. Jumlah pegawai menurut golongan

Berdasarkan tabel di bawah ini, jumlah pegawai ASN menurut golongan per Agustus 2025 adalah sebagai berikut :

### Jumlah Pegawai menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai ASN	Persentase
1	Golongan I (I-A – I-D)	-	-
2	Golongan II (II-A – II-D)	25	24,51
3	Golongan III (III-A – III-D)	68	66,67
4	Golongan IV (IV-A – IV-E)	9	8,82
<b>J U M L A H</b>		<b>102</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, 2025

Tabel tersebut menggambarkan distribusi pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan golongan kepangkatan, yang mencerminkan jenjang karier, pengalaman kerja, dan tingkat kewenangan masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

- a. Dominasi Golongan III (III-A – III-D), dimana sebagian besar pegawai (66,67 persen) berada pada Golongan III, yang menunjukkan bahwa mayoritas ASN Dinas Perikanan dan Peternakan saat ini berada pada tahap menengah karier. Golongan ini biasanya terdiri dari pelaksana senior, penyelia, dan fungsional pertama dan muda. Ini menunjukkan stabilitas dalam hal pengalaman kerja dan kinerja administratif, sekaligus menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas-tugas teknis dan manajerial di Dinas Perikanan dan Peternakan.
- b. Pegawai Golongan II (II-A – II-D) sebesar 24,51 persen. Golongan II umumnya merupakan pegawai pelaksana yang baru diangkat yang berasal dari jenjang pendidikan menengah atau diploma.
- c. Pegawai Golongan IV (IV-A – IV-E) berjumlah 9 orang (8,82 persen). Golongan IV adalah golongan tertinggi dalam ASN struktural, biasanya diisi oleh pejabat struktural senior seperti Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Pejabat Esselon IV yang berpendidikan S-2 atau setara S-2 (Dokter Hewan) atau pejabat fungsional ahli madya / utama. Komposisi ini menunjukkan adanya distribusi proporsional antara pelaksana dan pimpinan teknis.
- d. Tidak terdapat pegawai Golongan I (I-A – I-D) Ini menandakan bahwa seluruh ASN di Dinas Perikanan dan Peternakan berada pada strata pendidikan dan jenjang karier yang sudah cukup tinggi (minimal Golongan II), serta tidak ada pegawai berpendidikan rendah atau baru direkrut dari jenjang bawah. Hal ini bisa menjadi indikasi peningkatan kualitas SDM ASN dari sisi pendidikan dan pengangkatan.

Implikasi Strategis:

- a. Penguatan karier dan manajemen talenta: Karena sebagian besar pegawai berada di Golongan III, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi dan pembinaan karier agar mereka dapat naik ke Golongan IV dan mengisi jabatan struktural / fungsional strategis di masa mendatang.

- b. Minimnya pelaksana muda (Golongan I dan II) dapat memengaruhi dinamika operasional, terutama dalam pelaksanaan tugas lapangan, penguasaan teknologi, dan adaptasi terhadap inovasi. Perlu dipertimbangkan penambahan ASN dari golongan rendah yang memiliki potensi jangka panjang.
- c. Golongan IV perlu dijaga kualitas dan produktivitasnya, karena mereka berperan penting dalam kepemimpinan teknis dan kebijakan internal. Pendekatan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan bisa difokuskan pada kelompok ini.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan golongan menunjukkan dominasi pada Golongan III, dengan distribusi proporsional antara golongan pelaksana dan struktural. Ke depan, strategi pengembangan ASN perlu diarahkan pada regenerasi, pengembangan kompetensi, serta pemetaan potensi karier untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang profesional dan berdaya saing.

### 3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan

Berdasarkan tabel di bawah ini, jumlah pegawai ASN menurut tingkat pendidikan (per Agustus 2025) adalah sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah Pegawai ASN	Persentase
1	SMA / SMK	21	20,59
2	Diploma (D1 – D3)	16	15,69
3	Sarjana (D4 / S1)	58	56,86
4	Pascasarjana (S2 / S3)	7	6,86
<b>J U M L A H</b>		<b>102</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, 2025*

Tabel tersebut menggambarkan tingkat pendidikan terakhir dari seluruh pegawai yang bertugas di Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2025. Informasi ini menjadi sangat penting

untuk menilai kapasitas intelektual dan kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai garda terdepan dalam pelayanan teknis perikanan dan peternakan, dan pelayanan lainnya.

Distribusi Pendidikan Pegawai:

- a. Sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 58 orang (56,86 persen). Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pegawai telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi akademik standar yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administrasi dan teknis.
- b. Sebanyak 7 orang (6,86 persen) berpendidikan Pascasarjana (S2/S3). Ini mencerminkan keberadaan ASN dengan latar belakang akademik lanjut yang sangat potensial untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengembangan inovasi di Dinas Perikanan dan Peternakan.
- c. Pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah (SMA/SMK) sebanyak 21 orang (20,59 persen). Kelompok ini kemungkinan besar menduduki jabatan pelaksana teknis / operasional tertentu atau administratif non-struktural.
- d. Pegawai yang berasal dari jenjang pendidikan Diploma (D1–D3) sebanyak 16 (15,69 persen), yang biasanya menjadi jalur karier ASN pelaksana dengan spesialisasi teknis tertentu.

Implikasi Strategis:

- a. Kualitas SDM Dinas Perikanan dan Peternakan tergolong baik, karena seluruh pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, dan 63,73 pegawai sudah menyelesaikan pendidikan tinggi (S1 ke atas).
- b. Tingkat pendidikan tinggi membuka peluang untuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial, terutama dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan pendekatan berbasis data (evidence-based policy).

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi tingkat pendidikan ASN di Dinas Perikanan dan Peternakan menunjukkan profil yang cukup kompeten dan berpendidikan tinggi,

dengan dominasi lulusan S1 dan S2. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peran dinas sebagai pelaksana administrasi dan teknis perikanan dan peternakan yang responsif, profesional, dan inovatif. Namun demikian, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi berbasis pendidikan berkelanjutan, serta rekrutmen ASN dengan latar belakang teknis untuk menyeimbangkan kebutuhan teknis operasional dan administratif.

#### 4. Jumlah pegawai menurut jabatan

Berdasarkan tabel di bawah ini, jumlah pegawai ASN menurut jabatan (per Agustus 2025) adalah sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Pegawai ASN</b>	<b>Persentase</b>
1	Struktural	30	29,412
2	Fungsional	62	60,784
3	Pelaksana	10	9,804
<b>J U M L A H</b>		<b>102</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, 2025*

Tabel tersebut menyajikan data klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan yang mereka emban, yakni jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Pemahaman terhadap struktur jabatan sangat penting dalam analisis kapasitas organisasi dan perencanaan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Distribusi Jabatan Pegawai:

- a. Sebagian besar ASN Dinas Perikanan dan Peternakan menduduki Jabatan Fungsional yaitu sebanyak 62 orang (60,784 persen). Hal ini terdiri dari Jabatan Fungsional hasil penyetaraan mulai Tahun 2022 dari Jabatan Esselon IV (Kepala Subbagian di Sekretariat dan Kepala Seksi di Bidang-bidang), serta dari penerimaan pegawai baru (CPNS dan PPPK). Jabatan Fungsional ini terdiri dari Jabatan Fungsional Kesekretariatan (Perencana, Pranata Komputer, Analis Kebijakan, Arsiparis, dan Analis Sumberdaya Manusia) dan Jabatan Fungsional Teknis di Bidang-

bidang yang terkait dengan Urusan Kelautan dan Perikanan, dan Urusan Pertanian (dalam hal ini Peternakan).

- b. ASN yang menduduki Jabatan Struktural, sebanyak 30 orang (29,412 persen). Jabatan Struktural ini terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian di Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala UPTD, dan Kepala Subbagian Tata Usaha di UPTD. Jabatan Struktural menempati posisi dengan tanggung jawab manajerial dan pengambilan keputusan.
- c. Jabatan pelaksana 10 orang (9,804 persen), yang bertanggung jawab terhadap tugas teknis administratif, teknis operasional, dan pendukung kegiatan teknis / administratif lainnya.

Implikasi Strategis:

- a. Dinas Perikanan dan Peternakan didominasi oleh jabatan fungsional, dimana personilnya diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan teknis sesuai profesi yang diembannya. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan para pejabat fungsional dan penempatannya sesuai dengan jabatan yang diembannya.
- b. Sedikitnya jabatan pelaksana, akan menimbulkan kekurangseimbangan dalam proses manajerial untuk pelaksanaan tugas pelaksana di proses administrasi maupun tugas teknis.
- c. Ke depan masih perlu optimalisasi pembentukan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional baik melalui mekanisme *inpassing*, pengusulan formasi baru, maupun pengembangan kompetensi ASN yang sudah ada, karena di samping untuk mengantisipasi yang memasuki masa purna bakti, juga untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga fungsional administratif maupun kebutuhan tenaga fungsional teknis perikanan dan teknis peternakan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Struktur Jabatan ASN di Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2025 sudah didominasi oleh jabatan fungsional dan sedikitnya jabatan pelaksana. Ke depan, strategis reformasi manajemen ASN perlu diarahkan pada penciptaan struktur yang seimbang untuk

pelaksana dan pemanfaatan jabatan fungsional sesuai dengan kemampuan teknisnya serta peningkatan kompetensi dan jenjang karir jabatan fungsional.

#### 5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin

Berdasarkan tabel di bawah, jumlah pegawai ASN menurut jenis kelamin per Agustus 2025 adalah sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai ASN	Persentase
1	Laki – laki	68	66,67
2	Perempuan	34	33,33
<b>J U M L A H</b>		<b>102</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, 2025

Tabel tersebut menyajikan distribusi pegawai di Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi Perangkat Daerah, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (*gender equity*).

Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin:

- a. Sebagian besar pegawai adalah laki-laki, yakni sebanyak 68 orang atau 66,67 persen dari total pegawai. Ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi komposisi sumber daya aparatur di Dinas Perikanan dan Peternakan.
- b. Jumlah pegawai perempuan sebanyak 34 orang (33,33 persen), yang merupakan proporsi minoritas dalam struktur organisasi saat ini.

Implikasi Strategis:

- a. Kesenjangan gender tidak signifikan, karena sekitar sepertiga pegawai terdiri dari kaum perempuan sehingga keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan cukup bagus, terutama yang berkaitan dengan pelayanan teknis yang menyentuh kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

- b. Keterwakilan perempuan yang sudah cukup baik menunjukkan peluang untuk mendorong pelibatan perempuan dalam jabatan strategis dan pengambilan kebijakan, yang akan memperkaya pendekatan pelayanan publik dan sensitivitas sosial. Pelayanan teknis perikanan dan peternakan, sebelumnya menjadi dominan kaum laki-laki. Untuk saat ini sudah banyak kaum perempuan yang menjadi petugas teknis perikanan dan petugas teknis peternakan (pengolahan hasil perikanan, pengelola kesehatan ikan, medik veteriner, paramedik veteriner, dan petugas teknis lainnya).

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur ASN Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2025 menunjukkan dominasi pegawai laki-laki dengan proporsi 66,67 persen, sementara perempuan 33,33 persen. Hal ini sudah cukup bagus dan merupakan peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih ramah gender, serta memastikan bahwa prinsip inklusivitas dalam manajemen kepegawaian dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan.

#### **6. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan**

Berdasarkan tabel di bawah ini, jumlah pegawai ASN menurut jabatan dan jenis kelamin per Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

**Jumlah Pegawai ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin**

No	Jabatan	Laki-laki (Orang)	%	Perempuan (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	20	19,608	11	10,784	31	30,392
2	Fungsional	38	37,255	23	22,549	61	59,804
3	Pelaksana	10	9,804	-	-	10	9,804
<b>J U M L A H</b>		<b>68</b>	<b>66,667</b>	<b>34</b>	<b>33,333</b>	<b>102</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, 2025

Tabel menyajikan distribusi pegawai ASN di Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan jabatan dan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi Perangkat Daerah pada setiap lini jabatan,

sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (*gender equity*) di setiap lini jabatan.

Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin:

- a. Sebagian besar pegawai adalah pada setiap kelompok jabatan adalah laki-laki, yakni jabatan struktural sebanyak 20 orang atau 19,608 persen dari total seluruh jabatan, jabatan fungsional sebanyak 38 orang atau 37,255 persen dari total seluruh jabatan, dan untuk jabatan pelaksana sebanyak 10 orang atau 9,804 persen dari total seluruh jabatan. Untuk jabatan pelaksana seluruhnya laki-laki.
- b. Sedangkan untuk perempuan pada jabatan struktural sebanyak 11 orang atau 10,784 persen dari total seluruh jabatan, pada jabatan fungsional sebanyak 23 atau 22,549 persen dari total seluruh jabatan, dan pada jabatan pelaksana tidak ada perempuannya. Beberapa orang pegawai perempuan di jabatan pelaksana sudah memasuki masa purna bakti. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi pada setiap lini jabatan yang ada, malahan untuk jabatan pelaksana seluruhnya adalah laki-laki.

Implikasi Strategis :

Kesenjangan gender pada setiap lini jabatan tidak signifikan karena masih ada keterwakilannya dari pegawai perempuan, kecuali pada jabatan pelaksana sudah tidak ada lagi perempuan. Hal ini penting untuk keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan cukup bagus, terutama yang berkaitan dengan pelayanan teknis yang menyentuh kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan pada lini jabatan struktural dan jabatan fungsional sudah cukup baik, kecuali pada jabatan pelaksana sudah tidak ada perempuannya. Ke depan harus direncanakan untuk rekrutmen perempuan untuk jabatan pelaksana supaya terdapat keseimbangan gendernya.

## **7. Sarana dan prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN didukung oleh perangkat kerja yang harus tersedia dalam organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam analisis jabatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

**Data Perangkat Kerja ASN  
yang Dapat Mendukung Kinerja ASN  
Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Sumedang**

No	Nama Jabatan	Perangkat Kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat Kerja	Pemenuhan	Kondisi : Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat	Rencana Pemenuhan
1.	Kepala Dinas	1. Laptop 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. Handphone 6. ATK 7. Kendaraan	1. Laptop 2. Internet 3. Handphone 4. ATK 5. Kend. Roda 4	Terpenuhi 71,43 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik 5. Baik	1. Pemeliharaan 2. Pengadaan 3. Pengadaan 4. Pemeliharaan 5. Pemeliharaan 6. Pengadaan 7. Pemeliharaan
2.	Sekretaris	1. Laptop 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. ATK 6. Kendaraan	1. Internet 2. ATK 3. Kend. Roda 4	Terpenuhi 50 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik	1. Pemeliharaan 2. Pengadaan 3. Pengadaan 4. Pemeliharaan 5. Pengadaan 6. Pemeliharaan
3.	Kepala Bidang Perikanan	1. Laptop 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. ATK 6. Kendaraan	1. Internet 2. ATK 3. Kend. Roda 4	Terpenuhi 50 persen	1. Baik 2. Baik 3. Rusak Ringan	1. Pengadaan 2. Pengadaan 3. Pengadaan 4. Pemeliharaan 5. Pengadaan 6. Pemeliharaan
4.	Kepala Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan	1. Laptop 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. ATK 6. Kendaraan	1. Printer 2. Internet 3. ATK 4. Kend. Roda 4	Terpenuhi 66,67 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Rusak Ringan	1. Pengadaan 2. Pengadaan 3. Pemeliharaan 4. Pemeliharaan 5. Pengadaan 6. Pemeliharaan
5.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Laptop 2. Internet 3. ATK 4. Kendaraan	1. Internet 2. ATK 3. Kend. Roda 4	Terpenuhi 75 persen	1. Baik 2. Baik 3. Rusak Ringan	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pemeliharaan
6.	Kepala Subbagian	1. Laptop	1. Laptop	Terpenuhi 100 persen	1. Baik 2. Baik	1. Pemeliharaan

No	Nama Jabatan	Perangkat Kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat Kerja	Pemenuhan	Kondisi : Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat	Rencana Pemenuhan
	Umum dan Keuangan	2. Internet 3. Printer 4. Scaner 5. ATK 6. Kend. Roda 2	2. Internet 3. Printer 4. Scaner 5. ATK 6. Kend. Roda 2		3. Baik 4. Baik 5. Baik 6. Baik	2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pemeliharaan 5. Pengadaan 6. Pemeliharaan
7.	Kepala UPTD	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	Terpenuhi 100 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik 5. Rusak Ringan	1. Pemeliharaan 2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Internet 2. ATK 3. Kend. Roda 2	Terpenuhi 60 persen	1. Baik 2. Baik 3. Rusak Ringan	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan
9.	Fungsional Perencana	1. Laptop 2. Internet 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. Kend. Roda 2	1. Laptop 2. Internet 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. Kend. Roda 2	Terpenuhi 100 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik 5. Baik 6. Baik	1. Pemeliharaan 2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pemeliharaan 5. Pengadaan 6. Pemeliharaan
10.	Pranata Komputer	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK	Terpenuhi 80 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pengadaan 5. Pengadaan
11.	Arsiparis	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Internet 2. ATK	Terpenuhi 40 persen	1. Baik 2. Baik	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan 5. Pengadaan
12.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Internet 2. ATK	Terpenuhi 40 persen	1. Baik 2. Baik	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan 5. Pengadaan

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Perangkat Kerja (Sesuai Anjab ABK)</b>	<b>Realisasi Perangkat Kerja</b>	<b>Pemenuhan</b>	<b>Kondisi : Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat</b>	<b>Rencana Pemenuhan</b>
13.	Bendahara	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Internet 2. ATK	Terpenuhi 40 persen	1. Baik 2. Baik	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan 5. Pengadaan
14.	Analisis Kebijakan	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Internet 2. ATK	Terpenuhi 40 persen	1. Baik 2. Baik	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan 5. Pengadaan
15.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	Terpenuhi 100 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik 5. Rusak Ringan	1. Pemeliharaan 2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan
16.	Pengelola Kesehatan Ikan	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Internet 2. ATK	Terpenuhi 40 persen	1. Baik 2. Baik	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan 5. Pengadaan
17.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	Terpenuhi 100 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik 5. Baik	1. Pemeliharaan 2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan
18.	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Internet 2. Printer 3. ATK 4. Kend. Roda 2	Terpenuhi 80 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan
19.	Analisis Aquakultur	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Internet 2. ATK 3. Alat Pengujian	Terpenuhi 50 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan 5. Pengadaan 6. Pemeliharaan

No	Nama Jabatan	Perangkat Kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat Kerja	Pemenuhan	Kondisi : Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat	Rencana Pemenuhan
		6. Alat Pengujian				
20.	Pengelola Kesehatan Ikan	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2 6. Alat Pengujian	1. Internet 2. ATK	Terpenuhi 33,33 persen	1. Baik 2. Baik	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan 5. Pengadaan 6. Pengadaan
21.	Medik Veteriner	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2 6. Sepatu Boot 7. Peralatan Bedah 8. Alat Uji cepat 9. Alat Diagnostik 10. APD	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2 6. Sepatu Boot 7. Alat Diagnostik 8. APD	Terpenuhi 80 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik 5. Rusak Ringan 6. Baik 7. Baik 8. Baik	1. Pemeliharaan 2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan 6. Pengadaan 7. Pengadaan 8. Pengadaan 9. Pemeliharaan 10. Pemeliharaan
22.	Pengawas Bibit Ternak	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2 6. Sepatu Boot	1. Komputer 2. Internet 3. ATK 4. Kend. Roda 2 5. Sepatu Boat	Terpenuhi 83,33 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik 5. Baik	1. Pemeliharaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan 6. Pengadaan
23.	Paramedik Veteriner	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2 6. Sepatu Boot 7. Peralatan Inseminasi Buatan	1. Komputer 2. Internet 3. ATK 4. Kend. Roda 2 5. Sepatu Boat 6. Peralatan Inseminasi Buatan	Terpenuhi 85,71 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Rusak Ringan 5. Baik 6. Baik	1. Pemeliharaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan 6. Pengadaan 7. Pemeliharaan
24.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	1. Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda	1. Internet 2. ATK	Terpenuhi 40 persen	1. Baik 2. Baik	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan

No	Nama Jabatan	Perangkat Kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat Kerja	Pemenuhan	Kondisi : Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat	Rencana Pemenuhan
		2				5. Pemeliharaan
25.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK	Terpenuhi 80 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik	1. Pemeliharaan 2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan
26.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK	Terpenuhi 80 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik	1. Pemeliharaan 2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan
27.	Penyuluh Pertanian	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Komputer 2. Peralatan Inseminasi Buatan 3. Kend. Roda 2	Terpenuhi 60 persen	1. Baik 2. Baik 3. Rusak Ringan	1. Pemeliharaan 2. Pengadaan 3. Pengadaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan
28.	Perawat Ternak	1. Sepatu Boot 2. Sarung Tangan 3. Kend. Roda 2	1. Sepatu Boot 2. Sarung Tangan 3. Kend. Roda 2	Terpenuhi 100 persen	1. Baik 2. Baik 3. Rusak Ringan	1. Pengadaan 2. Pengadaan 3. Pemeliharaan
29.	Teknisi Perikanan Budidaya	1. Sepatu Boot 2. Sarung Tangan 3. Kend. Roda 2	1. Sepatu Boot 2. Sarung Tangan 3. Kend. Roda 2	Terpenuhi 100 persen	1. Baik 2. Baik 3. Rusak Ringan	1. Pengadaan 2. Pengadaan 3. Pemeliharaan
30.	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	Terpenuhi 100 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik 5. Baik	1. Pemeliharaan 2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pengadaan 5. Pemeliharaan
31.	Pengawas Mutu Bibit Ternak	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Kend. Roda 2	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. ATK	Terpenuhi 80 persen	1. Baik 2. Baik 3. Baik 4. Baik	1. Pemeliharaan 2. Pemeliharaan 3. Pemeliharaan 4. Pengadaan 5. Pengadaan
32.	Pengelola Pengawasan Pembudidaya Ikan	1. Komputer 2. Internet	1. Internet 2. ATK	Terpenuhi 75 persen	1. Baik 2. Baik	1. Pengadaan 2. Pemeliharaan

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Perangkat Kerja (Sesuai Anjab ABK)</b>	<b>Realisasi Perangkat Kerja</b>	<b>Pemenuhan</b>	<b>Kondisi : Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat</b>	<b>Rencana Pemenuhan</b>
		3. ATK 4. Kend. Roda 2	3. Kend. Roda 2		3. Rusak Ringan	3. Pengadaan 4. Pemeliharaan

**Rekapitulasi Perangkat Kerja,  
Kondisi Perangkat Kerja Yang Sudah Terpenuhi,  
Dan Rencana Pemenuhan Perangkat Kerja**

No.	Jabatan	Jumlah Perang- kat	Jumlah Ter- penuhi	Persen Ter- penuhi	Kondisi Perangkat Kerja Tepenuhi				Rencana Pemenuhan		
					Baik	Besok Ringan	Besok Berat	Jumlah	Pemenu- han	Peng- adaan	Jumlah
1	Kepala Dinas	7	5	71,43	5	-	-	5	4	3	7
2	Sekretaris	6	3	50,00	3	-	-	3	3	3	6
3	Kepala Bidang Perikanan	6	3	50,00	2	1	-	3	2	4	6
4	Kepala Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan	6	4	66,67	3	1	-	4	3	3	6
5	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	3	75,00	2	1	-	3	2	2	4
6	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	6	6	100,00	6	-	-	6	5	1	6
7	Kepala UPTD	5	5	100,00	4	1	-	5	4	1	5
8	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD	5	3	60,00	2	1	-	3	2	3	5
9	Fungsional Perencana	6	6	100,00	6	-	-	6	5	1	6
10	Pranata Komputer	5	4	80,00	4	-	-	4	2	3	5
11	Analisis	5	2	40,00	2	-	-	2	1	4	5
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	2	40,00	2	-	-	2	1	4	5
13	Bendahara	5	2	40,00	2	-	-	2	1	4	5
14	Analisis Kebijakan	5	2	40,00	2	-	-	2	1	4	5
15	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	5	5	100,00	4	1	-	5	4	1	5
16	Pengelola Kesehatan Ikan	5	2	40,00	2	-	-	2	1	4	5
17	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5	5	100,00	5	-	-	5	4	1	5
18	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5	4	80,00	4	-	-	4	3	2	5
19	Analisis Aquakultur	6	3	50,00	3	-	-	3	2	4	6
20	Pengelola Kesehatan Ikan	6	2	33,33	2	-	-	2	1	5	6
21	Medik Veteriner	10	8	80,00	7	1	-	8	5	5	10
22	Pengawas Bibit Ternak	6	5	83,33	5	-	-	5	3	3	6
23	Paramedik Veteriner	7	6	85,71	5	1	-	6	4	3	7
24	Analisis Pasar Hasil Pertanian	5	2	40,00	2	-	-	2	2	3	5
25	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	5	4	80,00	4	-	-	4	4	1	5
26	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5	4	80,00	4	-	-	4	4	1	5
27	Penguluh Pertanian	5	3	60,00	2	1	-	3	2	3	5
28	Perawat Ternak	3	3	100,00	2	1	-	3	1	2	3
29	Teknisi Perikanan Budidaya	3	3	100,00	2	1	-	3	1	2	3

No.	Jabatan	Jumlah Perang- kat	Jumlah Ter- penuhi	Persen Ter- penuhi	Kondisi Perangkat Kerja Terpenuhi				Rencana Pemenuhan		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	Pemeli- haraan	Peng- adaan	Jumlah
30	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan	5	5	100,00	5	-	-	5	4	1	5
31	Pengawas Mutu Bibit Ternak	5	4	80,00	4	-	-	4	3	2	5
32	Pengelola Pengawasan Pembudidaya Ikan	4	3	75,00	2	1	-	3	2	1	3
	<b>Rata-rata / Jumlah</b>			<b>71,26</b>	<b>111</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>123</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>170</b>
<b>Rekapitulasi :</b>											
<b>1</b>	<b>Rata-rata Terpenuhi</b>			<b>71,26</b>	<b>persen</b>						
<b>2</b>	<b>Persentase Kondisi Baik</b>			<b>90,24</b>	<b>persen</b>						
<b>3</b>	<b>Persentase Kondisi Rusak Ringan</b>			<b>9,76</b>	<b>persen</b>						
<b>5</b>	<b>Persentase Kondisi Rusak Berat</b>			<b>-</b>	<b>persen</b>						
<b>6</b>	<b>Rencana Pemeliharaan</b>			<b>50,59</b>	<b>persen</b>						
<b>7</b>	<b>Rencana Pengadaan</b>			<b>49,41</b>	<b>persen</b>						

### Kesesuaian antara Perangkat Kerja Anjab-ABK dan Realisasi

Secara umum, perangkat kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan di Dinas Perikanan dan Peternakan telah direalisasikan dengan cukup baik dan relatif sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Setiap pejabat struktural maupun pelaksana memiliki akses terhadap perangkat komputer/laptop, jaringan internet, alat transportasi, dan peralatan lainnya. Secara angka rata-rata telah mencapai kecukupan sebesar 71,26 persen untuk sebanyak 32 jabatan yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan. Walaupun demikian, masih diperlukan analisis kembali sarana dan prasarana yang diperlukan terutama untuk jabatan teknis perikanan dan peternakan, serta harus dicek kembali terhadap masing-masing personilnya di suatu jabatan yang diembannya, sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Sarana dan prasarana yang dipakai dan mencukupi akan menunjang pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Selanjutnya terkait dengan pemenuhan perangkat kerja pada suatu jabatan, harus juga dianalisis terhadap kondisi perangkat kerja yang sudah terpenuhi apakah kondisinya baik atau rusak untuk mendukung tugas personil yang menduduki jabatan tersebut. Selain itu data kondisi perangkat kerja tersebut juga dapat berfungsi untuk menyusun keperluan pemeliharaan dan/atau pengadaan perangkat kerja tersebut ke depan. Perangkat kerja yang ada diperlukan upaya pemeliharaan untuk tetap bisa digunakan

dengan baik dalam mendukung tugas-tugas pemangku jabatan tersebut. Selain itu untuk perangkat kerja yang sifatnya habis pakai dan perangkat kerja yang belum terpenuhi harus dilakukan perencanaan untuk pengadaan pada waktu yang akan datang untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemangku jabatan.

Berdasarkan tabel Rekapitulasi perangkat kerja tersebut di atas dapat dihitung dari perangkat kerja yang sudah terpenuhi, yang dalam kondisi baik ada 111 perangkat kerja atau 90,24 persen dari total perangkat kerja yang sudah terpenuhi sebanyak 123 perangkat kerja. Implikasi dari data ini untuk menunjang pelaksanaan tugas, maka perangkat kerja yang dalam, kondisi baik cukup baik atau di atas 90 persen, akan tetapi walaupun kondisinya cukup baik, tetap harus dilakukan pemeliharaan terhadap yang kondisinya baik maupun terhadap kondisi yang rusak ringan agar perangkat kerja tersebut dapat optimal menunjang pelaksanaan tugasnya.

Selanjutnya, berdasarkan tabel rekapitulasi perangkat kerja dapat dilihat atau dibuat rencana pemenuhan perangkat kerja untuk yang sudah ada tetapi diperlukan pemeliharaan, untuk perangkat kerja yang pakai habis dan yang belum ada harus dilakukan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan perangkat kerja tersebut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rencana pemeliharaan mencapai 50,59 persen dan rencana pengadaan mencapai 49,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ke depan harus dilakukan secara rutin pelaksanaan pemeliharaan perangkat kerja dan pelaksanaan pengadaan secara bertahap, untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan kegunaan perangkat kerja dengan pemeliharaan dan pengadaan dalam menunjang kinerja para pemangku jabatan yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan.

### **C. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan**

Sebagai unit kerja pemerintahan yang berada di garis terdepan dalam menjembatani hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam urusan perikanan dan peternakan, Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel. Selama periode 5 tahun terakhir, Dinas Perikanan dan Peternakan telah berupaya

meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan proses administratif, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyederhanaan alur pelayanan. Komitmen ini dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi dan dorongan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelayanan yang menjadi fokus utama Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Pelayanan Teknis Perikanan dan Peternakan, serta pelayanan lainnya yang terkait perikanan dan peternakan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat perikanan dan peternakan di Daerah. Beberapa pelayanan teknis perikanan dan peternakan yang menjadi trend di masyarakat adalah pelayanan kesehatan hewan, pelayanan inseminasi buatan, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, penangkap ikan dan peternak, pengujian kualitas air lingkungan budidaya ikan, pelayanan penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha peternakan, pelayanan penyediaan benih ikan, pelayanan pasar hewan dan pelayanan-pelayanan lainnya yang terkait dengan dinas perikanan dan peternakan. pelayanan yang dilaksanakan meliputi dua jenis, yaitu pelayanan aktif dan pasif. pelayanan aktif dilakukan oleh petugas dengan mendatangi sasaran, sedangkan pelayanan pasif adalah sasaran mendatangi tempat pelayanan, misalnya pelayanan kesehatan hewan di klinik hewan. Pelayanan ini ditunjang atau dilaksanakan oleh personil yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan, baik yang berada di kantor dinas maupun yang ada/tersebar di beberapa UPTD (UPTD teknis dan UPTD Wilayah).

Selain pelayanan yang dilaksanakan, Dinas Perikanan dan Peternakan juga melaksanakan tugas dalam upaya meningkatkan produksi perikanan dan peternakan melalui beberapa program yang dilaksanakan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sumedang, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN maupun sumber pendanaan lain yang syah.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan, diperlukan penunjang berupa sarana dan prasarana serta personil yang memadai. Beberapa sarana dan prasarana pelayanan dirasa masih kurang memadai seperti ruang pelayanan kesehatan hewan/klinik hewan, sarana dana prasarana inseminasi buatan, sarana penunjang pembenihan ikan, laboratorium kesehatan ikan, dan beberapa sarana prasarana lainnya. Hal ini menjadi catatan penting dalam pengembangan pelayanan ke depan agar

mampu menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat perikanan dan peternakan.

Ke depan, Dinas Perikanan dan Peternakan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan tata kelola internal, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi petugas teknis pelayanan, serta percepatan transformasi digital.

Berdasarkan upaya pelayanan dan tugas yang diemban Dinas Perikanan dan Peternakan, hasilnya dapat dilihat dari Capaian Kinerja yang telah diperoleh selama beberapa tahun ke belakang. Selain itu terdapat instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan kepada masyarakat berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh melalui survei. Survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bahan refleksi dan dasar perumusan kebijakan perbaikan layanan.

IKM mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, serta sarana dan prasarana pendukung. Hasil pengukuran IKM memberikan gambaran yang objektif tentang sejauh mana penyelenggaraan pelayanan di Dinas Perikanan dan Peternakan.

Selama periode 5 tahun terakhir, Dinas Perikanan dan Peternakan telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan capaian kinerja dan kualitas pelayanan melalui berbagai inisiatif perbaikan internal. Namun demikian, capaian kinerja dan hasil survei IKM juga menunjukkan dinamika capaian dari tahun ke tahun, yang menjadi indikator penting bagi perencanaan strategis ke depan. Fluktuasi capaian kinerja dan IKM turut mencerminkan pengaruh dari berbagai faktor, baik internal seperti keterbatasan sumber daya dan sarana, maupun eksternal seperti perubahan kebijakan, kondisi lingkungan, dan kondisi sosial masyarakat.

Berikut disajikan Tabel Capaian Kinerja dan IKM dari Tahun 2020 - 2024. Data ini menjadi evaluasi sekaligus dasar perumusan strategi peningkatan kinerja dan pelayanan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029.

**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan**

a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 – 2020

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2018)	2019			2020			
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	<b>URAIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>											
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah produk perikanan	Jumlah produk ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan yang tercatat	%	2,12	4,00	2,34	58,50	4,40	3,48	79,05	
		1. Ikan Konsumsi		Ton	8.285	8.517	9.020	108,67	9.034	9.259	102,80	
		2. Ikan Hias		Ekor	632.472	639.899	642.085	100,80	659.299	675,553	100,94	
3. Benih Ikan	179.273	189.949	193.227	107,84	195.022	197.969	101,51					
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina	Unit	45	48	48	100,00	52	52	100,00		
Program Kesehatan Lingkungan Ikan dan Konservasi	Persentase ketertarikan lingkungan budidaya perikanan	Terpaparnya lingkungan budidaya ikan dan konservasi	Persen	100	100	100	100,00	100	100	100,00		
Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	<b>URAIAN PERTANIAN</b>											
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Persentase pengendalian penyakit hewan	Persentase pengendalian Penyakit Hewan	persen	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Pengujian sampel bahan pangan asal hewan	Persen	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
	Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak	Jumlah populasi ternak yang tercatat									
		1. Sapi potong		Ekor	29.780	31.054	30.458	98,69	32.586	34.915	107,15	
		2. Sapi perah		Ekor	4.169	4.327	4.028	95,39	4.039	3.703	91,87	
		3. Kambing		Ekor	27.957	29.179	28.220	100,91	29.589	29.913	100,08	
		4. Domba		Ekor	111.704	116.131	97.750	86,99	121.925	95.125	78,11	
		5. Ayam broiler		Ekor	519.505	541.880	535.031	97,06	558.295	512.963	107,91	
		6. Ayam ras petelur		Ekor	111.880	116.094	92.482	80,31	122.612	942.778	693,60	
7. Ayam ras pelaging		Ekor		2.894.495	2.989.754	2.496.850	80,51	2.136.292	2.580.080	80,27		
8. Babi	Ekor	49.753	51.081	104.887	202,94	54.216	81.393	150,13				
Jumlah produk perternakan	Jumlah produk perternakan yang tercatat											
	1. Daging	Ton	15.474	16.129	22.087	143,42	16.925	22.395	132,32			
	2. Telur	Ton	1.028	1.759	1.870	106,29	1.792	6.759	275,80			
3. Susu	Ton	12.323	12.859	11.079	89,39	13.480	8.619	63,62				
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	Unit	75	81	68	80,00	104	104	104,00		

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, diolah

b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021			Kondisi Akhir (2021)																															
									Target	Realisasi	%																																
8	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sumedang melalui peningkatan produktivitas peternakan di permukiman.	Kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sumedang melalui peningkatan produktivitas peternakan di permukiman.	Adaptasi masyarakat di wilayah Kecamatan Sumedang melalui peningkatan produktivitas peternakan di permukiman.	Laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Sumedang	Laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Sumedang	Program Pengendalian Penyakit Ternak	jumlah prosedur pencegahan:	Ton	3.288	3.200	3.832	92,49	3.888																														
														1. Obat-obatan	Ton	3.288	3.888	997,89	100,00	3.888																							
																					2. Obat lain	Ekor	370.533	700.863	729.889,00	100,00	700.863																
														3. Bahan lain	Ekor/Ekor	1.87.999	205.100	207.000,00	100,00	205.100																							
																					Program Pengendalian Penyakit Burung	jumlah prosedur pencegahan:	Ton	3.288	3.888	997,89	100,00	3.888															
														1. Obat-obatan	Ton	3.288	3.888	997,89	100,00	3.888																							
						2. Obat lain	Ekor	370.533	700.863	729.889,00	100,00	700.863																															
													3. Bahan lain	Ekor/Ekor	1.87.999	205.100	207.000,00	100,00	205.100																								
						Program Pengendalian Penyakit Ikan	jumlah unit pengendalian dan pemantauan peternakan yang terdina	unit	50	50	50	100								50																							
													Program Pengendalian Penyakit Daging	Persen terdapatnya peternakan terdaging di wilayah Kecamatan Sumedang	Persen	100	100	100	100										100														
																					Laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Sumedang	Program Pengendalian Penyakit Ternak	Persen terdapatnya peternakan	Persen	100	100	100	100															
																														Program Pengendalian Penyakit Burung	Persen terdapatnya peternakan	Persen	100	100	100	100							
					Program Pengendalian Penyakit Ikan																																jumlah prosedur terdina:	Ekor	34.813	34.878	34.872	99,93	34.878
						2. Obat lain	Ekor	34.813	34.270	34.045	99,93	34.270																															
													3. Bahan lain	Ekor	30.130	1.28.089	89.092	97,00	1.28.089																								
						4. Obat-obatan	Ekor	392.843	399.007	399.000	99,87	399.007																															
													5. Obat-obatan lain	Ekor	592.778	1.28.145	399.778	95,91	1.28.145																								
					6. Obat-obatan lain	Ekor	2.590.280	3.908.743	2.852.872	99,92	3.908.743																																
												7. Obat-obatan lain	Ekor	40.593	57.198	58.255	100,00	57.198																									
Program Pengendalian Penyakit Burung	jumlah prosedur terdina:	Ton	22.880	17.898	18.890	100,00	17.898																																				
								1. Obat-obatan	Ton	3.733	3.789	3.827	100,00	3.789																													
															2. Obat lain	Ekor	34.813	34.270	34.045	99,93	34.270																						
								3. Bahan lain	Ekor	30.130	1.28.089	89.092	97,00	1.28.089																													
															4. Obat-obatan	Ekor	392.843	399.007	399.000	99,87	399.007																						
								5. Obat-obatan lain	Ekor	592.778	1.28.145	399.778	95,91	1.28.145																													
6. Obat-obatan lain	Ekor	2.590.280	3.908.743	2.852.872	99,92	3.908.743																																					
							7. Obat-obatan lain	Ekor	40.593	57.198	58.255	100,00	57.198																														
Program Pengendalian Penyakit Ikan	jumlah prosedur terdina:	Ton	22.880	17.898	18.890	100,00								17.898																													
							1. Obat-obatan	Ton	3.733	3.789	3.827	100,00	3.789																														
															2. Obat lain	Ekor	34.813	34.270	34.045	99,93	34.270																						
							3. Bahan lain	Ekor	30.130	1.28.089	89.092	97,00	1.28.089																														
															4. Obat-obatan	Ekor	392.843	399.007	399.000	99,87	399.007																						
							5. Obat-obatan lain	Ekor	592.778	1.28.145	399.778	95,91	1.28.145																														
6. Obat-obatan lain	Ekor	2.590.280	3.908.743	2.852.872	99,92	3.908.743																																					
							7. Obat-obatan lain	Ekor	40.593	57.198	58.255	100,00	57.198																														
Program Pengendalian Penyakit Daging	jumlah unit usaha peternakan dan pemantauan yang terdina	unit	100	100	100	100								100																													

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, diolah

c. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 – 2023

PMDN No. 17 Tahun 2021 (Indikator Kinerja Daerah)												
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis sains	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.190	1.290,82	1.331,649	103,16	1.400,54	1.409,362	100,63	1.519,58	1.526,075	100,43
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	8.080	8.241,16	8.276,341	100,43	8.405,99	8.411,707	100,07	8.574,11	8.704,970	101,53
Meningkatnya produktivitas petanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	%	67,10	5,18	(3,86)	(74,54)	5,18	5,86	113,07	5,18	2,602	50,22
	<b>Populasi Ternak :</b>							5,85			0,82	
	1. Sapi Potong	ekor	34.915		31.672	(9,29)		32.427	2,38		29.461	(9,09)
	2. Sapi Perah	ekor	3.703		4.327	16,85		4.130	(4,55)		4.193	1,53
	3. Kambing	ekor	36.913		31.060	(15,86)		34.593	11,37		34.048	(1,58)
	4. Domba	ekor	95.135		86.092	(9,51)		87.323	1,43		83.330	(4,57)
	5. Ayam Buras	ekor	612.943		531.095	(13,35)		582.731	9,72		564.807	(3,08)
	6. Ayam Ras Pedakur	ekor	542.776		588.776	8,47		523.491	(11,09)		502.369	(4,03)
	7. Ayam Ras Pedaging	ekor	2.580.280		1.952.972	(24,31)		2.558.300	31,00		2.520.850	(1,46)
	8. Itik	ekor	81.363		59.235	(27,20)		63.105	6,53		81.324	28,87
	<b>Produksi Peternakan :</b>											
	1. Daging	Ton	22.385		18.965	(15,28)		24.258,15	27,91		23.563,44	(2,86)
	2. Telur	Ton	6.759		8.244	21,98		7.773,73	(5,70)		9.590,71	23,37
	3. Susu	Ton	8.619		10.773	25,00		10.282,38	(4,55)		10.439,23	1,53
						(3,86)			5,86			
Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	92,31	80,80	100,00	123,76	80,80	84,62	104,72	80,80	96,15	119,00

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, diolah

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (2023)	2024		
				Target	Realisasi	%
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan	Ton	10.231,05	10.386,74	10.568,34	101,75
Meningkatnya produktivitas pertanian	Peningkatan Produksi Peternakan	%	7,34	5,67	11,84	208,80
	<b>Produksi Peternakan :</b>					
	1. Daging	Ton	23.563,444		31.085,82	31,92
	2. Telur	Ton	9.590,708		9.692,78	1,06
	3. Susu	Ton	10.439,232		10.703,14	2,53
Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	96,15	80,77	100,00	123,81
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Point	33,57	82,00	76,33	93,09
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	100,00

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, diolah

e. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020 - 2024

NO.	IKK OUTCOME	PERHITUNGAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					KETERANGAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Total Produksi Perikanan	(Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota) / (Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan) X 100%	Persen	102,83	97,98	100,15	101,36	101,75	
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	((Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) - Jumlah kejadian/kasus hewan menular tahun sebelumnya) / (Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1))) X 100%	Persen	#DIV/0!	(100,00)	#DIV/0!	(62,86)	(17,80)	

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, diolah

f. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 – 2024

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>NILAI IKM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2020	78,89	B (Baik)
2	2021	80,13	B (Baik)
3	2022	81,23	B (Baik)
4	2023	82,57	B (Baik)
5	2024	81,14	B (Baik)
<b>RATA-RATA</b>		<b>80,79</b>	<b>B (Baik)</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, diolah

Grafik 2.3.1  
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 - 2025  
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang



Gambaran kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan pada periode Tahun 2020 – 2024 sebagaimana terinci pada tabel di atas point a sampai e (Indikator Kinerja Utama / IKU dan Indikator Kinerja Kunci / IKK), sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan untuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan Dinas Perikanan dan

Peternakan Kabupaten Sumedang tercantum pada tabel tersebut di atas point f dan Grafik 2.3.1.

Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan dibagi menjadi 4 tabel untuk IKU, point a sampai point d. Hal ini dikarenakan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis (IKU) mengalami perubahan mulai tahun 2021, sebagai akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut dengan aturan-aturan pendukungnya. Pada tahun 2020 mulai disusun Perubahan Renstra 2018 – 2023, sebagaimana juga Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023. Tabel point a menyajikan pencapaian kinerja tahun 2019 – 2020, point b menyajikan pencapaian kinerja tahun 2021, dan point c menyajikan pencapaian kinerja Tahun 2022 - 2023. Khusus Tahun 2021, IKU-nya masih menggunakan IKU sebelum Perubahan, tetapi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan telah menggunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya mulai Tahun 2024 dibuat Rencana Strategis (Renstra) antara Tahun 2023 – 2026 yang berdasarkan atas Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2023 – 2026, berkenaan dengan adanya PEMILU serentak untuk Legislatif dan Presiden, serta PEMILU serentak untuk Kepala Daerah di Tahun 2024.

Dari tabel point a terlihat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2019 – 2020, untuk urusan perikanan mengalami kenaikan, pada Indikator Kinerja Utama (IKU), walaupun masih di bawah targetnya. Hal ini seiring dengan kenaikan jumlah produksi perikanan berupa Ikan Konsumsi, Benih Ikan, dan Ikan Hias. Untuk produksi Ikan Konsumsi terdapat peran dari hasil tangkapan ikan di Waduk Jatigede. Selain itu juga didukung dengan adanya upaya pengolahan dari Ikan Konsumsi yang diproduksi, sehingga meningkatkan nilai tambah produk tersebut. Peningkatan Nilai Tambah ini berperan dalam / berkontribusi terhadap peningkatan Nilai PDRB atau berperan terhadap laju pertumbuhan subsektor perikanan. Untuk Subsektor Peternakan, terdapat kenaikan laju pertumbuhannya dari tahun 2019 ke tahun 2020 (dari 2,34 persen

menjadi 3,48 persen), walaupun laju pertumbuhannya masih di bawah target.

Selanjutnya pada tabel point b, dengan IKU yang masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Laju Pertumbuhan Subsektor Perikanan dan Laju Pertumbuhan Subsektor Peternakan. Berdasar tabel tersebut, bahwa Laju Pertumbuhan Subsektor Perikanan Tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020 (3,48 menjadi 4,82 persen), walaupun masih di bawah target tahun 2021 (5,20 persen). Laju Pertumbuhan ini dicerminkan dari produksi perikanan yang meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Subsektor Perikanan tumbuh dengan baik walaupun dalam masa pandemi COVID19. Lain halnya dengan Subsektor Peternakan, laju pertumbuhannya menjadi negatif atau turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sebesar 5,78 persen menjadi -0,37 persen pada tahun 2021. Hal ini terlihat dari faktor-faktor penyusun PDRB Subsektor Peternakan yang terdapat penurunan, yaitu beberapa komoditas peternakan menurun populasi dan produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID19 baru terasa atau berdampak ke Subsektor Peternakan pada tahun 2021, dimana komoditas ternak merupakan tabungan bagi para peternak sehingga banyak yang dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu dimungkinkan sebagai akibat dampak proyek pembangunan strategis Nasional yang ada di Kabupaten Sumedang.

Berikutnya pada tabel point c merupakan IKU yang baru setelah dilakukan perubahan RPJMD / Rencana Strategis. Untuk urusan perikanan dengan Sasaran Strategis : Terwujudnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan dengan IKU-nya Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya yang terus meningkat dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Untuk perikanan disebabkan sudah makin bagusnya pengelolaan budidaya dan sudah ada hasil dari tangkapan Waduk Jatigede yang berkontribusi ke peningkatan produksi ikan konsumsi. Selain tangkapan dari Waduk Jatigede, juga terdapat tambahan tangkapan dari Perairan Umum Darat (PUD) lainnya, walaupun jumlahnya masih relatif kecil. Tangkapan di Waduk Jatigede juga didukung dengan penebaran benih ikan dari berbagai pihak sebagai bakalan untuk aktivitas penangkapan ikan. Selanjutnya pada

tahun 2022, IKU untuk urusan peternakan berubah, dari Laju Pertumbuhan Subsektor Peternakan menjadi Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan dan Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Menular Strategis. Persentase peningkatan produktivitas peternakan dicerminkan atau dihitung dari pertumbuhan populasi ternak dan produksi peternakan, sedangkan persentase wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis dihitung dari wilayah kecamatan yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis. Berdasarkan tabel point c tersebut, pada tahun 2022 kenaikan produktivitas peternakan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Artinya terdapat kenaikan populasi dan produksi peternakan dibanding tahun sebelumnya. Dimana tahun sebelumnya (tahun 2021) tercermin dari Laju Pertumbuhannya (Pertumbuhan PDRB Subsektor Peternakan) menjadi negatif Tahun 2021 (-0,37). Selanjutnya pada tahun 2021 merupakan puncak dari pandemi COVID19 dan dampaknya berpengaruh terhadap usaha peternakan. Sebagian besar populasi ternak yang ada merupakan tabungan bagi para peternak dan sebagian dijual untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu terdapat faktor lainnya diantaranya: harga produk peternakan di pasaran khususnya yang relatif kurang ekonomis mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan jumlah produksi menurun. Selain itu animo masyarakat untuk beternak semakin menurun karena faktor usia dan harga jual produknya kurang begitu sebanding dengan biaya produksi, seperti halnya dalam pemeliharaan sapi perah. Pada tahun 2022 ini, subsektor peternakan mulai bangkit lagi, dimana tahun sebelumnya sempat terpuruk akibat pandemi COVID19 atau kemungkinan dampak pembangunan proyek-proyek strategis nasional di Kabupaten Sumedang. Kondisi fluktuatifnya capaian perikanan dan peternakan merupakan gambaran masih rendahnya produktivitas perikanan dan peternakan di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan tabel pont c, yang merupakan IKU yang baru / berubah dari sebelumnya, yang berkenaan dengan adanya RPD Tahun 2023 – 2026 sebagai dasar Penyusunan Renstra Tahun 2023 – 2024. Dimana berdasarkan tabel tersebut IKU Dinas Perikanan dan Peternakan untuk Urusan Kelautan dan Perikanan adalah Peningkatan Produksi Perikanan yang dihitung atas Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya, dimana produksi perikanan

meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024, dan capaian produksi tahun 2024 melebihi 100 persen. Hal ini dikarenakan adanya upaya untuk pengembangan perikanan budidaya dan optimalisasi perikanan tangkap di beberapa waduk yang telah dibangun. Untuk Urusan Pertanian (Peternakan) IKU-nya adalah Peningkatan Produksi Peternakan (dihitung dari rata-rata peningkatan daging, telur dan susu) dan Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (dihitung dari wilayah kecamatan yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis). Untuk IKU Peningkatan Produksi Peternakan mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, yang disebabkan oleh adanya peningkatan di produksi daging khususnya daging ayam ras pedaging, produksi telur (adanya peningkatan produksi telur tetas), dan produksi susu susu. Hal ini adanya trend peningkatan populasi ayam pedaging, ayam petelur dan sapi perah. Khusus untuk sapi perah dikarenakan adanya upaya yang kuat untuk pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pada Tahun 2024, terdapat IKU tambahan untuk program penunjang, yaitu meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah dengan Indikator Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah (ZI\_PD) dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Berdasarkan Tabel 2.3.1 point d, nilai ZI dan nilai SAKIP adanya peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, walaupun untuk nilai ZI masih di bawah target yang ditentukan.

Selain itu, salah satu indikator capaian kinerja pelayanan, dicerminkan dengan hasil dari Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana terdapat IKK Outcome untuk Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu Jumlah Total Produksi Perikanan Kabupaten / Kota dengan rumus perhitungan :  $\text{Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota} / \text{Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan} \times 100\%$  dan untuk Urusan Pertanian (yang terkait dengan Fungsi Peternakan) adalah Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular dengan rumus perhitungan :  $((\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t)} - \text{Jumlah kejadian/kasus hewan menular tahun sebelumnya}) / (\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular$

tahun sebelumnya (t-1))) X 100%. Berdasarkan tabel point e tersebut di atas, terlihat capaian IKK untuk produksi perikanan (tangkap dan budidaya) di Kabupaten Sumedang dari tahun 2020 – 2024, terdapat penurunan capaian dari tahun 2020 ke tahun 2021, yaitu dari 102,83 menjadi hanya 97,98 persen, akan tetapi secara angka tonase, produksi perikanan ini meningkat. Namun bila dibandingkan dengan target yang ditentukan, persentase capaiannya mengalami penurunan. Selanjutnya mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, capaian IKK-nya terus mengalami peningkatan setiap tahun, walaupun capaiannya masih lebih kecil dibanding pada tahun 2020. Sedangkan untuk IKK Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular dari tahun 2020 – 2024, adalah pada tahun 2020 terjadi kasus Brucellosis pada sapi perah sebanyak 33 ekor, sedang tahun sebelumnya tidak ada kasus, sehingga angka perhitungan matematikanya menjadi tidak dapat dihitung karena pada tahun sebelumnya (2019) adalah 0 kasus, dimana setiap bilangan yang dibagi 0 menjadi tak hingga. Selanjutnya pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi kasus penyakit menular, sehingga terjadi penurunan sebanyak 100 persen. Pada tahun 2022 terjadi kasus penyakit hewan menular yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak ruminansia sebanyak 3.115 kasus, dimana tahun sebelumnya (2021) tidak ada kasus penyakit hewan menular, sehingga angka IKK-nya tidak hingga. Pada Tahun 2023, masih terjadi kasus PMK ditambah dengan kasus baru berupa Penyakit Lumphy Skin Desease (LSD) atau penyakit benjol-benjol (lato-lato) pada ternak sapi dan Avian Influenza (AI) / Flu Burung. Namun pada tahun 2023 jumlah kasus-kasus penyakit tersebut mengalami penurunan menjadi 1.157 kasus atau terjadi penurunan sebesar 62,86 persen. Penurunan kasus penyakit hewan menular (strategis) terus terjadi sampai dengan tahun 2024, yaitu menjadi 951 kasus atau terjadi penurunan sebesar 17,80 persen.

Selanjutnya terkait dengan indikator pelayanan yang telah dilaksanakan yang berupa Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), berdasarkan data Tabel 2.3.1 point e dan pada Grafik 2.3.1 dapat dilihat bahwa dari Tahun 2020 – 2024 rata-rata IKM Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebesar 80,79 point yang termasuk katagori Baik. Bila melihat trend peningkatannya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat trend peningkatan, dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal in i mungkin disebabkan pada tahun 2024,

jumlah responden mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya, dimana survei IKM ini sudah menggunakan barcode yang langsung dapat diakses oleh pengguna layanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan. Berkenaan dengan hasil IKM tersebut selanjutnya harus dibuat upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat perikanan dan peternakan di Kabupaten Sumedang.

#### Implikasi Strategis

1. Realisasi capaian kinerja IKU dari tahun 2020 – 2024 terdapat fluktuasi terutama pada tahun 2021 produktivitas peternakan mengalami peningkatan yang negatif (adanya penurunan dari tahun sebelumnya), pada tahun ini adalah tahun ke dua terjadinya Wabah COVID19. Wabah COVID19 memberikan dampak pada tahun ke dua, tahun pertama COVID19 kurang berpengaruh pada produktivitas peternakan. Untuk peningkatan produksi perikanan menunjukkan trend yang terus meningkat. Hal ini memberikan gambaran untuk dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode perencanaan berikutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan hewani masyarakat Kabupaten Sumedang, dimana untuk beberapa komoditas perikanan dan peternakan masih belum mencukupi dan harus didatangkan dari luar daerah. Selanjutnya selain untuk meningkatkan produksi pangan hewani tersebut, juga harus ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang inklusif, mendukung pengentasan kemiskinan, pengentasan stunting, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Realisasi capaian IKK Produksi Perikanan dari tahun 2020 ke tahun 2021 capaiannya menurun, dimungkinkan sebagai akibat adanya peningkatan produksi yang tidak optimal akibat faktor-faktor cuaca atau penentuan targetnya terlalu besar, karena angka tonase produksi perikanan terus meningkat, sedangkan untuk tahun 2022 ke tahun 2024 capaian produksi perikanan terus mengalami peningkatan persentase capaiannya. Sedangkan untuk Penurunan kasus penyakit hewan menular, pada tahun 2020 terjadi kasus baru berupa Penyakit Brucellosis pada sapi perah 33 kasus, dimana sebelumnya (2019) tidak ada kasus, dan tahun berikutnya (2021) tidak ada kasus. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi merebak

kasus PMK dan sedikit AI sebanyak 3.115 kasus. Namun pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini karena telah dilakukan upaya-upaya penanggulangan wabah dan upaya pencegahan dengan vaksinasi AI, PMK dan LSD.

3. Realisasi IKM yang meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dan adanya penurunan di tahun 2024, harus menjadi catatan untuk dilakukan pembenahan di aspek pelayanan kepada masyarakat perikanan dan peternakan agar terus ditingkatkan dan penerima pelayanan akan memperoleh kepuasan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai IKM pada tahun-tahun berikutnya.

#### **D. Kelompok Sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang**

Kelompok sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Sumedang yang terkait dengan fungsi perikanan dan peternakan, dalam hal ini tidak hanya masyarakat pembudidaya ikan, penangkap ikan, peternak, pemilik hewan, produsen pakan / bahan pakan, pengolah dan pemasar hasil perikanan dan peternakan, dan sebagainya, akan tetapi sebagai sasarannya yang lain adalah masyarakat sebagai pengguna, pemanfaat, atau yang berkaitan dengan hewan atau produk hewannya. Sasaran ini, baik perorangan maupun kelompok, yang memiliki kebutuhan atau berkaitan dengan perikanan dan peternakan. Kelompok sasaran ini meliputi berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan demografi yang beragam. Berikut ini daftar kelompok sasaran pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, sebagai berikut :

**Daftar Kelompok / Sasaran Pelayanan  
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang**

NO.	FUNGSI / KELOMPOK SASARAN	JENIS LAYANAN	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
<b>A. FUNGSI PETERNAKAN</b>				
1	Kelompok Peternakan	Pembinaan Teknis Peternakan, Pembinaan Teknis Ketembagaan Kelompok, dan Pelayanan Kesehatan Hewan	309	Data : SIMDATER
2	Kelompok Pengolahan Peternakan	Pembinaan Teknis Pengolahan, Pembinaan Teknis Pengolahan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	KWT Gemilang, Seriksa Hidayah, Simpay Tampomes, KWT Pentastik, KWT Harja Rahayu, KWT Mekar Sewerdi
3	Pedagang Bahan Pangan Asal Hewan (PAH)	Pembinaan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengujian Bahan Pangan	98	
4	Pedagang Ternak	Rekomendasi Pemasukkan / Pengeluaran Ternak, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	92	
5	Perusahaan Pembibitan Ternak (Breeding Farm)	Pengawasan, dan Rekomendasi Pemasukkan / Pengeluaran Bibit Grand Parent Stock (GPS) / Parent Stock (PS)	2	PT. Charoen Pokphand dan CV. Missori
6	Perusahaan Budi daya Peternakan	Pelayanan Kesehatan Hewan, IE	2	Naluk Farm, BMPP
7	Perusahaan Pengolah Pakan	Pengujian Sample Pakan	3	KSU Tandang Sari, Kurnia Feed, CV AK Tujuh Setu, Rajawali Farm
8	Koperasi Peternakan	Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan, dan Fasilitas Bahan Pakan Bersubsidi (Jagung)	2	KSU Tandang Sari (Sapi Perah) dan Koperasi Peternak Sumedang Raya (Ayam Petelur)
9	Tempat Pemotongan Hewan (TPH / TPU)	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	52	TPH 13, TPU 39
10	Perusahaan Pengolahan Pangan Asal Hewan (PAH)	Rekomendasi Pemasukkan Produk Asal Hewan (PAH) dan Rekomendasi untuk Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	4	PT Barry Callebaut, Garudafood, PT Goca Goca, Nabati
11	Perusahaan Pengolahan Bahan Non Pangan Asal Hewan (Non PAH)	Rekomendasi Pemasukkan Produk Asal Hewan (PAH) Non Pangan dan Rekomendasi untuk Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	2	PT Adira, PT Kahater
12	Asosiasi Peternakan	Pembinaan Teknis Peternakan, Pelayanan Kesehatan Hewan dan Rekomendasi (SKKH)	2	Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Asosiasi Ayam Ras Sumedang (ARAS)
13	Kelompok Pembudidaya Hijauan Pakan Ternak	Pembinaan Teknis Budi daya Hijauan Pakan Ternak (HPT)	8	
<b>B. FUNGSI PERIKANAN</b>				
1	Kelompok Pembudidaya Ikan	Pembinaan Teknis Budi daya, Pengujian Kualitas Air, dan Peningkatan Kapasitas Pembudidaya	234	Sebanyak 1.801 orang pelaku usaha
2	Kelompok Pembenhitan Rakyat (UPR)	Pembinaan Teknis Budi daya Pembenhitan, Pengujian Kualitas Air, dan Peningkatan Kapasitas Pembudidaya	117	Sebanyak 444 pelaku usaha pembenhitan
3	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Pengolahan, Fasilitas Sarana dan Pendampingan Perizinan	30	Sebanyak 300 pelaku usaha tergabung dalam kelompok, dan 125 pelaku usaha tidak tergabung dalam kelompok
4	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan	Pembinaan Pengawasan, Fasilitas Sarana	6	Sebanyak 82 anggota
5	Kelompok Nelayan	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas, Fasilitas Sarana	25	Di Perairan Waduk Jatigede, Sadawarna dan Cipanas
6	Pemasar Ikan / olahan	Pembinaan, Pendampingan Perizinan Usaha, dan Fasilitas Sarana	507	pelaku usaha perorangan
7	Kelompok Pembudidaya Ikan Hias	Pembinaan Teknis Budi daya, Pengujian Kualitas Air, dan Peningkatan Kapasitas Pembudidaya	8	Kelompok
8	Asosiasi Perikanan	Pembinaan Teknis, Pengujian Kualitas Air, Peningkatan Kapasitas pembudidaya	4	Asosiasi

Berdasarkan tabel tersebut, sasaran pelayanan dan jenis pelayanan untuk Fungsi Peternakan dan Fungsi Perikanan telah dilaksanakan kepada berbagai kalangan masyarakat yang terkait dengan urusan peternakan dan perikanan, baik yang sifatnya perorangan, kelompok, maupun bentuk perusahaan / koperasi. Keberadaan Dinas Perikanan dan Peternakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ini di tingkat lapangan terdapat unit-unit kerja (UPTD Perikanan dan Peternakan, UPTD Pasar Hewan, UPTD Balai Benih Ikan, dan UPTD

Rumah Potong Hewan) yang langsung dapat melakukan pelayanan, seperti kesehatan hewan, inseminasi buatan, pembinaan teknis, dan pelayanan lainnya.

Kualitas pelayanan yang diberikan akan sangat tergantung kepada ketersediaan sarana dan prasarana, personil, dan penguasaan / kompetensi terhadap jenis pelayanan yang diberikan. Untuk itu, hal-hal tersebut harus secara terus-menerus dikembangkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dan tidak tertutup kemungkinan ke depan jenis-jenis pelayanan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi yang semakin berkembang.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, dalam realitanya harus ada kerjasama atau mitra dalam pelayanan tersebut. Mitra yang terlibat mendukung pelayanan tersebut diantaranya adalah unit kerja kewilayahan (Desa/Kecamatan), Perangkat Daerah, Perangkat/Unit Kerja lainnya (Provinsi dan Pusat), dan mitra kerja di luar pemerintahan. Unit-unit kerja ini turut membantu dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dan sebaliknya Dinas Perikanan dan Peternakan juga ikut serta mendukung membantu pelayanan unit kerja lainnya. Berikut ini ditampilkan tabel mitra kerja yang turut membantu pelayanan sebagai berikut :

**Tabel Mitra Kerja dan Jenis Dukungan  
terhadap Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan**

NO.	MITRA KERJA	JENIS DUKUNGAN KEPADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	JENIS DUKUNGAN DARI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>Unit Kewilayahan</b>			
a.	Pemerintahan Desa / Kelurahan	Koordinasi Penyiapan Sasaran Kelompok / Peternak / Pelaku Usaha Perikanan, Pengukuhan Kelompok, dan Pengawasan Penerima Bantuan	Bantuan Sarana / Prasaran Perikanan dan Peternakan, Pelayanan Peternakan dan Perikanan untuk Masyarakat	
b.	Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Penyiapan Sasaran Kelompok / Peternak / Pelaku Usaha Perikanan, Pengukuhan Kelompok, dan Pengawasan Penerima Bantuan	Bantuan Sarana / Prasaran Perikanan dan Peternakan, Pelayanan Peternakan dan Perikanan untuk Masyarakat	
<b>2.</b>	<b>Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang</b>			
a.	BAPPPEDA	Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan	Data dan Informasi untuk Penyusunan Perencanaan / Usulan Program / Kegiatan	
b.	Setda	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perikanan dan Peternakan	Data dan Informasi untuk Penyusunan dan Koordinasi Kegiatan	
c.	Inspektorat Daerah	Reviu / Evaluasi Program Kegiatan	Data dan Informasi untuk Penyusunan Reviu dan Evaluasi Kegiatan	
d.	BKPSDM	Penempatan, dan Peningkatan SDM Pelayanan Perikanan dan Peternakan	Data dan Informasi / Usulan Kebutuhan dan Peningkatan SDM Perikanan dan Peternakan	
e.	BKAD	Penganggaran Program / Kegiatan Perikanan dan Peternakan	Data dan Informasi Kebutuhan Anggaran Program / Kegiatan Perikanan dan Peternakan	
f.	BAPENDA	Perencanaan Retribusi Perikanan dan Peternakan, Rancangan Perda Retribusi	Data dan Informasi Usulan / Potensi Pendapatan Daerah / Objek Retribusi, dan Pemungutan Retribusi Perikanan dan Peternakan	

NO.	MITRA KERJA	JENIS DUKUNGAN KEPADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	JENIS DUKUNGAN DARI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	KETERANGAN
e.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penyuluhan Pertanian (Peternakan) terhadap Kelompok Peternak, Pengelolaan Kelembagaan Kelompok Tani Ternak (Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian), Data Luas Panen untuk Perhitungan Produksi Bahan Pakan / Limbah Pertanian untuk Pakan Ternak, Perhitungan Pupuk Subsidi untuk Kebutuhan Peternakan dan Perikanan, Data Konsumsi Pangan untuk Perhitungan Kebutuhan Pangan Asal Hewan, Pelaksanaan OPM Bahan Pangan, dan Pemasokan Pupuk Organik	Bantuan Teknis Peternakan dalam Pengadaan Ternak untuk Unit Pengolah Pupuk Organik, Data dan Informasi Produksi Pangan Asal Hewan untuk Kecukupan Pangan, Data dan Informasi Program dan Kegiatan untuk Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, dan gram Bersama dalam Integrated Farming.	
f.	Dinas Koperasi UKM PP	Data Harga Komoditas Perikanan dan Peternakan di Tingkat Pedagang / Pengecer, Operasi Pasar Bahan Pangan (Komoditas Peternakan / Perikanan), Pembinaan UMKM Berbasis Perikanan dan Peternakan, Penyediaan UMKM Centre, dan Perdagangan untuk Bahan-bahan / Komoditas Peternakan dan Perikanan (pupuk, pakan, bahan pakan, dan lain-lain)	Data dan Informasi Harga dan Produksi Komoditas Perikanan dan Peternakan di Tingkat Produsen, dan Data dan Informasi UMKM Perikanan dan Peternakan	
g.	DPMPTSP	Fasilitasi Kegiatan Promosi Investasi untuk Perikanan dan Peternakan, dan Perijinan Usaha Peternakan	Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk Perizinan Usaha / Kegiatan Peternakan dan	
h.	DPUPR	Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Konstruksi / Bangunan Perikanan dan Peternakan	Data Teknis Bangunan Perikanan dan Peternakan	
i.	DLHK	Pengelolaan Limbah Perikanan dan Peternakan	Data dan Informasi Kawasan Peternakan di Sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS)	

NO.	MITRA KERJA	JENIS DUKUNGAN KEPADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	JENIS DUKUNGAN DARI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	KETERANGAN
j.	Disparbudpora	Pembinaan Kegiatan Budaya yang Berbasis Komoditas Perikanan dan Peternakan (Ketangkasan Domba, Kuda Renggong, dll), Pembinaan Pemuda / Kaum Milenial untuk Usaha Perikanan dan Peternakan (Petani Milenial), dan Pembinaan Ekonomi Kreatif yang Berbahan Baku Bahan Asal Hewan Non Pangan.	Pelayanan Teknis Peternakan kepada Para Pemilik Ternak untuk Tujuan Even Budaya (Kuda Renggong, Ketangkasan Domba), Data dan Informasi Petani Milenial (Perikanan dan Peternakan).	
k.	Dinas Sosial	Data dan Informasi Keluarga Miskin untuk Program Pengentasan Kemiskinan	Fasilitasi Bantuan untuk Program Pengentasan Kemiskinan, Pelayanan Teknis Perikanan dan Peternakan untuk Program KUBE	
l.	Disakertrans	Pelatihan Peternak / Pembudidaya / Pengolah Ikan di BLK	Data dan Informasi Kebutuhan Pelatihan Perikanan / Peternakan, Narasumber Teknis Perikanan dan Peternakan	
m.	Disdukcapil	Data Kependudukan	Data dan Informasi Kependudukan yang Diperlukan	
n.	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Perizinan Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan, Data dan Informasi Stunting, Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Akibat Hewan	Fasilitasi Bantuan Bahan Pangan untuk Program Pencegahan Stunting dan Observasi / Penanganan Hewan Penyebar Penyakit Zoonosis	
o.	Satpol PP	Pengamanan / Penertiban Peraturan terkait usaha Perikanan / peternakan	Data dan Informasi Perusahaan Perikanan / Peternakan	
p.	BPBD	Koordinasi dan Fasilitasi Penerbitan Pernyataan Kejadian Wabah Bencana Akibat Penyakit Hewan	Koordinasi Kejadian Wabah Bencana Akibat Penyakit Hewan	
q.	Diskominfoanditik	Penyusunan Data Perikanan dan Peternakan dan Bantuan Penyusunan Aplikasi Berbasis Data Perikanan dan Peternakan	Data dan Informasi Perikanan dan Peternakan untuk Penyusunan Data	
e.	Dinas Perhubungan	Fasilitasi Keselamatan Pelayaran di Perairan Waduk	Data dan Informasi Penangkap Ikan di Perairan Waduk	

NO.	MITRA KERJA	JENIS DUKUNGAN KEPADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	JENIS DUKUNGAN DARI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	KETERANGAN
3.	Instansi Vertikal di dan Luar Kabupaten Sumedang			
a.	Badan Pusat Statistik	Data Perikanan dan Peternakan, PDRB, NTP, dll	Data Perikanan dan Peternakan untuk Perhitungan Data	
b.	Polres	Pembinaan Hukum kepada para peternak penerima bantuan, bantuan Kamtibmas dan Ketahanan Pangan untuk kelompok perikanan dan peternakan, pengawasan / pembinaan pemotongan betina produktif, dan pembinaan / pengawasan keselamatan penangkapan ikan di Perairan Waduk	Data dan Informasi Perikanan dan Peternakan	
c.	Kodim	Bantuan Kamtibmas, Teritorial dan Ketahanan Pangan untuk Kelompok Perikanan dan Peternakan	Data dan Informasi Perikanan dan Peternakan	
d.	Kejaksaan Negeri	Pembinaan Hukum kepada para peternak penerima bantuan	Data dan Informasi Perikanan dan Peternakan	
e.	Balai Veteriner Subang (Kementan)	Surveilans Penyakit Hewan, Pengujian Penyakit Hewan, dan Fasilitas Bantuan Ternak	Rekomendasi Kelompok yang akan mendapat bantuan Ternak dari Pusat, Membantu melakukan Pengambilan Sample Surveilans Penyakit Hewan dan pengujian Penyakit Hewan	
f.	Balai Inseminasi Buatan (IB) Lembang (Kementan)	Penyediaan Semen Beku untuk IB, Fasilitas Peningkatan SDM IB, Narasumber dan Fasilitas Bantuan Ternak dari Pusat	Fasilitas Tempat dan Mentor untuk Peserta Bimtek IB, dan Rekomendasi Kelompok Penerima Bantuan Ternak dari Pusat	
g.	Balai Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan (BPPKH) Cisagara (Kementan)	Fasilitas Pelatihan Petugas Teknis Peternakan, Narasumber	Data dan Informasi Kebutuhan Pelatihan Teknis Peternakan	
h.	BBWS Wilayah Cirebon (Kemen PU)	Fasilitas dan Koordinasi Pemanfaatan Perairan Waduk, Bantuan Pengamanan Aset yang berbatasan dengan Aliran Sungai	Data dan Informasi Kebutuhan Pemanfaatan Perairan Waduk	
i.	Kantor Kementerian Agama Sumedang	Data dan Informasi Jumlah Pemotongan Hewan Qurban	Pemeriksaan Hewan Qurban	

NO.	MITRA KERJA	JENIS DUKUNGAN KEPADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	JENIS DUKUNGAN DARI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	KETERANGAN
j.	Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Cirebon	Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Data dan Informasi Sumber Daya Perikanan	
k.	Balai Karantina Perikanan Wilayah Cirebon	Pengujian Penyakit Ikan, Sampel Ikan, dan Pembinaan Kesehatan Ikan	Data dan Informasi Perikanan	
l.	Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Sukabumi	Bantuan Bibit / Benih Ikan Air Tawar, Narasumber	Data dan Informasi Perikanan	
m.	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Karawang	Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan	Data dan Informasi Perikanan	
<b>4. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</b>				
a.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Koordinasi Pembangunan Peternakan, Bantuan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Sarananya, Pengujian Sampel Bahan Pangan Asal Hewan dan Penyakit Hewan, Sampel Pakan, Narasumber Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kontes Ternak.	Data dan Informasi Peternakan, Fasilitasi Rekomendasi Kelompok Sasaran Bantuan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Sampel Pakan untuk Pengujian, Sampel untuk Pengujian Penyakit, Data Rencana Pembangunan Peternakan, Rekomendasi Pengeluaran / Pemasukan Bibit / Benih Ternak Bahan Pangan Asal Hewan, Bahan Non Pangan Asal Hewan, dan NKV.	
b.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinasi Pembangunan Perikanan, Bantuan Perikanan, Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan	Data dan Informasi Perikanan, Rencana Pembangunan Perikanan	
c.	BAPPEDA	Koordinasi Rencana Pembangunan Perikanan dan Peternakan	Data dan Informasi Perikanan dan Peternakan, Rencana Pembangunan Perikanan dan Peternakan	
<b>6. Kementerian / LPNK</b>				
a.	Kementerian Pertanian	Koordinasi Pembangunan Peternakan, Bantuan Sarana Peternakan	Data dan Informasi Peternakan, Rencana Pembangunan Peternakan	
b.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Koordinasi Pembangunan Perikanan, Bantuan Sarana Perikanan, dan Penyaluhan Perikanan	Data dan Informasi Perikanan, Rencana Pembangunan Perikanan	

NO.	MITRA KERJA	JENIS DUKUNGAN KEPADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	JENIS DUKUNGAN DARI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	KETERANGAN
c.	BRIN	Pengembangan Komoditas Ikan Lokal, Kajian Zonasi Perairan Waduk Jatigede	Fasilitasi Pengembangan Komoditas Ikan Lokal, Kajian Zonasi Waduk Jatigede	
<b>7. Perguruan Tinggi</b>				
a.	Fak. Peternakan UNPAD	Peningkatan Kapasitas Peternak, Pengembangan Komoditas Peternakan	Fasilitasi Pelaksanaan KKN Mahasiswa, Fasilitasi Penelitian	
b.	Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD	Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan, Pengembangan Komoditas Perikanan	Fasilitasi Pelaksanaan KKN Mahasiswa, Fasilitasi Penelitian	
c.	Fak. Kedokteran UNPAI	Rencana Pembangunan Rumah Sakit Hewan UNPAD	Rekomendasi Teknis Pendirian Rumah Sakit Hewan UNPAD	
d.	FKH IPB University	Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Mahasiswa co-As	Fasilitasi Mahasiswa co-As	
<b>8. Non Pemerintahan / Asosiasi / Koperasi</b>				
a.	Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandang Sari	Pengembangan Komoditas Sapi Perah dan Produknya, Pelayanan Teknis Peternakan	Bantuan Sarana Peternakan dan Pelayanan Teknis Peternakan	Sapi Perah
b.	Koperasi Peternak Sumedang Raya	Pengembangan Komoditas Ayam Ras Petelur	Pelayanan Kesehatan Hewan, Fasilitasi Bahan Pakan Subsidi	Ayam Petelur
c.	Himpunan Peternak Domba / Kambing Indonesia (HPDKI)	Pengembangan Komoditas Domba dan Kambing	Pelayanan Kesehatan Hewan dan Fasilitasi Even	
d.	Asosiasi Ayam Ras Sumedang (ARAS)	Pengembangan Komoditas Ayam Ras Pedaging	Pelayanan Kesehatan Hewan, Fasilitasi Kemitraan	
e.	Asosiasi Perikanan Sumedang	Pengembangan Perikanan	Pelayanan Teknis Perikanan	
f.	MUI	Narasumber Pemotongan Hewan Halal	Teknis Pemotongan Ternak	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa dalam pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dan Peternakan banyak melibatkan mitra kerja, baik yang masuk katagori pemerintah maupun dari non pemerintah yang berperan mendukung pencapaian pelayanan dan tugas serta fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing mitra kerja, yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Mitra Kerja Kewilayahan yang terdiri dari Unsur Pemerintahan Desa / Kelurahan dan Pemerintahan Kecamatan;
2. Mitra Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.
3. Mitra Kerja Instansi Vertikal yang ada di Daerah maupun di Luar Daerah;
4. Mitra Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Mitra Kerja Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
6. Mitra Kerja Perguruan Tinggi; dan

7. Mitra Kerja dari Non Pemerintahan, Asosiasi, dan Koperasi yang terkait dengan Fungsi Perikanan dan Peternakan.

Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan di Dinas Perikanan dan Peternakan, sebagai implikasinya memperoleh kewajiban untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah (PAD) sesuai ketentuan yang berlaku. PAD ini merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai pembangunan di Daerah. Retribusi yang dipungut kepada objek retribusi adalah sebagai implikasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Sebagai dasar pemungutan retribusi tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut ini ditampilkan Sasaran Retribusi, Target, dan Realisasi Retribusi Tahun 2023 – 2025 pada Dinas Perikanan dan Peternakan, sebagai berikut :

**Tabel Sasaran, Target, dan Realisasi Retribusi  
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang  
Tahun 2023 – 2025**

NO.	URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2024				Tahun 2025 (31 Agustus 2025)			Keterangan
		Target (Perubahan)	Realisasi	%	Target Murni	Target Perubahan	Realisasi (Rp)	Persen	Target	Realisasi	Persen	
1	PASAR HEWAN (RETRIBUSI PELATARAN PASAR HEWAN)	15.278.546	14.330.000	93,79	15.046.000	15.046.000	15.046.000	100,00	15.046.000	9.067.000	60,26	
2	RUMAH POTONG HEWAN	30.479.000	30.479.000	100,00	60.000.000	-	-	-	-	-	-	Dihapus (belum ada RPH)
3	BALAI BENIH IKAN (PENJUALAN BENIH / BIBIT IKAN)	26.400.000	26.400.000	100,00	27.703.000	27.703.000	27.703.000	100,00	29.860.000	19.250.000	64,47	
4	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANGAN)	-	-	-	100.000.000	70.520.000	76.730.000	108,81	80.520.000	51.860.000	64,41	
5	PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT)	-	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00	100.000.000	49.800.000	49,80	
<b>JUMLAH</b>		<b>72.157.546</b>	<b>71.209.000</b>	<b>98,69</b>	<b>302.749.000</b>	<b>213.269.000</b>	<b>219.479.000</b>	<b>102,91</b>	<b>225.426.000</b>	<b>129.977.000</b>	<b>57,66</b>	
Kenalkan Target 2023 ke 2024 :					100%	Kenalkan Target dari 2024 ke 2025 :					5,70%	

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan target retribusi dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 196 persen, dan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 5,70 persen. Kenaikkan target ini adalah dengan adanya penambahan objek retribusi pada tahun 2025. Pada tahun 2023 dan sebelumnya, objek retribusi hanya berasal dari Pasar Hewan, Pemotongan Hewan di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) milik masyarakat yang berasal dari pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, dan penjualan benih ikan di Balai Benih Ikan. Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, objek retribusi menjadi bertambah, yaitu Pemakaian Pelataran Pasar Hewan, Penjualan Benih Ikan, Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pelayanan Kesehatan Hewan (pemakaian ruangan) dan Pelayanan Inseminasi Buatan (penggunaan alat). Namun khusus untuk Retribusi RPH tidak dilaksanakan karena sampai saat ini Kabupaten Sumedang belum mempunyai RPH pemerintah. Sedangkan realisasi target retribusi tahun 2023 sebesar 98,69 persen, tahun 2024 sebesar 102,91 persen, dan tahun 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 baru tercapai 57,66 persen.

Berkenaan dengan adanya retribusi tersebut masih terdapat beberapa potensi untuk peningkatan retribusi ke depan, baik dengan optimalisasi retribusi yang sudah ada dan dilaksanakan, dan menggali potensi-potensi sumber-sumber PAD yang ada sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa potensi sumber PAD ke depan adalah dengan Pembangunan RPH, Pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI), dan Pembangunan Klinik Hewan.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan**

Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan Daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dan fungsinya yang efektif, efisien, dan berkeadilan kepada masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan, baik Program urusan penunjang, Program urusan kelautan dan perikanan, dan Program di urusan pertanian, dalam hal ini peternakan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi capaian kinerja dari masing-masing program tersebut, yang

selanjutnya akan mempengaruhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan.

Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah, komposisi, kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia, sarana prasarana, tetapi juga mencakup aspek pemerataan akses, kecepatan respons, dan keberlanjutan inovasi layanan. Di tengah dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, nasional, maupun regional, Dinas Perikanan dan Peternakan dituntut mampu mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, arah fokus perbaikan ke depan akan mengerucut pada peningkatan kualitas pelayanan yang inklusif dan peningkatan kinerja, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat secara setara, cepat, dan profesional. Fokus inilah yang akan menjadi isu strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang pada periode perencanaan 2025–2029.

#### **A. Permasalahan Dinas Perikanan dan Peternakan**

Dalam upaya mewujudkan pelayanan dan capaian kinerja yang berkualitas dan inklusif, Dinas Perikanan dan Peternakan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan strategis selama periode perencanaan 2025–2029. Permasalahan ini merupakan hasil identifikasi dari berbagai sumber, termasuk evaluasi capaian kinerja, penilaian indeks kepuasan masyarakat, serta analisis terhadap isu strategis baik dari aspek lokal maupun nasional dan global.

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi di Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai tugas dan fungsinya serta urusan yang diemban adalah sebagai berikut:

##### **1. Belum Optimalnya Peningkatan Produksi Perikanan**

Masalah pokok yang dihadapi dalam urusan perikanan di Daerah adalah belum optimalnya peningkatan produksi perikanan. peningkatan produksi perikanan, dalam hal ini produksi ikan konsumsi air tawar yang berasal dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang. Beberapa komoditas ikan konsumsi air tawar masih ada yang didatangkan dari luar Daerah.

Berdasarkan masalah pokok tersebut di atas, selanjutnya permasalahan urusan perikanan di Daerah adalah :

a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan.

Bila melihat potensi perikanan di Daerah, adalah cukup besar, sebagai berikut :

- 1) Potensi Perikanan Budidaya : Kolam Air Tenang (KAT) seluas 698 hektar, Potensi Kolam Air Deras (KAD) sebanyak 144 unit, dan Potensi Mina Padi seluas 9.737 hektar.
- 2) Potensi Perikanan Tangkap : Panjang Sungai 524 km dan Waduk seluas : 5.000 hektar.

Namun demikian, potensi yang ada tersebut belum bisa meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk dijual ke luar Daerah. Produksi perikanan tangkap dan budidaya di Daerah pada tahun 2024 hanya sebesar 10.568,34 ton. Bila melihat tingkat konsumsi ikan di Daerah pada tahun 2024 sebesar baru mencapai 17,23 kg/kapita/tahun, dan jumlah penduduk sebanyak 1.226.660 orang maka kebutuhan ikan sebesar 21.135,35 ton per tahun, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 10.567,01 ton. Kekurangan ini dapat dipenuhi dari ikan yang didatangkan dari luar Daerah, baik ikan air tawar segar, ikan laut segar, maupun ikan olahan. Hal ini menjadi tantangan dan peluang untuk meningkatkan produksi perikanan air tawar dari budidaya maupun penangkapan dengan adanya beberapa bendungan yang sudah dibangun di Daerah.

Hal yang menjadi akar masalah untuk permasalahan belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan.
- 2) Penggunaan pakan yang tidak tepat.
- 3) Masih rendahnya Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Perikanan terutama untuk Kelompok Perikanan.
- 4) Belum adanya pusat atau sentra produksi perikanan dan pengolahan, dan belum terpetakannya potensi antar wilayah.

- 5) Perubahan iklim dan cuaca.
- 6) Belum optimalnya penerapan teknologi perikanan.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan potensi perairan umum daratan (PUD).
- 8) Belum adanya orientasi bisnis dalam usaha budidaya, penangkapan, dan pengolahan perikanan.
- 9) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perikanan.
- 10) Belum optimalnya kelembagaan perikanan.
- 11) Rendahnya kualitas benih ikan.

b. Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah.

Ikan merupakan bahan pangan asal hewan yang bergizi yang memegang peranan penting untuk kualitas kesehatan manusia, terutama untuk anak-anak sangat berkaitan dalam kecerdasan anak. Namun demikian Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024 baru sekitar 17,23 kg/kapita/tahun. Bila dibandingkan dengan angka Nasional, Tingkat Konsumsi Ikan sudah mencapai 58,91 kg/kapita/tahun pada tahun 2024, dan Jawa Barat sudah mencapai mencapai 37,01 kg/kapita/tahun pada tahun 2023. Hal ini menjadi tantangan untuk Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan konsumsi ikan.

Akar masalah yang menyebabkan tingkat konsumsi ikan di Daerah adalah terdapatnya beberapa masyarakat yang tidak menyukai konsumsi ikan utuh, sehingga diperlukan upaya diversifikasi olahan perikanan dan Optimalisasi Gerakan Makan Ikan (Gemarikan).

c. Pasar yang tidak efisien.

Pasar merupakan salah satu rantai penting dalam pemasaran suatu produk perikanan. Pasar tidak hanya berarti fisik tempat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai suatu sistem pada penjualan suatu produk perikanan. Di Daerah belum mempunyai pasar khusus untuk produk perikanan baik ikan konsumsi maupun olahan perikanan. Selain itu pasar produk perikanan masih dilakukan pemasaran secara tradisional, di

tempat tertentu yang memungkinkan untuk melakukan penjualan. Saat ini di Daerah sudah ada beberapa bendungan yang potensial untuk produksi perikanan tangkap. Ini menjadi tantangan ke depan, Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana pendaratan / pengumpulan ikan hasil tangkapan berupa Tempat Pendaratan Ikan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal ini untuk mengetahui jumlah dan jenis ikan hasil tangkapan, dan juga harga yang dijual oleh para nelayan.

Kondisi yang terjadi saat ini, para pembudidaya dan penangkap ikan (nelayan) kurang akses ke pasar, sehingga tidak mengetahui harga yang berlaku di pasar serta harga banyak ditentukan oleh para bandar / pemodal.

Beberapa akar masalah terhadap Pasar yang tidak efisien adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya akses ke pasar.
- 2) Harga yang tidak stabil.

## **2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Peternakan dalam Mendukung Peningkatan Populasi, Produksi Sumber Protein Hewani serta Peningkatan Nilai Tambah**

Masalah pokok yang dihadapi dalam urusan peternakan adalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya peternakan dalam mendukung peningkatan populasi, produksi sumber protein hewani serta peningkatan nilai tambah. Pengelolaan sumber daya peternakan yang ada belum dapat mendukung peningkatan populasi ternak. Populasi ternak ini sangat mendukung untuk pemenuhan produksi peternakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dari ternak untuk masyarakat khususnya di Daerah. Selain itu, dari peningkatan populasi yang ada dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk peternakan, baik ternak hidup maupun hasil produksi peternakan berupa daging, telur dan susu. Selanjutnya dari produk peternakan tersebut, dapat ditingkatkan lagi nilai tambahnya dengan pengolahan lebih lanjut menjadi bahan pangan maupun non pangan dengan bahan dasar produk peternakan.

Sumber Daya Peternakan yang dimiliki Kabupaten Sumedang cukup potensi bila dikelola dengan baik, yang meliputi sumber

daya manusia peternak, bibit ternak, bahan baku pakan, lahan, sumber air, dan teknologi yang ada, dimana di Daerah sudah terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang dapat mendukung pengembangan peternakan di Kabupaten Sumedang. Namun demikian sumber daya peternakan tersebut belum dapat dikelola dengan optimal untuk mendukung peningkatan populasi, penyediaan kebutuhan protein hewani dan nilai tambah.

Berdasarkan masalah pokok belum optimalnya pengelolaan sumber daya peternakan dalam mendukung peningkatan populasi, produksi sumber protein hewani serta peningkatan nilai tambah, yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut:

a. Pasar yang tidak efisien

Pasar merupakan salah satu rantai penting dalam pemasaran suatu produk peternakan. Pasar tidak hanya berarti fisik tempat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai suatu sistem pada penjualan suatu produk peternakan. Di Daerah sudah dimiliki Pasar Hewan yang menjual komoditas ternak hidup seperti Sapi, dan Domba, kadang-kadang terdapat kerbau dan kambing. Ternak yang dipasarkan adalah milik para peternak yang ada di Daerah dan sekitarnya. Para pembeli ternaknya berasal dari Daerah maupun pembeli dari luar Daerah.

Secara umum para peternak kurang memperoleh akses pasar sehingga harga yang berlaku tidak diketahui oleh para peternak. Harga yang berlaku banyak ditentukan oleh para bandar/makelar saja. Peternak berada di posisi tawar yang lemah.

Akar masalah dari Pasar yang tidak efisien adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya akses ke pasar;
- 2) Harga yang tidak stabil.

b. Persaingan yang tidak sehat

Dalam usaha peternakan, persaingan tentunya pasti ada antara unit-unit usaha yang ada di masyarakat. Di satu sisi persaingan bila dilihat dari sisi positif akan menimbulkan motivasi usaha akan menjadi berkembang dan efisien, dalam hal

bila terjadi persaingan yang sehat. Namun kenyataannya sering terjadi persaingan yang tidak sehat di antara para pelaku usaha peternakan. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan di antara sesama pelaku. Sebagian pelaku usaha yang kuat akan menurunkan pelaku usaha yang lain. Pelaku usaha yang lemah akan sangat tergantung kepada pelaku usaha yang kuat. Biasanya harga yang ada di peternak kecil akan sangat ditentukan oleh pelaku usaha yang besar. Keadaan ini ke depan harus menjadi perhatian, agar posisi para pelaku usaha kecil / peternak kecil, posisinya semakin kuat dengan penataan kelembagaan peternak yang ada dari kelompok kecil untuk bersatu dengan membentuk korporasi dari kelompok peternak kecil. Selanjutnya struktur pasar yang ada harus dibuat supaya para peternak kecil juga dapat memperoleh keuntungan yang setimpal dengan pengorbanan mereka.

Beberapa akar masalah yang menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat adalah sebagai berikut :

- 1) Struktur pasar yang tidak sehat;
- 2) Belum optimalnya kelembagaan peternakan

c. Kurangnya akses teknologi modern

Teknologi merupakan salah satu upaya dalam peningkatan keberhasilan budidaya peternakan. Kehadiran teknologi yang tepat dapat menciptakan kemudahan pengelolaan dalam aspek teknis maupun penunjangnya dalam suatu usaha peternakan. Hal ini akan berdampak terhadap efisiensi usaha maupun produktifitas suatu usaha peternakan.

Para peternak yang ada di Daerah, saat ini masih didominasi oleh kaum yang sudah tua, yang secara kemampuan akses dan penyerapan teknologi dapat dikatakan rendah. Minat kaum muda yang notabene melek teknologi dan aksesnya mudah, tapi masih sangat kecil minat mereka untuk terjun di usaha peternakan, karena dirasa usaha yang kotor, lama, banyak risiko. Kaum muda akan memilih usaha peternak yang cepat menghasilkan, bergensi/tidak kotor, dan sedikit risiko. Kaum muda lebih cenderung usaha di hulu seperti pakan, dan peralatan, mesin, dan penunjang lainnya, dan yang di hilir di

pemasaran dan pengolahan, atau pun kalau di budidaya akan mengambil yang cepat menghasilkan, menggunakan teknologi informasi, dan bergengsi seperti di ternak/hewan hias/kesayangan.

Untuk itu diperlukan upaya untuk dapat memberikan kemudahan akses teknologi bagi para peternak / pelaku usaha peternakan. Teknologi yang diperkenalkan harus yang mudah dipahami dan diterapkan oleh para peternak atau ada upaya pendampingan terhadap mereka oleh petugas lapangan / penyuluh pertanian, perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendamping non pemerintah.

Beberapa akar masalah yang menyebabkan kurangnya akses teknologi modern adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya keterampilan dan sumber daya manusia (SDM) peternak terhadap teknologi dan inovasi.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi usaha peternakan.

#### d. Rendahnya produksi peternakan

Produksi peternakan merupakan tujuan yang akan diperoleh dari usaha budidaya peternakan. Produksi peternakan dipengaruhi oleh faktor jumlah ternak yang dimiliki dan produktivitas ternak per ekor, dalam arti bahwa untuk meningkatkan produksi peternakan harus dilakukan dengan meningkatkan jumlah ternak yang ada dan produktivitas masing-masing ternaknya. Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor genetik ternak dan lingkungan. Faktor genetik adalah faktor yang diturunkan kepada keturunannya, sekitar 30 persen produksi ternak dipengaruhi oleh genetik ternak, seperti penggunaan bibit unggul. Faktor lingkungan mempengaruhi sekitar 70 persen produksi ternak. Faktor lingkungan ini terdiri dari pakan, kesehatan hewan, pengelolaan budidaya, dan lingkungan iklim. Potensi produksi yang baik dapat dimunculkan dengan pengelolaan faktor lingkungan yang optimal.

Produksi peternakan dapat berupa komoditas ternak hidup dan / atau berupa hasil dari ternak itu sendiri yang berupa daging (dengan pemotongan terlebih dahulu), telur (dari ternak

unggas), dan susu (dari ternak perah). Dari upaya yang telah dilakukan, populasi ternak di Daerah pada tahun 2024 adalah : sapi potong sebanyak 27.673 ekor, sapi perah sebanyak 4.299 ekor, kambing sebanyak 34.400 ekor, domba sebanyak 83.700 ekor, ayam buras sebanyak 538.510 ekor, ayam ras petelur sebanyak 712.498 ekor, ayam ras pedaging 3.501.900, dan itik sebanyak 71.585 ekor. Angka populasi ini diperoleh dari dinamika populasi ternak yang dipengaruhi oleh kelahiran, penetasan, pemasukan ternak hidup, kematian, dan pemotongan. Berdasarkan populasi yang ada ini maka diperoleh produksi utama peternakan daging, telur dan susu. Produksi daging tahun 2024 sebanyak 31.085,82 ton yang terdiri dari daging sapi 1.794,58 ton, daging kambing 51,26 ton, daging domba 429,07 ton, daging ayam buras 553,02 ton, daging ayam ras petelur 663,52, daging ayam ras pedaging 27.545,95 ton, dan daging itik 48,43 ton. Produksi telur tahun 2024 sebesar 9.962,78 ton yang terdiri dari telur ayam ras 8.147,84 ton, ayam buras 553,02 ton, dan itik 389,95 ton. Sedangkan produksi susu (sapi perah) 10.703,14 ton.

Menurut Badan Pangan Nasional Tahun 2021 pada Petunjuk Teknis Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2021, bahwa angka kebutuhan daging sapi dan kerbau adalah 2,66 kg/kapita/tahun, daging ayam ras 12,79 kg/kapita/tahun, dan telur ayam ras 18,16 kg/kapita/tahun. Sedangkan menurut Badan Pangan Dunia (FAO), bahwa kebutuhan susu ideal adalah 30 kg/kapita/tahun. Berdasarkan angka-angka kebutuhan tersebut maka dapat dihitung perkiraan kebutuhan produk peternakan setiap tahunnya. Bila jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 sebanyak 1.226.660 orang, maka kebutuhan daging sapi dan kerbau sebesar 3.262,92 ton per tahun, sementara produksi daging sapi tahun 2024 hanya sebesar 1.794,58 ton, maka masih kekurangan sebanyak 1.468,34 ton. Bila menurut Kementerian Pertanian Tahun 2023 pada Hasil Analisis Pengumpulan Data Produktivitas Ternak Sapi dan Kerbau bahwa rata-rata produksi daging per ekor ternak sapi lokal seberat 152,20 kg (0,1522 ton), berarti terdapat kekurangan

ternak potong (sapi) sekitar 9.647 ekor ternak sapi siap potong. Kekurangan tersebut dapat dipenuhi dari dengan adanya pemasukan daging segar/beku dari luar Daerah dan pemasukan ternak siap potong dari luar Daerah (biasanya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY).

Untuk kebutuhan daging ayam ras pada Tahun 2024, dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumedang tahun 2024 sebanyak 1.266.260 orang, maka dibutuhkan daging ayam ras sebanyak 16,195,47 ton, sehingga terdapat surplus produksi sebanyak 11.350,48 ton. Kelebihan ini dikeluarkan ke beberapa wilayah di sekitar Kabupaten Sumedang. Kebutuhan daging ayam ras ini juga dapat disubstitusi dari daging unggas lainnya seperti ayam buras dan itik.

Untuk telur ayam ras, dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 1.266.260 orang dibutuhkan sekitar 22.276,15 ton, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 14.128,31 ton. Kekurangan telur ayam ras ini sebagian dapat disubstitusi dari telur ayam buras, dan itik maupun puyuh. Namun demikian substitusi tersebut juga masih kurang, sehingga harus didatangkan dari luar daerah, biasanya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selanjutnya untuk kebutuhan susu, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.266.260 orang maka diperlukan sebanyak 3.799,8 ton, maka terdapat surplus sebesar 6.903,34 ton. Namun demikian, kebanyakan masyarakat tidak menyukai / tidak biasa meminum susu segar. Hal ini dapat disubstitusi oleh susu olahan (susu kental manis atau susu bubuk, dan olahan susu lainnya). Akan tetapi, kebutuhan susu secara Nasional masih terdapat kekurangan sekitar 70 persen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan produksi daging, telur, dan susu diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil ternak, terutama untuk daging sapi dan telur, untuk susu sapi peluang untuk memenuhi pasar nasional (Industri Pengolahan Susu / IPS).

Rendahnya produksi peternakan disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut :

- 1) Semakin berkurangnya lahan untuk budidaya peternakan dan sumber pakan sebagai akibat pembangunan proyek strategis nasional , pemukiman dan pembangunan lainnya.
- 2) Usaha budidaya peternakan sebagian besar masih merupakan usaha sampingan / belum berorientasi bisnis.
- 3) Masih kurangnya sarana pendukung usaha peternakan seperti pasar hewan, rumah potong hewan, sumber air peternakan, puskesmas/klinik hewan, pusat promosi, instalasi pembibitan, kawasan peternakan, dan sebagainya.
- 4) Harga pakan dan bahan baku pakan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh , dimana pakan merupakan komponen terbesar biaya produksi peternakan.
- 5) Masih adanya serangan wabah penyakit ternak.
- 6) Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana produksi peternakan.

e. Rendahnya nilai tambah produk peternakan

Tujuan dari usaha peternakan adalah diperolehnya produksi peternakan. Produksi peternakan akan lebih bernilai kalau nilai tambahnya meningkat. Hasil ternak yang diproduksi harus mempunyai nilai yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup peternaknya dan keberlangsungan usahanya. Selain itu, para pelaku usaha tidak hanya memasarkan ternak hidupnya saja atau produk mentahnya saja, tetapi juga dituntut untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Sederhananya, peningkatan nilai tambah dapat dilakukan dengan pengolahan terhadap produk-produk peternakan. Seperti pengolahan daging, telur dan susu. Saat ini, usaha pengolahan hasil peternakan belum berjalan optimal, masih terbatas kepada kalangan tertentu saja yang notabene buka peternak.

Saat ini, nilai tambah produk peternakan masih rendah disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kualitas pakan ternak.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- 3) Kurangnya manajemen peternakan yang baik.
- 4) Biaya produktivitas yang tinggi.

f. Pasar yang tidak efisien

Pasar merupakan tahap akhir dari suatu proses usaha peternakan, bila hasil produksinya tidak digunakan sendiri oleh para peternak. Hasil penjualan ternak atau produk ternak lainnya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan peternak dan melangsungkan usahanya. Keadaan saat ini, pasar produk peternakan masih tidak efisien dalam arti posisi peternak masih lemah. Harga yang ada masih banyak ditentukan oleh para tengkulak. Kadang-kadang, hasil yang diperoleh peternak kurang menguntungkan, bahkan terjadi kerugian kalau harga yang berlaku di pasaran turun drastis.

Terjadinya pasar yang tidak efisien disebabkan oleh beberapa akar masalah, sebagai berikut :

- 1) Kurangnya akses ke pasar.
- 2) Harga tidak stabil.

Berdasarkan beberapa permasalahan dalam urusan perikanan dan peternakan di atas, isu strategis utama Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan untuk meningkatkan peran atau kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian Daerah. Peningkatan produktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan produk perikanan dan peternakan serta untuk meningkatkan kontribusi dalam perekonomian masyarakat. Perekonomian Daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu waktu, yang menunjukkan produktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pada periode tertentu dari berbagai lapangan usaha ekonomi. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu lapangan usaha yang memberikan kontribusi dalam PDRB di suatu wilayah. Saat ini kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sudah tidak menjadi yang pertama, tetapi sudah bergeser menjadi nomor dua setelah lapangan usaha industri pengolahan, yang berarti struktur perekonomian Daerah sudah

mulai bergeser dari wilayah pertanian menjadi wilayah industri pengolahan.

Kontribusi suatu lapangan usaha perekonomian di suatu wilayah dapat dilihat dari Rasio atau perbandingan PDRB suatu lapangan usaha perekonomian dengan Total PDRB suatu wilayah pada suatu periode tertentu dikalikan 100 persen. Semakin tinggi persentase rasionya, berarti semakin besar kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang, distribusi / kontribusi / rasio Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

**Distribusi/Kontribusi/Rasio PDRB Kabupaten Sumedang  
Tahun 2020 – 2024 (Atas Dasar Harga Berlaku)**

NO.	LAPANGAN USAHA	DISTRIBUSI / KONTRIBUSI / RASIO (%)					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,81	18,42	18,68	18,80	19,27	
2	Pertambangan dan Penggalian	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	
3	Industri Pengolahan	20,02	20,22	20,45	19,48	19,32	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	0,39	0,38	0,36	0,31	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
6	Konstruksi	9,98	11,18	11,26	10,94	10,22	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	14,57	14,87	14,60	15,76	15,82	
8	Transportasi dan Pergudangan	4,80	4,53	4,78	5,24	5,37	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,52	4,45	4,90	5,05	5,49	
10	Informasi dan Komunikasi	3,88	3,87	3,75	3,65	3,73	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,44	4,55	4,41	4,26	4,32	
12	Real Estat	1,53	1,59	1,57	1,57	1,45	
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	5,89	5,90	5,34	5,07	4,96	
15	Jasa Pendidikan	7,03	6,91	6,54	6,40	6,42	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,19	1,24	1,20	1,19	1,06	
17	Jasa Lainnya	1,77	1,69	1,94	2,03	2,05	
<b>TOTAL (PDRB)</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

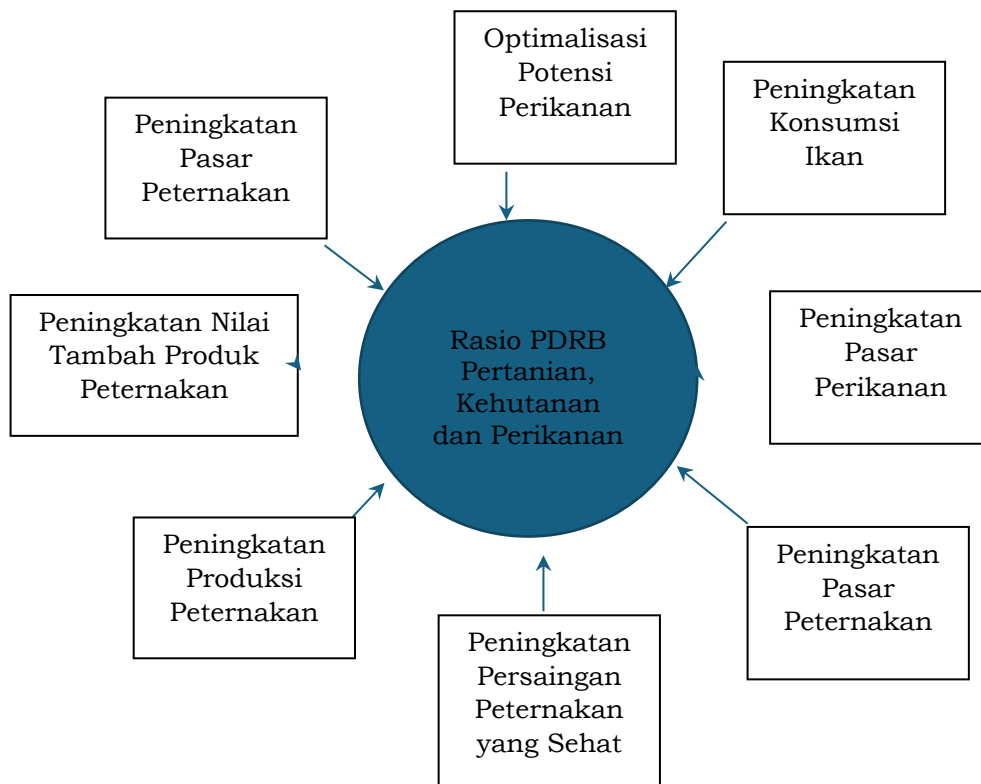
Sumber : *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha 2020 - 2024, BPS Kabupaten Sumedang, 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat distribusi / kontribusi / rasio PDRB menurut lapangan usaha Tahun 2020 - 2024. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki

rasio terbesar kedua setelah lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini berarti perekonomian Daerah sudah bergeser menjadi daerah industri pengolahan. Hal ini menjadi tantangan dan peluang untuk meningkatkan kembali peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian Daerah. Subsektor peternakan dan subsektor perikanan merupakan bagian dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga dengan peningkatan subsektor tersebut akan berperan untuk meningkatkan rasio / kontribusi terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Permasalahan ini harus menjadi prioritas dalam perumusan strategi dan program kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan periode 2025–2029.

**Grafik 2. 2**  
**Peta Isu Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan**



## **B. Isu Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan**

Dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan untuk meningkatkan rasio atau peran lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, Dinas Perikanan dan Peternakan menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu dijadikan fokus utama dalam penyusunan kebijakan, PROGRAM, dan Kegiatan lima tahun ke

depan. Isu Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap kondisi pelayanan dan capaian Kinerja saat ini, potensi daerah, permasalahan internal Perangkat Daerah, isu pembangunan berkelanjutan (KLHS), serta dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional.

Selain Isu Strategis terkait pelayanan dan capaian kinerja, Dinas Perikanan dan Peternakan juga dihadapkan pada isu strategis daerah lainnya. Pada prinsipnya Isu Strategis Daerah dirumuskan dari permasalahan-permasalahan yang terdapat di seluruh wilayah dan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam Rencana Strategis ini, Isu Strategis Daerah juga dimuat untuk merumuskan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan. Isu Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan menggunakan teknik perumusan yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KINERJA YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DAERAH YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH				ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	DAERAH	
			IG	IN	IR	ID	
1. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan (perikanan budidaya dan perikanan tangkap)	1. Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	1. Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan dan bencana alam	1. Kebijakan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Pengelolaan perbatasan DAS yang dapat mempengaruhi kualitas air		
	2. Konsumsi ikan masyarakat masih rendah	2. Pengelolaan daya dukung alam yang terintegrasi untuk ketahanan pangan dan air	2. Perubahan iklim secara langsung mempengaruhi polutan, ketersediaan air, serta produktivitas lahan pertanian akibat cuaca ekstrem seperti kekeringan atau banjir. Hal ini menjadi tantangan besar bagi petani di Sumedang untuk mempertahankan hasil produksi pangan yang stabil	2. Pengelolaan pertanian yang berkelanjutan. Perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung lingkungan menjadi ancaman serius bagi Sektor Pertanian di Kabupaten Sumedang. Pola cuaca yang tidak menentu, seperti musim kemarau yang lebih panjang atau curah hujan yang ekstrem, dapat mempengaruhi pola tanam, produktivitas lahan, dan distribusi air untuk irigasi	2. Green Economy (Ekonomi Hijau) dapat diterapkan melalui praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, agri-forestri, dan pengelolaan lahan dengan pendekatan lingkungan. Blue Economy (Ekonomi Biru) dapat dimanfaatkan melalui optimalisasi sumber daya air untuk mendukung pertanian. Pembangunan infrastruktur juga penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan kelompok marginal, dapat berpartisipasi dalam aktivitas pertanian dan menikmati hasilnya		
	3. Pasar yang tidak efisien	3. Pengelolaan sumber daya sosial yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah kaya dan miskin	3. Perubahan tren pasar global yang mempengaruhi pendapatan sektor informal	3. Ketimpangan ekonomi yang signifikan di berbagai daerah, termasuk akses layanan dan pendapatan	3. Ketimpangan akses dan kualitas pekerjaan di daerah pedesaan yang lebih bergantung pada Sektor Pertanian		
2. Produksi Peternakan	1. Pasar yang tidak efisien	1. Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	1. Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan dan bencana alam	1. Kebijakan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Pengelolaan perbatasan DAS yang dapat mempengaruhi kualitas air	Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas Perikanan dan Peternakan untuk Meningkatkan Basis-PODB Perikanan dan Peternakan
	2. Peternakan yang tidak sehat	2. Pengelolaan daya dukung alam yang terintegrasi untuk ketahanan pangan dan air	2. Perubahan iklim secara langsung mempengaruhi polutan, ketersediaan air, serta produktivitas lahan pertanian akibat cuaca ekstrem seperti kekeringan atau banjir. Hal ini menjadi tantangan besar bagi petani di Sumedang untuk mempertahankan hasil produksi pangan yang stabil	2. Pengelolaan pertanian yang berkelanjutan. Perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung lingkungan menjadi ancaman serius bagi Sektor Pertanian di Kabupaten Sumedang. Pola cuaca yang tidak menentu, seperti musim kemarau yang lebih panjang atau curah hujan yang ekstrem, dapat mempengaruhi pola tanam, produktivitas lahan, dan distribusi air untuk irigasi	2. Green Economy (Ekonomi Hijau) dapat diterapkan melalui praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, agri-forestri, dan pengelolaan lahan dengan pendekatan lingkungan. Blue Economy (Ekonomi Biru) dapat dimanfaatkan melalui optimalisasi sumber daya air untuk mendukung pertanian. Pembangunan infrastruktur juga penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan kelompok marginal, dapat berpartisipasi dalam aktivitas pertanian dan menikmati hasilnya		
	3. Kurangnya akses teknologi modern	3. Pengelolaan sumber daya sosial yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah kaya dan miskin	3. Perubahan tren pasar global yang mempengaruhi pendapatan sektor informal	3. Ketimpangan ekonomi yang signifikan di berbagai daerah, termasuk akses layanan dan pendapatan	3. Ketimpangan akses dan kualitas pekerjaan di daerah pedesaan yang lebih bergantung pada Sektor Pertanian		
	4. Rendahnya produksi perikanan						
	5. Rendahnya nilai tambah produk peternakan						
	6. Pasar yang tidak efisien						

Sumber : RPJMD Kabupaten Sumedang 2025 -2029, dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, diolah

Berdasarkan hasil identifikasi potensi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan dan Peternakan, diketahui bahwa

kontribusi/rasio PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan salah satunya dengan peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan. Subsektor perikanan dan Subsektor peternakan merupakan bagian dari lapangan usaha tersebut, sehingga untuk meningkatkan peran/kontribusi/rasio PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan, salah satunya harus meningkatkan peran dari perikanan dan peternakan. Namun demikian masih terdapat sejumlah permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas.

Sejalan dengan hal tersebut, isu KLHS RPJMD yang relevan menunjukkan minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata, Pengelolaan daya dukung alam yang terintegrasi untuk ketahanan pangan dan air, dan Pengelolaan sumber daya sosial yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah kaya dan miskin. Pada level regional (Provinsi Jawa Barat), fokus diarahkan pada peningkatan pengelolaan perbatasan DAS yang dapat mempengaruhi kualitas air, terciptanya *Green Economy* (Ekonomi Hijau) dapat diterapkan melalui praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, agroforestri, dan pengelolaan lahan dengan pendekatan lingkungan, *Blue Economy* (Ekonomi Biru) dapat dimanfaatkan melalui optimalisasi sumber daya air untuk mendukung pertanian, pembangunan inklusif juga penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan kelompok marginal, dapat berpartisipasi dalam aktivitas pertanian dan menikmati hasilnya, dan memperkecil ketimpangan akses dan kualitas pekerjaan di daerah pedesaan yang lebih bergantung pada Sektor Pertanian, sedangkan di tingkat lokal (Kabupaten Sumedang) ditekankan pada terciptanya Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, isu pembangunan berkelanjutan, serta dinamika lingkungan strategis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan harus difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan untuk meningkatkan peran/kontribusi/rasio PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata, adil, dan inklusif. Oleh karena itu, **isu strategis Dinas Perikanan dan Peternakan dirumuskan sebagai**

**berikut : “Peningkatan Produktivitas Perikanan dan Peternakan untuk Meningkatkan Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan”** guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif terhadap tuntutan pembangunan daerah.

Isu Strategis ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan prioritas Dinas Perikanan dan Peternakan pada periode perencanaan mendatang. Penanganan isu ini secara konsisten akan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan dan capaian Kinerja yang responsif, inklusif, dan berdaya saing.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Perumusan komponen ini merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, khususnya terkait upaya peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan untuk meningkatkan rasio PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai fokus pembangunan lima tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran disusun untuk memberikan gambaran capaian yang ingin diraih secara terukur, baik dalam bentuk peningkatan capaian Kinerja dan pelayanan maupun penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Strategi ditetapkan sebagai pendekatan menyeluruh untuk mencapai Sasaran tersebut, sedangkan Arah Kebijakan berfungsi sebagai panduan operasional yang mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan agar konsisten dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Daerah.

Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis pada data, diharapkan seluruh perangkat di Dinas Perikanan dan Peternakan dapat bergerak secara sinergis dalam mewujudkan capaian kinerja dan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

#### **3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029**

Tujuan pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam periode 2025–2029 secara strategis diarahkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan kebijakan nasional. Berdasarkan sasaran yang terdapat di RPJMD tersebut yang terkait dengan Dinas Perikanan dan Peternakan, maka terdapat dua tujuan utama yang hendak dicapai sebagai berikut :

##### **A. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Teknologi**

Sasaran di RPJMD ini adalah dengan indikator yang terkait dengan Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Indikator Rasio PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam satuan persen. Rasio PDRB

ini mencerminkan peranan atau kontribusi lapangan usaha ini terhadap perekonomian Daerah. Usaha perikanan dan peternakan merupakan bagian dari lapangan usaha ini, dimana dengan berbagai upaya pembangunan perikanan dan peternakan diharapkan dapat ikut meningkatkan rasio atau kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB Kabupaten Sumedang. Tujuan dinas/Sasaran RPJMD ini berperan untuk mendukung atau membidik salah satu tujuan RPJMD yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari Misi ke 4 (empat) RPJMD, yaitu Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka upaya pembangunan perikanan dan peternakan akan membidik tercapainya Misi ke 4 RPJMD tersebut, dan akhirnya akan membidik Visi Kabupaten Sumedang.

Untuk mencapai tujuan / sasaran tersebut maka tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang menekankan pada upaya untuk Meningkatkan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, Meningkatkan Produktivitas Peternakan, dan Mengendalikan Penyebaran Penyakit Menular Strategis pada Hewan untuk mencapai Peningkatan Produktivitas Perikanan dan Peternakan untuk Meningkatkan Rasio PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

#### B. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Sasaran di RPJMD ini adalah dengan Indikator yang terkait dengan Perangkat Daerah secara umum adalah Nilai Skor LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Kabupaten Sumedang. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan sasaran RPJMD ini yang menjadi tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang terkait maka diperoleh Sasaran Strategis Perangkat Daerah yaitu meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat Daerah dengan indikator nilai zona integritas Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan khususnya di Program Penunjang akan membidik sasaran strategis ini. Sasaran Strategis selanjutnya akan membidik Sasaran RPJMD/Tujuan Perangkat Daerah. Lebih jauh lagi, dari sasaran RPJMD/Tujuan ini akan membidik tercapainya tujuan RPJMD, yaitu terwujudnya tata

kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif berbasis teknologi digital. Tujuan ini merupakan penjabaran dari Misi ke 2 (dua) RPJMD, yaitu menguatkan birokrasi profesional dan responsif, dan akhirnya akan membidik Visi Kabupaten Sumedang.

Untuk mencapai tujuan tersebut melalui sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah yang dicerminkan dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian kinerja pembangunan yang optimal melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berbasis kinerja.

Sasaran yang ada di RPJMD yang terkait dengan Dinas Perikanan dan Peternakan adalah menjadi Tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan. Pada penjelasan tersebut di atas adalah terdapat dua sasaran RPJMD yang selanjutnya menjadi dua Tujuan pada Dinas Perikanan dan Peternakan yang membidik Misi ke 2 (dua) dan Misi ke 4 (empat) RPJMD.

### **3.2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029**

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, sasaran pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dirumuskan sebagai berikut:

#### **A. Meningkatkan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing**

Sasaran ini mencerminkan pentingnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berorientasi terhadap peningkatan produksi perikanan. Indikator Sasaran ini adalah peningkatan produksi perikanan akan menjadi indikator Kinerja utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran ini.

#### **B. Meningkatkan Produktivitas Peternakan**

Sasaran ini mencerminkan pentingnya peningkatan produktivitas peternakan berorientasi terhadap peningkatan produksi komoditas peternakan (daging, telur, dan susu). indikator sasaran ini adalah peningkatan produksi komoditas peternakan akan menjadi IKU untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran ini.

C. Terkendalnya Penyebaran Penyakit Menular Strategis pada Hewan

Sasaran ini mencerminkan pentingnya pengendalian penyebaran penyakit menular strategis pada hewan. Pengendalian penyakit menular strategis pada hewan sangat penting untuk menunjang peningkatan produktivitas peternakan dan menjaga keamanan pangan dan masyarakat dari penyakit menular strategis pada hewan tersebut. Indikator Sasaran ini adalah persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS akan menjadi IKU untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini.

D. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah.

Fokus utama dari Sasaran ini adalah memperkuat kemampuan internal perangkat Dinas Perikanan dan Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan secara profesional dan efisien. Indikator sasaran ini adalah nilai zona integritas Perangkat Daerah akan menjadi IKU untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, sebagai tolok ukur tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

**3.3. Strategi Rencana Strategis dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029**

Strategi pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan dirancang agar mampu mengintegrasikan kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten secara sinergis dengan kebutuhan lokal. Strategi yang diterapkan antara lain:

A. Peningkatan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.

Peningkatan industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing dicirikan dengan peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya). Strategi untuk mencapai hal ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur perikanan budidaya, tangkap, pengolahan dan pemasaran yang menunjang produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
2. Pengendalian dan Pengawasan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran perikanan

3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya, tangkap, pengolahan dan pemasaran.
4. Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk perikanan budidaya, tangkap, dan pengolahan hasil perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.
5. Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan.
6. Pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya melalui penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan ikan yang ramah lingkungan dan ekonomis.

#### B. Peningkatan Produktivitas Peternakan

peningkatan produktivitas peternakan dapat dicirikan dengan adanya peningkatan produksi komoditas peternakan. Produksi komoditas utama peternakan adalah berupa daging, telur, dan susu sebagai bahan pangan utama masyarakat. Strategi untuk mencapai hal ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan bibit dan varietas unggul benih, bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
2. Penyediaan terintegrasi infrastruktur peternakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
3. Peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk peternakan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan.
4. Peningkatan penyediaan pupuk dan pakan/bahan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
5. Peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan peternakan.

#### C. Pengendalian Penyebaran Penyakit Menular Strategis pada Hewan.

Terkendalnya penyakit menular strategis pada hewan dicirikan dengan persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS. Strategi untuk mencapai hal ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan obat-obatan, vaksin dan bahan-bahan penunjang pelayanan kesehatan hewan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan.

3. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat veteriner.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan pembinaan kesejahteraan hewan.
5. Peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

#### D. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah dicirikan dengan nilai zona integritas Perangkat Daerah. Nilai ini merupakan rangkaian pengukuran Kinerja. Strategi untuk mencapai hal ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pengukuran Kinerja berbasis *output* dan *outcome*, terhubung ke IKM dan Zona Integritas.
2. Penguatan perencanaan partisipasi dari berbagai stakeholder sebagai input dokumen perencanaan.
3. Pelaporan kinerja dan perencanaan dilakukan secara terbuka melalui forum Perangkat Daerah dan media informasi publik.
4. Sinkronisasi kegiatan dengan arah kebijakan Daerah dan perencanaan sektoral yang relevan.
5. Pemanfaatan e-government di Perangkat Daerah.

### **3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029**

Untuk merealisasikan Strategi yang telah ditetapkan, Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025–2029 difokuskan pada beberapa kebijakan utama berikut:

#### A. Peningkatan Produksi Perikanan

1. Menyediakan bibit dan varietas unggul benih, bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
2. Menyediakan terintegrasi infrastruktur peternakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
3. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing produk peternakan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan.

4. Meningkatkan penyediaan pupuk dan pakan / bahan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan peternakan.

B. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan

1. Menyediakan bibit dan varietas unggul benih, bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
2. Menyediakan terintegrasi infrastruktur peternakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
3. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing produk peternakan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan.
4. Meningkatkan penyediaan pupuk dan pakan/bahan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan peternakan.

C. Peningkatan Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Diperoleh dari Surveilance Penyakit dari 5 PHMS

1. Menyediakan obat-obatan, vaksin dan bahan-bahan penunjang pelayanan kesehatan hewan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat veteriner.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan pembinaan kesejahteraan hewan.
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

D. Peningkatan Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah

1. Menerapkan pengukuran kinerja berbasis *output* dan *outcome*, terhubung ke IKM dan Zona Integritas.
2. Menguatkan perencanaan partisipasi dari berbagai stakeholder sebagai input dokumen perencanaan.
3. Melakukan pelaporan kinerja dan perencanaan dilakukan secara terbuka melalui forum Perangkat Daerah dan media informasi publik.

4. Melakukan sinkronisasi kegiatan dengan arah kebijakan Daerah dan perencanaan sektoral yang relevan.
5. Memanfaatkan e-goverment di Perangkat Daerah.

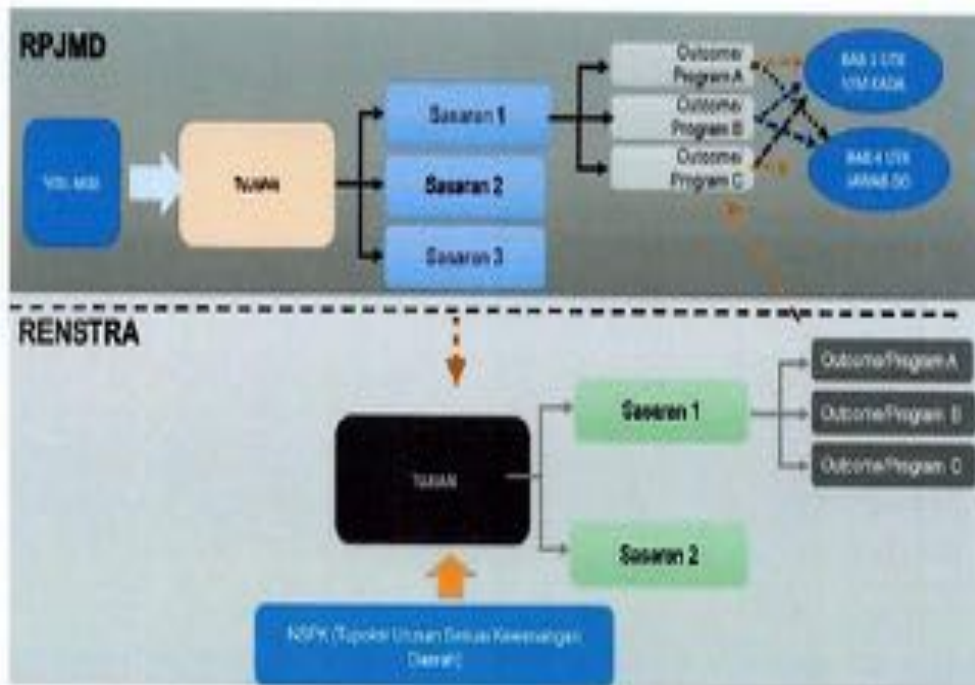
**Gambar 3. 1**

**Konsep Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan**



**Gambar 3. 2**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029**





Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa arah pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2025 - 2029 mengacu pada penjabaran Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan sasaran RPJMD, yang fokus pada upaya meningkatkan industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing, meningkatkan produktivitas peternakan, dan mengendalikan penyebaran penyakit menular strategis pada hewan serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah.

Sasaran pertama adalah meningkatnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing, dengan indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah peningkatan produksi perikanan, dengan tren target yang terus mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Target Peningkatan Produksi Perikanan ditetapkan pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030 masing-masing sebesar 3,58 persen, 4,10 persen, 4,62 persen, 5,14 persen, 5,66 persen, dan 6,18 persen. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Dinas Perikanan dan Peternakan dalam upaya meningkatkan ketersediaan produk perikanan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Sasaran kedua meningkatnya produktivitas peternakan dengan Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah peningkatan produksi komoditas peternakan, dengan tren target yang terus mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Target peningkatan produksi komoditas peternakan ditetapkan pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030 masing-masing sebesar 12,17 persen, 12,42 persen, 12,67 persen, 12,92 persen, 13,17 persen, dan 13,42 persen. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Dinas Perikanan dan Peternakan dalam upaya meningkatkan ketersediaan produk peternakan dan kesejahteraan para peternak.

Sasaran ketiga adalah terkendalinya penyebaran penyakit menular strategis pada hewan dengan indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS, dengan target tetap 100 persen dari tahun 2025 - 2030. Target ini mencerminkan komitmen Dinas Perikanan dan Peternakan dalam upaya mengendalikan penyakit hewan di Daerah untuk kelangsungan usaha peternakan dan keamanan pangan asal hewan dan masyarakat yang terkait dengan peternakan dan produk peternakan.

Sasaran keempat adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah zona integritas Perangkat Daerah, yang menjadi tolok ukur pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Target capaian zona integritas juga menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030 masing-masing sebesar 84, 90, 92, 94, 96, dan 98 poin.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara Tujuan, Sasaran, indikator, dan target Kinerja yang terukur, guna mendukung tercapainya capaian kinerja yang berkualitas serta birokrasi pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas di Dinas Perikanan dan Peternakan.

**Tabel 3.2.**

**Penahapan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 - 2026**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Dasar Pembangunan Perikanan dan Peternakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perikanan dan Peternakan	Penguatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perikanan dan Peternakan	Percepatan Pembangunan Perikanan dan Peternakan	Perwujudan Capaian Target Akhir Renstra Pembangunan Perikanan dan Peternakan

Berdasarkan Tabel 3.4, strategi pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam rangka peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan untuk kesejahteraan petani disusun secara bertahap melalui lima fase yang terencana dan berkesinambungan. Penahapan ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pembangunan memiliki fokus dan target yang terukur sehingga arah kebijakan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan Daerah secara menyeluruh.

Tahap I (2026) merupakan tahap penguatan dasar pembangunan perikanan dan peternakan, yang berfokus pada upaya penguatan kelembagaan, penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah, penyiapan dan penyediaan prasarana (infrastruktur) perikanan dan peternakan, penyediaan sarana perikanan dan peternakan, dan pelaksanaan Kegiatan yang rutin harus ada setiap tahun. Pada fase ini, pondasi mulai dibangun dengan prioritas pada persiapan dan/atau penyediaan infrastruktur perikanan dan peternakan.

Tahap II (2027) diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pembangunan perikanan dan peternakan, yang menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana perikanan dan peternakan yang dibarengi dengan peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan secara simultan.

Tahap III (2028) berfokus pada penguatan sarana dan prasarana pembangunan perikanan dan peternakan, dengan menekankan pada optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan dan peternakan.

Tahap IV (2029) merupakan tahap percepatan pembangunan perikanan dan peternakan, yaitu percepatan pelaksanaan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. penekanan pada tahap ini adalah kolaborasi lintas sektor, instansi vertikal, dan lembaga lainnya guna mendorong percepatan dalam pembangunan perikanan dan peternakan.

Tahap V (2030) menjadi fase puncak, yaitu perwujudan capaian target akhir rencana strategis Pembangunan Perikanan dan Peternakan. Pada tahap ini, seluruh Program pembangunan perikanan dan peternakan, akan memberikan manfaat terhadap capaian peningkatan produktivitas untuk mencapai peningkatan rasio atau peran PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan.

Dengan penahapan yang sistematis ini, Dinas Perikanan dan Peternakan berkomitmen untuk mewujudkan capaian Kinerja yang bermuara kepada peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan untuk mencapai peningkatan rasio atau peran PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

**Tabel 3.3.**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan**

NO.	OPERASIONAL NSEK	ARAH KEBIJAKAN RRMMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Teknologi	<p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan</p> <p>Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring</p> <p>Modernisasi sarana dan prasarana perikanan</p> <p>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional</p> <p>Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis</p> <p>Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat kompetitif masuk pasar ekspor/tepat</p> <p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian</p> <p>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water pro-perty</p> <p>Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis</p> <p>Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis</p>	<p>Meningkatnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing : (1) Penyediaan infrastruktur perikanan budidaya, tangkap, pengolahan dan pemasaran yang menunjang produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan, (2) Pengendalian dan Pengawasan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran perikanan, (3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya, tangkap, pengolahan dan pemasaran, (4) Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk perikanan budidaya, tangkap, dan pengolahan hasil perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan, (5) Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan, dan (6) Pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya melalui penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan ikan yang ramah lingkungan dan ekonomis.</p> <p>Meningkatnya Produktivitas Peternakan : (1) Penyediaan bibit dan varietas unggul benih, bibit ternak dan hijauan pakan ternak, (2) Penyediaan terintegrasi infrastruktur peternakan untuk meningkatkan produktivitas peternakan dan daya saing produk peternakan, (3) Peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk peternakan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, (4) Peningkatan penyediaan pupuk dan pakan / bahan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, dan (5) Peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan peternakan.</p> <p>Terbendalinya Penyebaran Penyakit Menular Strategis pada Hewan : (1) Penyediaan obat-obatan, vaksin dan bahan-bahan penunjang pelayanan kesehatan hewan, (2) Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan Hewan, (3) Penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner, (4) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pembinaan kesejahteraan hewan, dan (5) Peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner.</p>	

NO.	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja pmda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah : (1) Penerapan pengukuran kinerja berbasis output dan outcome, terhubung ke IKM dan Zona Integritas, (2) Penguatan perencanaan partisipasi dari berbagai stakeholder sebagai input dokumen perencanaan, (3) Pelaporan kinerja dan perencanaan dilakukan secara terbuka melalui forum Perangkat Daerah dan media informasi publik, dan (4) Sinkronisasi kegiatan dengan arah kebijakan daerah dan perencanaan sektoral yang relevan, dan (5) Pemanfaatan e-government di Perangkat Daerah	
		Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan		
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan		
		Penguatan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan		

Tabel ini menunjukkan bagaimana arah kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dioperasionalkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan secara sistematis dan terukur. Matriks pada tabel menguraikan benang merah keterkaitan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Arah Kebijakan RPJMD, hingga turunan kebijakan spesifik pada Perangkat Daerah.

A. Peningkatan Produksi Perikanan

1. Menyediakan bibit dan varietas unggul benih, bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
2. Menyediakan terintegrasi infrastruktur peternakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
3. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing produk peternakan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan.
4. Meningkatkan penyediaan pupuk dan pakan / bahan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan peternakan.

B. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan

1. Menyediakan bibit dan varietas unggul benih, bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
2. Menyediakan terintegrasi infrastruktur peternakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
3. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing produk peternakan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan.
4. Meningkatkan penyediaan pupuk dan pakan / bahan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.

5. Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan peternakan.
- C. Peningkatan Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Diperoleh dari Surveylance Penyakit dari 5 PHMS
1. Menyediakan obat-obatan, vaksin dan bahan-bahan penunjang pelayanan kesehatan hewan.
  2. Menyediakan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan Hewan.
  3. Menyediakan sarana dan prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pembinaan kesejahteraan hewan.
  5. Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.
- D. Peningkatan Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah
1. Menerapkan pengukuran kinerja berbasis output dan outcome, terhubung ke IKM dan Zona Integritas.
  2. Menguatkan perencanaan partisipasi dari berbagai stakeholder sebagai input dokumen perencanaan.
  3. Melakukan pelaporan kinerja dan perencanaan dilakukan secara terbuka melalui forum Perangkat Daerah dan media informasi publik.
  4. Melakukan sinkronisasi kegiatan dengan arah kebijakan daerah dan perencanaan sektoral yang relevan.
  5. Memanfaatkan e-goverment di Perangkat Daerah.
  6. Peningkatan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan responsif.

Secara keseluruhan, matriks operasionalisasi ini menunjukkan adanya konsistensi antara kebijakan nasional dan Daerah dengan

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan. Arah Kebijakan yang disusun berfokus pada:

- A. Peningkatan Produksi Perikanan.
- B. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan.
- C. Peningkatan Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Diperoleh dari Surveylance Penyakit dari 5 PHMS
- D. Peningkatan Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah

Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya capaian Kinerja peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan untuk peningkatan rasio atau peran PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan, dan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan Daerah.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan Daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan dan subkegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, Program dan Kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu Program/Kegiatan untuk perencanaan strategis dan Program/Kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal Program/Kegiatan di dalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgen untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan Program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dan Daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJMD, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas nasional di Daerah. Pada akhirnya, dilakukan penyesuaian dan penyalarsan terhadap Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029.

#### **4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan**

Perumusan Program, Kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan serta potensi yang dimiliki sesuai urusan. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait.

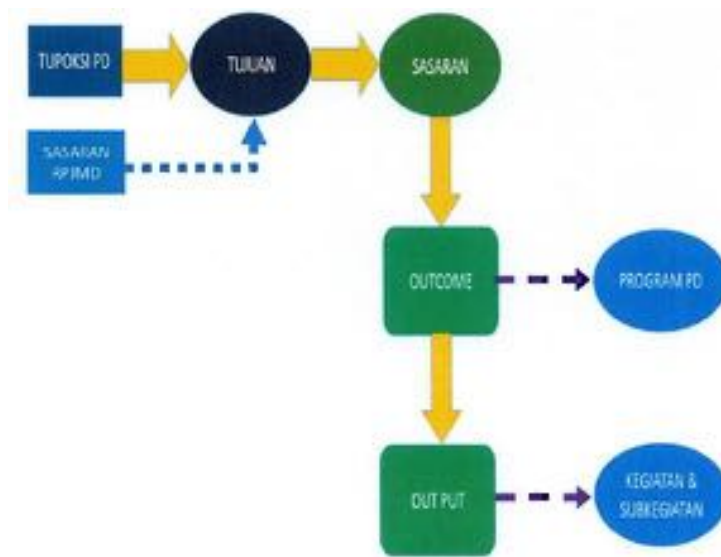
Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis indikator kinerja, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum Perangkat Daerah, dan koordinasi lintas sektor. Tahap ini memastikan bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis yang telah ditetapkan, yaitu **Peningkatan Produktivitas Perikanan dan Peternakan untuk Meningkatkan Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.**

Selanjutnya dilakukan penyelarasan prioritas Program dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk integrasi agenda global seperti tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penyelarasan ini menjamin relevansi dan kesinambungan Program Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mendukung target pembangunan Daerah.

Perumusan Kegiatan dan subkegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap Kegiatan dirancang memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang realistis, serta rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik.

Melalui teknik ini, diharapkan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang selama periode 2025–2029 tidak hanya mampu meningkatkan kinerja, tetapi juga memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat perikanan dan peternakan.

**Gambar 4. 1**  
**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan**  
**Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan**  
**Tahun 2025 - 2029**



Kerangka perumusan Program, Kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD) dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Diagram pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses perumusan dimulai dari Tupoksi PD serta sasaran RPJMD yang menjadi landasan utama. Melalui dasar ini, dirumuskan tujuan yang akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi.

Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan *outcome*, yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program. Outcome menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini ditentukan Program Perangkat Daerah yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan dan subkegiatan, yang menghasilkan *output* sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima masyarakat. Hubungan antara *outcome* dan *output* menggambarkan kesinambungan logis antara dampak pembangunan dengan hasil konkret di lapangan.

Alur ini juga menunjukkan adanya penyelarasan vertikal antara dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah dengan perencanaan di Kabupaten Sumedang, sehingga setiap program dan kegiatan tidak hanya relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga konsisten dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan kerangka ini, proses perumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang menjadi lebih terarah, fokus pada peningkatan kualitas capaian kinerja, serta mampu menjawab isu strategis utama yaitu **Peningkatan Produktivitas Perikanan dan Peternakan untuk Meningkatkan Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.**

**Tabel 4.1.**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>3.25.3.27.0.00.02.0000 - Dinas Perikanan dan Peternakan</b>							
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah.	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Teknologi; - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Masa PDDB Perikanan, Perikanan dan Kehutanan (%)		
					Nilai Skor LFPD Kabupaten (Skor)		
					Zona Integritas Perangkat Daerah (ZIDA)		
					Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	3.25.01 - PROGRAM PERLUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(P1)	(P2)	(P3)	(P4)	(P5)	(P6)	(P7)	(P8)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wikidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Subansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subansi)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0009 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.25.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Usaha yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.25.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Usaha yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Usaha Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	3.25.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Usaha Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	3.25.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	3.25.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.25.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.25.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.25.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terbnyas Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengkajian Retribusi Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengkajian, Penelitiaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	3.25.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	3.25.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengkajian Retribusi Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengkajian Retribusi Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengkajian Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	3.25.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.04.0004 - Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	3.25.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pemutangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3.25.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.25.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.25.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3.25.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.25.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	3.25.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	3.25.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
					Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	3.25.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.25.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.25.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.25.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terpeenuhnya Pengetikan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.25.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Perutusan/Ansis Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.06.0010 - Perutusan/Ansis Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Barang Milik Daerah Memada:	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Ases Tak Benerujud yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Ases Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Perorangan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dinehabitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dinehabitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dinehabitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorannya (Unit)	3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi (Ha)	3.25.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
		Meningkatnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing			Peningkatan Produksi Perikanan (N)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pembudayaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02 - Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyusunan Bantuan Pin Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02 - Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyusunan Bantuan Pin Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembudayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
				Terkebihnya dan Terselenggaranya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	3.25.03.2.03.0001 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Di terbitkan/nya/ anda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyusunan dan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menyaji Keunggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.03.2.04.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	
					Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04.0003 - Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
					Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04.0004 - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	
					Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.04.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(P1)	(P2)	(P3)	(P4)	(P5)	(P6)	(P7)	(P8)
				Derbitkannya Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	Jumlah Penyeratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.03.2.05 - Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.05 - Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Penyeratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	3.25.03.2.05.0001 - Penetapan Penyeratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	
					Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.05.0003 - Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	
				Terdapatkannya Kapal Perikanan	Jumlah Penyeratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.03.2.06 - Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.06 - Pendaftaran Kapal Perikanan Benakuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.03.2.06.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	
					Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.06.0003 - Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya Penerbitan Rekomendasi Teknis (tan Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Model Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.04.2.01 - Penerbitan (tan Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Penyusunan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diterbitkannya (rekomendasi)	3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Penyusunan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota (Rekomendasi)	3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(P1)	(P2)	(P3)	(P4)	(P5)	(P6)	(P7)	(P8)
					Jumlah Rekomendasi Penyerahan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	3.25.04.2.01.0001 - Penetapan Penyerahan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diwajibkan (Rekomendasi)	3.25.04.2.01.0002 - Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
					Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Keunggulan Kabupaten Kota (Rekomendasi)	3.25.04.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Keunggulan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Penyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Oterbitkannya (rekomendas)	3.25.04.2.01.0004 - Penerbitan Rekomendasi Penyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pembudayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembayaran, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kembraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kembraan Usaha	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Menegatknya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	3.25.04.2.03 - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi-Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rekomendasi)	3.25.04.2.03 - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi-Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rekomendasi)	3.25.04.2.03.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	3.25.04.2.03.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi-Dayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	3.25.04.2.03.0003 - Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemanfaatan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana Prasarana kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
					Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
					Jumlah Sarana Prasarana unit pengolahan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengolahan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
			Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan		Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan (%)	3.25.05 - PROGRAM PENGAJAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Terwujudnya Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Darat	Jumlah ikan operasi Kapal Pengawas Perikanan (Ikan Operasi)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diawak (Unit)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diawak (Unit)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disahakan Dalam Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan darat/air usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dirusahkan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dirusahkan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan darat/air usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dirusahkan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani (Perkara)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dirusahkan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dirusahkan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dirusahkan Dalam Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan (Hari Operasi)	3.25.05.2.01.0003 - Operasi Kapal Pengawas Perikanan	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat (Unit)	3.25.05.2.01.0005 - Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan (Unit)	3.25.05.2.01.0008 - Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	
					Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani (Perkara)	3.25.05.2.01.0010 - Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota	
					Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit)	3.25.05.2.01.0011 - Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	
			Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (%)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diterbitkan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Injir Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Injir Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	3.25.06.2.01.0002 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Injir Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	3.25.06.2.01.0004 - Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Penyusunan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Penyusunan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Ikan untuk Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan			Peningkatan Produksi Komoditas Perikanan (Pemonitase)		
			Meningkatnya Populasi Ternak		Peningkatan Populasi Ternak (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengetahuan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengetahuan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemuliaan (laporan)	3.27.02.2.02 - Pengetahuan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
				Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnan (laporan)	3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kesehatan dan Kelestarian SDG Hewan	
				Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
					Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	
				Terawasanya Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
					Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dibindak (Kasus)	3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
					Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
					Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dibindak (Kasus)	3.27.02.2.04.0002 - Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah benih/bibit lemak dan hijauan pakan ternak yang beredar (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah benih/bibit lemak yang beredar (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	3.27.02.2.05.0002 - Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	
					Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	3.27.02.2.05.0004 - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
					Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	3.27.02.2.05.0005 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
					Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	3.27.02.2.05.0007 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
					Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
					Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang beredar (Laporan)	3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
				Meningkatnya Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Hewan Pakan Ternak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.03.2.06.0002 - Pengadaan Hewan Pakan Ternak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbemnya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.03.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah benih ternak yang sumbemnya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.03.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan		Persentase Infrastruktur Peternakan yang Tersedia dan Dikembangkan (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Prasarana Peternakan yang Dikembangkan	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0009 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pembangunan Prasarana Peternakan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana untuk UPTD SSB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/ Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jalan ingas usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Ingas Usaha Tani	
					Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0011 - Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	
					Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0012 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Prasarana untuk UPTD BB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0013 - Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
				Meningkatnya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dikelola	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Diasterikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Diasterikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	3.27.03.2.03.0001 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
					Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			Meningkatnya Lahan Pengembalaan Umum yang Dikembangkan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum (Laporan)	3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum		
				Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (Ha)	3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum		
				Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum		
				Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (Ha)	3.27.03.2.04.0001 - Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum		
				Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	3.27.03.2.04.0002 - Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum		
				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum (Laporan)	3.27.03.2.04.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum		
			Terbny Rekomendasi Teknis (zn Usaha Peternakan		Persentase Rekomendasi Teknis (zn Usaha Peternakan yang Diterbitkan (%)	3.27.06 - PROGRAM PERSEBARAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya Rekomendasi Teknis (zn Usaha Peternakan yang Diterbitkan		Jumlah zn usaha pertanian yang dibina dan dawasi (Laporan)	3.27.06.2.01 - Penerbitan zn Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01 - Pemberian Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	3.27.06.2.01 - Pemberian Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01 - Pemberian Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01.0001 - Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
					Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	3.27.06.2.01.0004 - Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
				Meningkatkan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang Dibebaskan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02 - Pemberian Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)
					Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulansi, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas, Mandi, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	3.27.06.2.02.0001 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Izn Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	3.27.96.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izn Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	
					Jumlah Izn Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	3.27.96.2.02.0003 - Pengawasan Pelaksanaan Izn Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	
					Jumlah Izn Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	3.27.96.2.02.0005 - Pengawasan Pelaksanaan Izn Usaha Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Izn usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	3.27.96.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izn Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	
			Meningkatnya Rekomendasi Teknis Izn Usaha Pengecer (Toko, Retai, Subdistributor) Obat Hewan yang Diberikan		Jumlah Izn Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	3.27.96.2.03 - Izn Usaha Pengecer (Toko, Retai, Sub Distributor) Obat Hewan	
					Jumlah Izn Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Kombinasi (Laporan)	3.27.96.2.03 - Izn Usaha Pengecer (Toko, Retai, Sub Distributor) Obat Hewan	
					Jumlah Izn Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Kombinasi (Laporan)	3.27.96.2.03.0001 - Fasilitas Pemenuhan Kombinasi Penerbitan Izn Usaha Pengecer Obat Hewan	
					Jumlah Izn Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	3.27.96.2.03.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izn Usaha Pengecer Obat Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Terkendalinya Penyebaran Penyakit Menular Strategis pada Hewan			Persentase Wilayah yang Terkendal dan Penyakit Hewan Menular Strategis Dipersih dari Surveilance Penyakit dan S PHMS (%)		
			Terkendalinya Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan (%)	3.27.04 - PROGRAM PENDEKALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendal (Laporan)		3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)		3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah kader zoonosis (Orang)		3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)		3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)		3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
					Jumlah kader zoonosis (Orang)	3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
					Jumlah kejadian penyakit yang dilaporkan dengan penyakit Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
					Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	3.27.04.2.01.0007 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan, menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang Terawasi	Jumlah analisa Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	
					Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	3.27.04.2.02.0007 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
				Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Meningkatnya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmawet dan kesejahteraan hewan (Orang)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Penjualan, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPSI/HPM (Dokumen)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap pemipan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi (Unit Usaha)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi (Unit Usaha)	3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
					Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	
					Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
					Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	3.27.04.2.04.0009 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah unit usaha produk hewan yang sesuai terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
				Meningkatnya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Dilangani (Kasus)	3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
					Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
					Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Dilangani (Kasus)	3.27.04.2.05.0002 - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	
					Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
			Terkendalinya dan Tertanggulangnya Bencana Penyakit Hewan Menurut Strategi		Persentase Wilayah yang Terkendal dan Bencana Penyakit Hewan Menurut Strategi (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Pempendalian dan Penanggulangan Bencana Penyakit Hewan Menurut Strategi	Jumlah kejadian Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (laporan)	3.27.05.2.01 - Pempendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (laporan)	3.27.05.2.01 - Pempendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (laporan)	3.27.05.2.01.0004 - Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	
					Jumlah kejadian Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (laporan)	3.27.05.2.01.0007 - Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan peta operasional yang terukur bagi perangkat daerah dalam merumuskan Renstra. Semua sasaran disusun linier, mulai dari NSPK, tujuan, sasaran, outcome, hingga output yang dapat diverifikasi melalui indikator kinerja kuantitatif. Rangkaian program / kegiatan / subkegiatan ini menjadi pedoman implementasi bagi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam meningkatkan produktivitas perikanan dan peternakan untuk meningkatkan rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta penguatan akuntabilitas, hingga pencapaian tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

#### **4.2. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan**

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian Kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas, yaitu **Peningkatan Produktivitas Perikanan dan Peternakan untuk Meningkatkan Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.**

Program yang direncanakan terdiri atas rangkaian intervensi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan dan sebagian urusan pertanian (peternakan), serta urusan penunjang Pemerintah Daerah. Masing-masing Program dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan dan subkegiatan yang memiliki keluaran (*output*) yang jelas dan terukur, serta berorientasi pada pencapaian *outcome* berupa peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan untuk peningkatan rasio PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap Program, Kegiatan, dan subkegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Alokasi

anggaran diprioritaskan pada kegiatan strategis yang mendukung peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan untuk peningkatan rasio PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan. pendekatan pendanaan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap agar implementasi program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola perangkat daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, serta menghasilkan peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

**Tabel 4.2.**  
**Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2026 - 2030**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDUKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PASU INDIKATOR TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU					
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	
1.3 - LAYANAN PEMERIKSAAN KEWAJIBAN LAUTAN DAN PERIKANAN					17.840.000.000,00		18.000.000.000,00		18.200.000.000,00		18.400.000.000,00		18.600.000.000,00				
1.3.D - PROGRAM PELAYANAN LAYANAN PEMERIKSAAN DASAR KAWASAN STRUKTUR					14.840.000.000,00		14.940.000.000,00		15.000.000.000,00		15.100.000.000,00		15.200.000.000,00				
Meningkatkan kualitas kerja Perangkat Daerah (PKD)	Nilai Saku Perangkat Daerah (PKD)	87.4333	88.1111	88.5444	14.840.000.000,00	85.1779	14.940.000.000,00	81.7778	15.000.000.000,00	81.7778	15.100.000.000,00	81.8111	15.200.000.000,00				1.3.D.1.213.30.02.00 - Dana Peningkatan dan Peralatan
1.3.E.1.213 - Peningkatan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					198.400.000,00		198.400.000,00		228.300.000,00		248.200.000,00		270.100.000,00				
Terdapat Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (PKD) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (PKA-SKPD) (Dokumen)	0	0	0	198.500.000,00	0	198.400.000,00	0	228.300.000,00	0	248.200.000,00	0	270.100.000,00				
	Jumlah Salinan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (PKA-SKPD) yang diserahkan kepada Perangkat Daerah yang Dianggap (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	0		0		0		0		0					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja (SKPD) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja (SKPD) (Laporan)	20	21	20		21		21		21		21					
	Jumlah Dokumen PKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (PKA-SKPD) (Dokumen)	0	0	0		0		0		0		0					
	Jumlah Dokumen Perencanaan (suatu Salinan Persepsi PD dan Rancangan yang Berwujud Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Website Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Daerah (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Tahunan Daerah yang Tahun Dibandingkan dan Laporan untuk Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		2		2		2					
	Jumlah Berita Acara Hasil Sekelompok dan Kemungkinan Hasil dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Berkeadilan	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah dan Perangkat Bina Desa yang Ditinjau dalam Rangka Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	1		1		1		1		1					
1.25.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.900.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00		14.000.000,00		16.500.000,00			ASB SUMEDANG	
	Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	2	11.900.000,00	2	12.000.000,00	2	12.500.000,00	3	14.000.000,00	3	16.500.000,00				
1.25.01.01.0002	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RRA-SKPD				7.000.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		8.500.000,00			ASB SUMEDANG	
	Terselenggaranya Dokumen RRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen RRA-SKPD	1	1	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00	1	9.000.000,00	1	8.500.000,00				
1.25.01.01.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen Perubahan RRA-SKPD				4.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		7.000.000,00			ASB SUMEDANG, Wabdi	
	Terselenggaranya Dokumen Perubahan RRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen Perubahan RRA-SKPD	5	5	5	4.000.000,00	5	3.500.000,00	5	4.000.000,00	5	4.500.000,00	5	7.000.000,00				

BIRO/URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PADU INDIKATOR TAHUN												PERANGKAT SARAN	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	THARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU				
(J1)	(J2)	(J3)	(J4)	(J5)	(J6)	(J7)	(J8)	(J9)	(J10)	(J11)	(J12)	(J13)	(J14)	(J15)	(J16)	(J17)	
1.5.31.21.01.004 - Koordinasi dan Penyusunan DFA-SMPO					4.000.000,00		4.400.000,00		4.800.000,00		5.200.000,00		5.700.000,00				
Terdapat Dokumen DFA-SMPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SMPO	Jumlah Dokumen DFA-SMPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SMPO	1	1	1	4.000.000,00	1	4.400.000,00	1	4.800.000,00	1	5.200.000,00	1	5.700.000,00				
1.5.31.21.01.005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SMPO					5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00				
Terdapat Dokumen Perubahan DFA-SMPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SMPO	Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SMPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SMPO (Dokumen)	5	5	5	5.000.000,00	5	5.500.000,00	5	6.000.000,00	5	6.500.000,00	5	7.000.000,00				
1.5.31.21.01.006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitras Realisasi Kinerja (SMPO)					60.000.000,00		66.000.000,00		72.000.000,00		78.000.000,00		84.000.000,00				
Terdapat Laporan Capaian Kinerja dan Mitras Realisasi Kinerja SMPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitras Realisasi Kinerja (SMPO) (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mitras Realisasi Kinerja SMPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitras Realisasi Kinerja (SMPO) (Laporan)	21	21	21	60.000.000,00	21	66.000.000,00	21	72.000.000,00	21	78.000.000,00	21	84.000.000,00				
1.5.31.21.01.007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00				
Terdapatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	9.000.000,00	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00				
1.5.31.21.01.008 - Peningkatan Kualitas Pendukung Statistik Sektoral Daerah					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Terdapatnya Kualitas Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.5.31.21.01.009 - Realisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					0,00		0,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00				
Terdapatnya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa (Lengkap Perangkat Daerah) (Data)	-	-	-	0,00	-	0,00	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	120.000.000,00				
1.5.31.21.01.010 - Realisasi Forum Perangkat Daerah Berbasiskan Bidang Usaha yang Dianggap dalam Rangka Penyusunan Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah					25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tertentukannya Forum Perangkat Daerah Bertaraf Internasional yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Bertaraf Internasional yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (Berita Acara)	-	-	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00				
1.25.01.01.001- Rencanan Dokumen Rencanakan Usaha Sahaja Bersaja PD dan Bersaja PD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDANG		
Tertentukannya Dokumen Rencanakan Usaha Sahaja Bersaja PD dan Bersaja PD	Jumlah Dokumen Rencanakan Usaha Sahaja Bersaja PD dan Bersaja PD yang dibuat (dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.25.01.01.002- Koordinasi Pengkajian Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Daerah yang Sahaja					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDANG		
Tertentukannya Pengkajian Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Daerah yang Sahaja	Jumlah Subansi Koordinasi Pengkajian Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Daerah yang Sahaja (Subansi)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.25.01.01.003- Terkinerjanya dan Pemanfaatan Ruang dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDANG		
Tertentukannya Terkinerjanya dan Pemanfaatan Ruang dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Terkinerjanya dan Pemanfaatan Ruang dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.25.01.01.004- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.617.920.887,00		12.762.680.000,00		11.813.780.000,00		11.265.000.000,00		11.018.500.000,00				
Tertentukannya Dokumen Perakuisisi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan dan Peraturan lainnya yang Berlaku	Jumlah Dokumen Perakuisisi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan dan Peraturan lainnya yang Berlaku (Dokumen)	12	12	12	12.617.920.887,00	12	12.762.680.000,00	12	11.813.780.000,00	12	11.265.000.000,00	12	11.018.500.000,00				
	Jumlah Uang yang Dibayarkan/Tagihan dan Tunggakan ASB (Danglutan)	12	12	12		12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029						
			TARGET	THRGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semestrian SKPD dan Laporan Kombinasi Pergerakan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semestrian SKPD dan Laporan	12	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kombinasi Pergerakan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	-	-	12		12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Baku	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Dokumen Kombinasi dan Pelaksanaan Runtas SKPD (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-					
1.26.01.2.10.001	Penyediaan Gap dan Tugasan ASN				12.905.012.897,00		12.750.000.000,00		13.000.000.000,00		13.200.000.000,00		13.000.000.000,00			KAB. SUMEDANG	
	Sumberdaya Gap dan Tugasan ASN (Danghulan)	12	12	12	12.905.012.897,00	12	12.750.000.000,00	12	13.000.000.000,00	12	13.200.000.000,00	12	13.000.000.000,00				
1.26.01.2.10.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG	
	Sumberdaya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.26.01.2.10.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengoperasian Keuangan SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		4.100.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00			KAB. SUMEDANG	
	Sumberdaya Penatausahaan dan Pengoperasian Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	4.100.000,00	12	4.000.000,00	12	5.000.000,00				
1.26.01.2.10.004	Kombinasi dan Pelaksanaan Runtas SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Tertahapnya Komitmen dan Pelaksanaan Rencana SKPD	Jumlah Dokumen Komitmen dan Pelaksanaan Rencana SKPD (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.25.01.02.000 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Alokasi Tahun SKPD					1.000.000,00		1.300.000,00		1.600.000,00		1.900.000,00		2.200.000,00		KAB. SUMEDANG		
Tertahapnya Laporan Keuangan Alokasi Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Alokasi Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Alokasi Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Alokasi Tahun SKPD (Laporan)	-	-	12	1.000.000,00	12	1.300.000,00	12	1.600.000,00	12	1.900.000,00	12	2.200.000,00				
1.25.01.02.000 - Pengalihan dan Penghapusan Sahur Tanggapan Pemenuhan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDANG		
Tertahapnya Dokumen Sahur Tanggapan Pemenuhan dan Tindak Lanjut Pemenuhan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Sahur Tanggapan Pemenuhan dan Tindak Lanjut Pemenuhan (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.25.01.02.000 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan (Laporan) (Sementara) SKPD					1.000.000,00		1.300.000,00		1.600.000,00		1.900.000,00		2.200.000,00		KAB. SUMEDANG		
Tertahapnya Laporan Keuangan Bulanan (Sementara) SKPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Bulanan (Sementara) SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Sementara) SKPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Bulanan (Sementara) SKPD (Laporan)	12	12	12	1.000.000,00	12	1.300.000,00	12	1.600.000,00	12	1.900.000,00	12	2.200.000,00				
1.25.01.02.000 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDANG		
Tertahapnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.25.01.02 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					14.200.000,00		17.200.000,00		18.300.000,00		19.400.000,00		20.500.000,00				
Tertahapnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Barang Milik Daerah (SKPD) (Dokumen)	-	-	-	14.200.000,00	-	17.200.000,00	-	18.300.000,00	-	19.400.000,00	-	20.500.000,00				
	Jumlah Rencana Kelengkapan Barang Milik Daerah (SKPD) (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PADU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT SAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET				PADU	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang M&D Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang M&D Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang M&D Daerah SKPD (Laporan)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang M&D Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang M&D Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-					
1.3.1.2.1.1.001- Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Barang M&D Daerah SKPD					2.750.000,00		3.000.000,00		3.300.000,00		3.600.000,00		4.000.000,00				KAB. SUMEDHARA
Terdapatnya/Berwujudnya Kebutuhan Barang M&D Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		2.750.000,00	1	3.000.000,00	1	3.300.000,00	1	3.600.000,00	1	4.000.000,00				
1.3.1.2.1.1.002- Pengamanan Barang M&D Daerah SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDHARA
Terdapatnya Pengamanan Barang M&D Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.3.1.2.1.1.003- Koordinasi dan Penilaian Barang M&D Daerah SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDHARA
Terdapatnya Laporan Hasil Penilaian Barang M&D Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang M&D Daerah SKPD (Laporan)	-	-	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.3.1.2.1.1.004- Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang M&D Daerah pada SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDHARA
Terdapatnya Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang M&D Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.3.1.2.1.1.005- Rekrutasi dan Penyusunan Laporan Barang M&D Daerah pada SKPD					11.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		11.000.000,00				KAB. SUMEDHARA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN- OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PASU INDIKATOR TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2024		2025		2026		2027		2028		2029				
			TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET				PASU
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
Teknis/Manajemen/Kelembagaan/ Laporan Berang Mula Daerah pada SPOD	Jumlah Laporan Kelembagaan dan Perencanaan/ Laporan Berang Mula Daerah pada SPOD (Laporan)	12	12	12	11.900.000,00	12	11.900.000,00	12	11.900.000,00	12	11.900.000,00	12	11.900.000,00				
1.2.01.2.10.004 - Penatausahaan Berang Mula Daerah pada SPOD					2.500.000,00		2.750.000,00		3.000.000,00		3.250.000,00		3.500.000,00			KAB. SUNDEWANG	
Teknis/Manajemen/Kelembagaan/ Laporan Berang Mula Daerah pada SPOD	Jumlah Laporan Penatausahaan Berang Mula Daerah pada SPOD (Laporan)	12	12	12	2.500.000,00	12	2.750.000,00	12	3.000.000,00	12	3.250.000,00	12	3.500.000,00				
1.2.01.2.10.007 - Pemeliharaan Berang Mula Daerah SPOD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUNDEWANG	
Teknis/Manajemen/Kelembagaan/ Laporan Berang Mula Daerah SPOD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Berang Mula Daerah SPOD (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.2.01.2.10 - Administrasi Pemeliharaan Daerah Keseluruhan/Perangkat Daerah					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Terdapatnya Dokumen Administrasi Pemeliharaan Daerah Keseluruhan/Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan dan Penyediaan Kebijakan Rencana Daerah (Laporan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Daerah (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Rencana Daerah dan Kebijakan Rencana Daerah (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Dokumen Kelengkapan Rencana Daerah (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Dokumen Rencana Pengawasan Rencana Daerah (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan dan Penyediaan Data Rencana Daerah (Laporan)	-	-	-		-		-		-		-					
1.2.01.2.14.001 - Pemeliharaan Pengawasan Rencana Daerah					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUNDEWANG	
Terdapatnya Rencana Pengawasan Rencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengawasan Rencana Daerah (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(P1)	(I1)	(B1)	(C1)	(D1)	(E1)	(F1)	(G1)	(H1)	(I1)	(J1)	(K1)	(L1)	(M1)	(N1)	(O1)	(P1)	
	Jumlah Pegawai Berkecukupan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Diakibatkan (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Unit Pengabdian Masyarakat dan Pelayanan Sosial (Pelayanan Sosial) (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sekolah Pascasarjana (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan, Penelitian yang Menerangkan dalam Muluskan Tugas (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah ASN yang dipertahankan (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penguatan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LOKASI 001- Pengabdian Masyarakat dan Pelayanan Sosial Pegawai					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG	
Terdapatnya Unit Pengabdian Masyarakat dan Pelayanan Sosial Pegawai	Jumlah Unit Pengabdian Masyarakat dan Pelayanan Sosial Pegawai (Unit)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
LOKASI 002- Pengabdian Masyarakat (Unit) sebagai Aktif Kebergdayaan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG	
Terdapatnya Fasilitas Dinas sebagai Aktif Kebergdayaan (Fasilitas)	Jumlah Fasilitas Dinas sebagai Aktif Kebergdayaan (Fasilitas)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
LOKASI 003- Pembinaan dan Penguatan Administrasi Kepegawaian					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG	
Terdapatnya Pembinaan dan Penguatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penguatan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
LOKASI 004- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG	

INDUK URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMPOK OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2020	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2021		2022		2023		2024		2025					2026	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET					PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Tertakutnya Kelembagaan dan Penguasaan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penguasaan Sistem Informasi Manajemen (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
IKN 01.2.00.000 - Monitoring, Evaluasi, dan Pemberian Reward Pegawai					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAD SUNDEWANG
Tertakutnya Monitoring, Evaluasi, dan Pemberian Reward Pegawai (Dokumen)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pemberian Reward Pegawai (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
IKN 01.2.00.000 - Peningkatan Pegawai yang Performa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAD SUNDEWANG
Tertakutnya Peningkatan Pegawai yang Performa	Jumlah Pegawai Performa yang Ditunjukkan (orang)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
IKN 01.2.00.000 - Peningkatan Pegawai yang Bermotivasi dalam Melaksanakan Tugas					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAD SUNDEWANG
Tertakutnya Peningkatan Pegawai yang Bermotivasi dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pegawai yang Bermotivasi dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
IKN 01.2.00.000 - Peningkatan Tugas ASN					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAD SUNDEWANG
Tertakutnya Peningkatan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipromosikan (orang)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
IKN 01.2.00.000 - Peningkatan dan Peningkatan Pegawai Berprestasi Tugas dan Fungsi					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAD SUNDEWANG
Tertakutnya Peningkatan dan Peningkatan Pegawai Berprestasi Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berprestasi Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
IKN 01.2.00.000 - Kualitas Peraturan Perundang-undangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAD SUNDEWANG
Tertakutnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Undang-undang yang Mengikuti Sistematis Peraturan Perundang-undangan (orang)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
IKN 01.2.00.000 - Berkelanjutan Sistem Implementasi Peraturan Perundang-undangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAD SUNDEWANG
Tertakutnya Berkelanjutan Sistem Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Undang-undang yang Mengikuti Berkelanjutan Sistem Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
IKN 01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					205.000.000,00		223.500.000,00		242.000.000,00		260.500.000,00		280.000.000,00		298.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2004	TARGET DAN PADU INDIKATOR TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2020		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU				
		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
Kelembagaan: Penguatan Administrasi, Sistem Perangai Daerah	Jumlah Total Perolehan Rumah Tangga yang Dibebaskan (Pabel)	-	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	24.000.000,00	-	30.000.000,00	-	34.000.000,00				
	Jumlah Total Perolehan dan Penyalangan Kartu yang Dibebaskan (Pabel)	12	12	12													
	Jumlah Total Komponen Instalasi																
	Labrak/Penerangan Bangunan Kartu yang Dibebaskan (Pabel)	-	-	-													
	Jumlah Total Ruang Cetak dan Pengiriman yang Dibebaskan (Pabel)	12	12	12													
	Jumlah Total Bahan/Bahan yang Dibebaskan (Pabel)	-	-	-													
	Jumlah Total Kertas Legenda Kartu yang Dibebaskan (Pabel)	12	12	12													
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapid Response dan Kesehatan (RRT) Daerah	12	12	12													
	Jumlah Laporan/rapor Kegiatan Taktis Laporan	-	-	-													
	Jumlah Dokumen Penawaran/lelang Online pada RRT (Dokumen)	-	-	-													
	Jumlah Dokumen Anggaran Pelaksanaan Baku Penawaran Berbasis Elektronik pada RRT (Dokumen)	-	-	-													
	Jumlah Dokumen Baku Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Dibebaskan (Dokumen)	12	12	12													
1.26.21.24.001 - Penyelenggaraan Instalasi Labrak/Penerangan Bangunan Kartu					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB SUMEDANG	
Terwujudnya Komponen Instalasi Labrak/Penerangan Bangunan Kartu yang Dibebaskan (Pabel)	Jumlah Total Komponen Instalasi Labrak/Penerangan Bangunan Kartu yang Dibebaskan (Pabel)	-	-	-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1.26.21.24.002 - Penyelenggaraan Perolehan dan Penyalangan Kartu					50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00			KAB SUMEDANG	
Terwujudnya Perolehan dan Penyalangan Kartu	Jumlah Total Perolehan dan Penyalangan Kartu yang Dibebaskan (Pabel)	12	12	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	70.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SARU SATE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
			(Y0)	(Y1)	(Y2)	(Y3)	(Y4)	(Y5)	(Y6)	(Y7)	(Y8)	(Y9)	(Y10)	(Y11)			
1.3.31.2.01.0001 Penyediaan Perabotan Rumah Tangga					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Terdapat Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
1.3.31.2.01.0002 Penyediaan Bahan Logam Kertas					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00				KAB. SUMEDANG
Terdapat Bahan Logam Kertas	Jumlah Paket Bahan Logam Kertas yang Disediakan (Paket)	12	12	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	70.000.000,00				
1.3.31.2.01.0003 Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan					30.000.000,00		37.500.000,00		40.000.000,00		44.000.000,00		48.000.000,00				KAB. SUMEDANG
Terdapat Barang Cetak dan Pengemasan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengemasan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	30.000.000,00	12	37.500.000,00	12	40.000.000,00	12	44.000.000,00	12	48.000.000,00				
1.3.31.2.01.0004 Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan					19.902.000,00		20.500.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00				KAB. SUMEDANG
Terdapat Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	19.902.000,00	12	20.500.000,00	12	21.000.000,00	12	24.000.000,00	12	26.000.000,00				
1.3.31.2.01.0005 Penyediaan Bahan Material					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Terdapat Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan (Paket)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
1.3.31.2.01.0006 - Fasilitas Kuryungin Ternu					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Terdapat Fasilitas Kuryungin Ternu	Jumlah Laporan Fasilitas Kuryungin Ternu (Laporan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
1.3.31.2.01.0007 Peningkatan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00				KAB. SUMEDANG
Terdapat Peningkatan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Peningkatan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD (Laporan)	12	12	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	70.000.000,00				
1.3.31.2.01.0008 Peningkatan Rapat Dinamis pada SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Terdapat Peningkatan Rapat Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Peningkatan Rapat Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
1.3.31.2.01.0009 Berkas Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Terdapat Berkas Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RENCANA Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			

BIKANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)					
Tindakannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada DPRD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada DPRD (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.3.31.1.17 - Peningkatan Ruang Muka Daerah Peranginan Khusus Perencanaan Daerah					60.111.000,00		38.250.000,00		14.000.000,00		70.000.000,00		40.000.000,00						
Ruang Muka Daerah Merak	Jumlah Unit Layanan dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibebaskan (Unit)	-	-	-	60.111.000,00	-	38.250.000,00	-	14.000.000,00	-	70.000.000,00	-	40.000.000,00	-					
	Jumlah Ruang Mebel yang Dibebaskan (Unit)	-	-	5		5		5		5		5							
	Jumlah Unit Asat Tak Bersyarat yang Dibebaskan (Unit)	-	-	-		-		-		-		-							
	Jumlah Unit Asat Tetap Lainnya yang Dibebaskan (Unit)	-	-	-		-		-		-		-							
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibebaskan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1							
	Jumlah Unit Kandang Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibebaskan (Unit)	-	-	-		-		-		-		-							
	Jumlah Unit Kandang Peranginan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan yang Dibebaskan (Unit)	-	-	-		-		-		-		-							
	Jumlah Unit Fasilitas dan Meubel Lainnya yang Dibebaskan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1							
	Jumlah Unit Layanan dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibebaskan (Unit)	-	-	-		-		-		-		-							
	1.3.31.1.17 001 - Peningkatan Kandang Peranginan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG		
Terdapatnya Kandang Peranginan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan yang Dibebaskan (Unit)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00					
1.3.31.1.17 002 - Peningkatan Kandang Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		0,00		0,00		30.000.000,00		0,00			KAB. SUMEDANG			
Terdapatnya Kandang Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibebaskan (Unit)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	30.000.000,00	-	0,00							
1.3.31.1.17 003 - Peningkatan Mebel					20.111.000,00		30.000.000,00		11.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			KAB. SUMEDANG			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKATEGORI OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2004	TARGET DAN PADU INDIKATOR TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2005		2006		2007		2008		2009		2010				
			TARGET	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terdapatnya Model	Jumlah Paket Model yang Diadakan (Unit)	-	-	5	20.111.000,00	5	30.000.000,00	5	33.000.000,00	5	35.000.000,00	5	38.000.000,00				
1.26.01.2.07.0000 - Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya					7.500.000,00		8.200.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00				KAB. SUMEDANG
Terdapatnya Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan (Unit)	1	1	1	7.500.000,00	1	8.200.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00				
1.26.01.2.07.0001 - Pengadaan Asst. Telp. Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Terdapatnya Asst. Telp. Lainnya	Jumlah Unit Asst. Telp. Lainnya yang Diadakan (Unit)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.26.01.2.07.0002 - Pengadaan Asst. Tpk. Bersuara					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Terdapatnya Asst. Tpk. Bersuara	Jumlah Unit Asst. Tpk. Bersuara yang Diadakan (Unit)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.26.01.2.07.0003 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					33.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00				KAB. SUMEDANG
Terdapatnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan (Unit)	1	1	1	33.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00				
1.26.01.2.07.0004 - Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Terdapatnya Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan (Unit)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.26.01.2.07.0005 - Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Terdapatnya Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan (Unit)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.26.01.2.08 - Pengadaan Jasa Penunjang Model Pemerintahan Daerah					1.000.796.000,00		1.008.200.000,00		1.006.000.000,00		1.196.000.000,00		1.300.000.000,00				
Terdapatnya Jasa Penunjang Model Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor yang Diadakan (Laporan)	12	12	12	1.000.796.000,00	12	1.008.200.000,00	12	1.006.000.000,00	12	1.196.000.000,00	12	1.300.000.000,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tatalaksana (Laporan)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Diadakan (Laporan)	-	-	-		-		-		-		-					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2015		2016		2017		2018		2019					2020	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)			
	Jumlah Terima dan Pelaksanaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperkirakan/Direncanakan (Unit)	-	-	1		1		1		1		1					
	Jumlah Terima dan Pelaksanaan Pemadangan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperkirakan/Direncanakan (Unit)	-	-	-		-		-		-		-					
	Luas Tanah yang Dibekukan Pemeliharaan/Perbaikan (Juta)	-	-	-		-		-		-		-					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperkirakan/Direncanakan (Unit)	2	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Adu Yang Lainnya yang Diperkirakan (Unit)	-	-	-		-		-		-		-					
1.25.01.2.01.001	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Rendahan/Perorangan Dinas atau Rendahan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB SUMEDANG		
	Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Rendahan/Perorangan Dinas atau Rendahan Dinas Jabatan	-	-	-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1.25.01.2.01.002	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Rendahan Dinas Operasional atau Lapangan				134.504.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB SUMEDANG		
	Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Rendahan Dinas Operasional atau Lapangan	67	66	66	134.504.000,00	66	160.000.000,00	66	175.000.000,00	66	200.000.000,00	66	200.000.000,00				
1.25.01.2.01.003	Pemeliharaan Mobil				0,00		25.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		KAB SUMEDANG		
	Terdapatnya Pemeliharaan Mobil	-	-	-	0,00	60	25.000.000,00	60	30.000.000,00	60	33.000.000,00	60	35.000.000,00				
1.25.01.2.01.004	Pemeliharaan Perakitan dan Meubel Lainnya				16.520.000,00		8.500.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		KAB SUMEDANG		
	Terdapatnya Pemeliharaan Perakitan dan Meubel Lainnya yang Diperkirakan (Unit)	10	10	10	16.520.000,00	10	8.500.000,00	10	18.000.000,00	10	20.000.000,00	11	21.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBSISTEM / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2004	TARGET DAN PADU INDIKATOR TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2005		2006		2007		2008		2009		2010				
			TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET				PADU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
125.01.236-007 - Pemeliharaan Aas Tetap Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG	
Tetapannya/Pemeliharaan Aas Tetap Lainnya	Jumlah Aas Tetap Lainnya yang Dipelihara (Lini)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
125.01.236-008 - Pemeliharaan Aas Tak Beresap					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG	
Tetapannya/Pemeliharaan Aas Tak Beresap	Jumlah Aas Tak Beresap yang Dipelihara (Lini)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
125.01.236-009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					141.884.000,00		200.000.000,00		241.880.000,00		280.000.000,00		320.000.000,00			KAB. SUMEDANG	
Tetapannya/Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Lini)	2	2	2	141.884.000,00	2	200.000.000,00	2	241.880.000,00	2	280.000.000,00	2	320.000.000,00				
125.01.236-010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000,00		110.000.000,00		125.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00			KAB. SUMEDANG	
Tetapannya/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Lini)	-	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	125.000.000,00	1	140.000.000,00	1	160.000.000,00				
125.01.236-011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Peningkatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG	
Tetapannya/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Peningkatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Peningkatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Lini)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
125.01.236-012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG	
Tetapannya/Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dipelihara/Rehabilitasi (Ha)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
<b>125.01 - PROGRAM PERAKSI (KAWA) PERKAWA/DEKAWA</b>					<b>630.000.000,00</b>		<b>870.000.000,00</b>		<b>750.000.000,00</b>		<b>750.000.000,00</b>		<b>800.000.000,00</b>				
Meningkatnya Produk Perikanan Tangkap	Produk Perikanan Tangkap (Ton)	1.100,00	1.438,39	1.790,34	420.000.000,00	1.800,70	870.000.000,00	1.900,34	750.000.000,00	2.240,54	750.000.000,00	2.400,71	800.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00

BIDANG/URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2015		2016		2017		2018		2019					2020	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
			2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020				
125.012.01 - Peningkatan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Rawa, Rawa dan Cengapan Air Lainnya yang Dapat Dusuhtukan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota					542.000.000,00		605.000.000,00		540.000.000,00		600.000.000,00		610.000.000,00				
Meningkatnya Pengetahuan Penangkapan Ikan	Jumlah Suku dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Daerah dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dikamari)	-	1	0	542.000.000,00	1	605.000.000,00	1	540.000.000,00	1	600.000.000,00	1	610.000.000,00				
	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia dan Tersedia (Unit)	0	0	0		0		0		0		0					
	Jumlah Pemasaran Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	-	-	-		1		1		1		1					
125.012.01.001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					0,00		25.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			KAB. SIAWANGI	
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Daerah dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Suku dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Daerah dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dikamari)	-	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00				
125.012.01.002 - Penyediaan Pemasaran Usaha Perikanan Tangkap					0,00		100.000.000,00		112.000.000,00		107.000.000,00		98.000.000,00			KAB. SIAWANGI	
Tersedianya Pemasaran Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Pemasaran Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	-	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	112.000.000,00	1	107.000.000,00	1	98.000.000,00				
125.012.01.003 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					542.000.000,00		291.000.000,00		400.000.000,00		475.000.000,00		420.000.000,00			KAB. SIAWANGI	
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia dan Tersedia (Unit)	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia dan Tersedia (Unit)	0	0	0	542.000.000,00	0	291.000.000,00	0	400.000.000,00	0	475.000.000,00	0	420.000.000,00				
125.012.01 - Peningkatan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Rawa, Rawa dan Cengapan Air Lainnya yang Dapat Dusuhtukan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota					10.400.000,00		0,000.000,00		0,000.000,00		0,000.000,00		0,000.000,00				
Meningkatnya Peningkatan Penangkapan Ikan	Jumlah Unit Usaha yang Dibutuhkan Penyediaan Sarana Perikanan, Sarana Perikanan, Sarana Perikanan (Unit) (Unit)	-	0	-	10.400.000,00	-	0,000.000,00	-	0,000.000,00	-	0,000.000,00	-	0,000.000,00				
	Jumlah Kelompok Nelayan Ikan yang Dibutuhkan Peningkatan dan Pengembangan Keterampilan (Kelompok)	-	-	0		0		0		0		0					
	Jumlah Nelayan Ikan yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	00	00	00		00		00		00		00					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEBERATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN			
			2024		2025		2026		2027		2028		2029				2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU	
			(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Sarana dan Peralatan Pembentukan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
1.26.01.10.001- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00				
	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	50	50	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50			
1.26.01.10.002- Pelaksanaan Fasilitas Pembantuan dan Pengembangan Kemitraan Nelayan Kecil					24.200.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00				
	Terdapatnya Fasilitas Pembantuan dan Pengembangan Kemitraan Nelayan Kecil	1	-	5	24.200.000,00	5	25.000.000,00	5	27.000.000,00	5	29.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5			
1.26.01.10.003- Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pembinaan, Bantuan Pembinaan, Bantuan Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	Terdapatnya Fasilitas Bantuan Pembinaan, Bantuan Pembinaan, Bantuan Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	-	5	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
1.26.01.10.004- Peralaksanaan Sarana dan Peralatan Pembentukan Usaha Nelayan Skala Kecil					24.200.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00				
	Terdapatnya Sarana dan Peralatan Pembentukan Usaha Nelayan Skala Kecil	-	-	5	24.200.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5			
1.26.01.10- Peningkatan dan Peningenggaraan Tempat Perikanan Kuri (TP)					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	Terdapatnya dan Terpeliharanya Tempat Perikanan Kuri (TP)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00			
	Terdapatnya dan Terpeliharanya Jumlah SOP Peningkatan dan Peningenggaraan Tempat Perikanan Kuri (SOP) Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-			
1.26.01.10.001- Peningkatan dan Peningenggaraan Tempat Perikanan Kuri (TP)					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	Terlaksananya SOP Peningkatan dan Peningenggaraan Tempat Perikanan Kuri (SOP) Dokumen	1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00			

BIDANG/URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.21.01.000.000 - Peningkatan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman - RUM (70)					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	KAB. SUMEDANG		
Terdapatnya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman - RUM (70) Layanan	Jumlah layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pemakaman - RUM (70) Layanan	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
1.21.01.004 - Perawatan Tanah Datar Kapak Perikanan Berkurangnya sampai dengan 10 DT di Wilayah Sungai, Dataran Rendah, Rias, dan Derangan Air Lainnya yang Dapat Dituakikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
Ditertibkannya Tanah Datar Kapak Perikanan	Jumlah rekomendasi dan usaha yang dibutuhkan (Rekomendasi) Jumlah data dan informasi perencanaan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Database) Jumlah Perizinan dan Prosedur Perizinan dan Prosedur Perizinan Rekomendasi Perikanan Berusaha Perikanan Tangkap yang Merajal Kewenangan Kabupaten/Kota (Database) Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dibutuhkan (Rekomendasi) Jumlah Rekomendasi Tanah Datar Kapak Perikanan (Rekomendasi)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
1.21.01.004.000 - Peningkatan Penyelenggaraan dan Prosedur Perizinan Tanah Datar Kapak Perikanan Berkurangnya sampai dengan 10 DT					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	KAB. SUMEDANG		
Ditertibkannya Perizinan dan Prosedur Perizinan Rekomendasi Perikanan Berusaha Perikanan Tangkap yang Merajal Kewenangan Kabupaten/Kota (Database)	Jumlah Perizinan dan Prosedur Perizinan Rekomendasi Perikanan Berusaha Perikanan Tangkap yang Merajal Kewenangan Kabupaten/Kota (Database)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
1.21.01.004.000 - Peningkatan Perawatan Tanah Datar Kapak Perikanan Berkurangnya sampai dengan 10 DT					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	KAB. SUMEDANG		
Ditertibkannya Rekomendasi Tanah Datar Kapak Perikanan (Rekomendasi)	Jumlah Rekomendasi Tanah Datar Kapak Perikanan (Rekomendasi)	-	20	-	0,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	40.000.000,00			

BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT/ KEGATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PADU/INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET				PADU	
(25)	(25)	(25)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)
1.2.11.2.4.001 - Penyelesaian reklamasi Sungai Liris Usaha Perikanan (SULP)					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Diaktivasinya reklamasi Sungai Liris Usaha Perikanan (SULP)	Jumlah reklamasi Sungai Liris Usaha Perikanan (SULP) yang diaktifkan (Reklamasi)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
1.2.11.2.4.004 - Penyelesaian reklamasi lahan usaha perikanan lengkap					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Diaktivasinya reklamasi lahan usaha perikanan lengkap	Jumlah reklamasi lahan usaha yang diaktifkan (Reklamasi)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			
1.2.11.2.4.005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap					0,00		25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		31.000.000,00				KAB. SUMEDANG
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perikanan usaha perikanan lengkap yang tersedia (Dokumen)	-	-	-	0,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	29.000.000,00	1	31.000.000,00				
1.2.11.2.5 - Penyelesaian Pengadaan Kapal Perangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sesuai dengan 10 GT & Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan oleh 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota					0,00		20.000.000,00		11.000.000,00		10.000.000,00		6.000.000,00				
Diaktivasinya 100 Pengadaan Kapal Perangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	Jumlah Pengadaan dan Pelebaran Perbaikan Reklamasi Penyediaan Pengadaan Kapal Perangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Wilayah Kecamatan Kabupaten Kota (Dokumen)	-	-	-	0,00	1	20.000.000,00	-	11.000.000,00	-	10.000.000,00	-	6.000.000,00				
	Jumlah Reklamasi Penyediaan Pengadaan Kapal Perikanan (PPK) yang diaktifkan (Reklamasi)	-	-	-	20		20		20		20		20				
1.2.11.2.5.001 - Penyelesaian Pengadaan dan Pelebaran Perbaikan Penyediaan Pengadaan Kapal Perangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sesuai dengan 10 GT					0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG

BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU/INDIKATOR TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
Diadakannya Persiapan dan Prosedur Penelitian Rekomendasi Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan Non-Diri Kapal Pengangkut Ikan yang Mengalir Kawasan Kabupaten Kota (Kawakan)	Jumlah Persiapan dan Prosedur Penelitian Rekomendasi Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan Non-Diri Kapal Pengangkut Ikan yang Mengalir Kawasan Kabupaten Kota (Kawakan)	-	-	-	0,00	1	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
12C1234.001 - Penetapan Rekomendasi Soal Perakapan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)					0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		15.000.000,00		6.000.000,00				KAB. SUMEDANG
Diadakannya Rekomendasi Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Dihasilkan (Rekomendasi)	-	-	-	0,00	20	10.000.000,00	20	11.000.000,00	20	15.000.000,00	20	6.000.000,00				
12C1234 - Penilaian Kapal Perikanan Berukuran sedang dengan 10-20 yang beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan di Lahan yang Dapat Dituahkan-Gelam 1 (G1) Daerah Kabupaten Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Terbekahnya Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Dihasilkan (Rekomendasi)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
	Jumlah Persiapan dan Prosedur Penelitian Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Mengalir Kawasan Kabupaten Kota (Kawakan)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12C1234.001 - Penetapan Persiapan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Mesin sampai dengan 10-20					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Diadakannya Persiapan dan Prosedur Penelitian Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Mengalir Kawasan Kabupaten Kota (Kawakan)	Jumlah Persiapan dan Prosedur Penelitian Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Mengalir Kawasan Kabupaten Kota (Kawakan)	-	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
12C1234.001 - Penetapan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SUMEDANG
Diadakannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Dihasilkan (Rekomendasi)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
12C134 - PROGRAM PENYULUHAN PERIKANAN BUDUKAN					2.574.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.750.000.000,00		2.000.000.000,00				



BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KESKATAN / SUBKESKATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
125.6.2.01.001 - Peningkatan Perawatan dan Prosedur Perawatan di Uraha Perkotaan Bilang	Pembudayaan dan yang Urahnya Lulus, dan/atau Manfaat dan Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknik/Sebelumnya, Semi Internal dan Internal, serta Tidak Menggunakan Model Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				000		000		000		000		000			KAB. SUKAWATI	
125.6.2.01.002 - Pembinaan dan Rekomendasi Peningkatan dan Prosedur Perawatan di Uraha Perkotaan Bilang	Pembudayaan dan yang Urahnya Lulus, dan/atau Manfaat dan Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknik/Sebelumnya, Semi Internal dan Internal, serta Tidak Menggunakan Model Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				000		000		000		000		000			KAB. SUKAWATI	
125.6.2.01.003 - Peningkatan Perawatan di Uraha Perkotaan Bilang	Pembudayaan dan yang Urahnya Lulus, dan/atau Manfaat dan Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknik/Sebelumnya, Semi Internal dan Internal, serta Tidak Menggunakan Model Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				000		000		000		000		000			KAB. SUKAWATI	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAJU INDIKATOR TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN			
			2015		2016		2017		2018		2019		2020						
			TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET				PAJU		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.3.14.1.1 - Penyelesaian Tanda Daftar bag Pembuat Daya dan Kele (TOPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2' 000' 000,00				
Memptuaya Penyelesaian Tanda Daftar bag Pembuatnya dan Kele	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bag Pembuat Daya dan Kele yang Melayak Kesempatan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	2' 000' 000,00				
	Jumlah Rekomendasi Penyediaan dan Persepsi Perizinan Berusaha Status Milik dan Kele bag Pembuatnya dan Kele dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Dilayani (Rekomendasi)												1						
1.3.14.1.1.001 - Pelayanan Penyediaan dan Persepsi Penyelesaian Tanda Daftar bag Pembuatnya dan Kele (TOPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7' 000' 000,00		KAB. SUMEDANG		
1.3.14.1.1.002 - Pelayanan Rekomendasi Penyediaan dan Persepsi Perizinan Berusaha Status Milik dan Kele bag Pembuatnya dan Kele dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Penyediaan dan Persepsi Perizinan Berusaha Status Milik dan Kele bag Pembuatnya dan Kele dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Dilayani (Rekomendasi)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	7' 000' 000,00				
1.3.14.1.1.003 - Pelayanan Penyelesaian Tanda Daftar bag Pembuat Daya dan Kele (TOPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6' 000' 000,00		KAB. SUMEDANG		
1.3.14.1.1.004 - Pelayanan Rekomendasi Perizinan Berusaha bag Pembuat Daya dan Kele yang Melayak Kesempatan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bag Pembuat Daya dan Kele yang Melayak Kesempatan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	6' 000' 000,00				
1.3.14.1.1.005 - Pelayanan Rekomendasi Perizinan Berusaha bag Pembuat Daya dan Kele yang Melayak Kesempatan Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6' 000' 000,00		KAB. SUMEDANG		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PASU INDIKATOR TAHUN												PERANGKAT CERAK	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	THARGET	PASU	TARGET	PASU	THARGET	PASU	THARGET	PASU	TARGET	PASU				
(J1)	(J2)	(J3)	(J4)	(J5)	(J6)	(J7)	(J8)	(J9)	(J10)	(J11)	(J12)	(J13)	(J14)	(J15)	(J16)	(J17)	
1.26.34.2.04.001- Pengadaan Data dan Informasi Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota)					0,00		0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00				
Terdapat Data dan Informasi Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota)	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota) (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	+	30.000.000,00	+	30.000.000,00	+	40.000.000,00	+			
1.26.34.2.04.002- Pengadaan Peralatan Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota)					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		113.000.000,00		166.000.000,00				
Terdapat Peralatan Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota)	Jumlah Peralatan Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota) (Unit)	-	+	+	60.000.000,00	+	60.000.000,00	+	60.000.000,00	+	113.000.000,00	+	166.000.000,00	+			
1.26.34.2.04.003- Pengadaan Kesehatan dan Lingkungan Budekaya dalam 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota)					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00				
Terdapat Realisasi dan Lingkungan Budekaya dalam 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota) yang Terjadi Melalui Pengadaan Kesehatan dan Lingkungan Budekaya (Dokumen)	Jumlah Realisasi dan Lingkungan Budekaya dalam 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota) yang Terjadi Melalui Pengadaan Kesehatan dan Lingkungan Budekaya (Dokumen)	+	+	+	60.000.000,00	+	60.000.000,00	+	60.000.000,00	+	60.000.000,00	+	60.000.000,00	+			
1.26.34.2.04.004- Meningkatkan Kesehatan dan Lingkungan Budekaya dalam 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota)					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00				
Terdapat Kesehatan dan Lingkungan Budekaya dalam 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota)	Tingkat Realisasi peningkatan kesehatan dan lingkungan budekaya dalam 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota) (Dokumen)	-	-	U	30.000.000,00	U	30.000.000,00	U	30.000.000,00	U	30.000.000,00	U	30.000.000,00	U			
1.26.34.2.04.005- Pengadaan Ketersediaan Sarana Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota)					2.349.940.000,00		2.349.940.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.900.000.000,00				
Terdapat Sarana Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota)	Jumlah Sarana Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota) (Unit)	60	25	30	2.349.940.000,00	30	2.349.940.000,00	30	2.400.000.000,00	30	2.400.000.000,00	30	2.900.000.000,00	30			
1.26.34.2.04.010- Peningkatan Pemantauan Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota)					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Terdapat Pemantauan Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota)	Jumlah Pemantauan yang Mendapatkan Peningkatan dan Pemantauan Pembangunan dan Sistem 1 (Data/Dasar Kabupaten/Kota) (Unit)	+	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU BOKUPF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027			
Uraha pemetaan hasil pemetaan dan/atau uraha penggabungan hasil pemetaan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota yang sesuai	Jumlah uraha pemetaan dan/atau uraha penggabungan hasil pemetaan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota (tahun)	-	-	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00				
1.2.3.1.1.1.001 Pengembangan uraha penggabungan dan/atau uraha penggabungan hasil pemetaan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota					60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		KAB. SUMEDHARA		
Uraha Penggabungan dan/atau uraha Penggabungan hasil pemetaan dan/atau uraha penggabungan hasil pemetaan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota yang sesuai	Jumlah uraha pemetaan dan/atau uraha penggabungan hasil pemetaan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota (tahun)	6	6	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	26	70.000.000,00	26	70.000.000,00	30	70.000.000,00				
1.2.3.1.1.1.002 Pengelolaan Kapas Pengisian Perikanan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDHARA		
Kapas Pengisian Perikanan yang Berkualitas	Jumlah Kapas Pengisian Perikanan yang Berkualitas (ton)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.2.3.1.1.1.003 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengisian sumber ikan perikanan					0,00		5.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SUMEDHARA		
Sumber Daya Manusia Pengisian Sumber daya perikanan yang Berkualitas (orang)	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengisian Sumber daya perikanan yang Berkualitas (orang)	-	-	-	0,00	1	5.000.000,00	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00	30	20.000.000,00				
1.2.3.1.1.1.004 Pengembangan perikanan skala administratif/lingkang perikanan dan Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDHARA		
Perikanan skala administratif/lingkang perikanan yang memiliki dan Kabupaten/Kota yang terencana (Perikanan)	Jumlah perikanan skala administratif/lingkang perikanan yang memiliki dan Kabupaten/Kota yang terencana (Perikanan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.2.3.1.1.1.005 Peningkatan Pemasaran Pengisian Sumber Daya Perikanan					0,00		0,00		0,00		30.000.000,00		100.000.000,00		KAB. SUMEDHARA		
Pemasaran Pengisian Sumber Daya Perikanan yang Berkualitas (ton)	Jumlah Pemasaran Pengisian Sumber Daya Perikanan yang Berkualitas (ton)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	30.000.000,00	1	100.000.000,00				
1.2.3.1.1.1.006 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Perikanan dan Pemasaran Hasil Perikanan					75.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00				
Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Perikanan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah dan Kualitas Perikanan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	6,47	7,91	8,79	75.000.000,00	9,11	100.000.000,00	9,76	150.000.000,00	10,30	175.000.000,00	11,00	200.000.000,00	1.2.3.1.1.1.001-06 - Dana Perikanan dan Pemasaran			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PADU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2015		2016		2017		2018		2019					2020	
			TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU				TARGET	PADU
1204231 - Peningkatan Tersedia Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil)					0,00		0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00				
Meningkatnya Tersedia Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Dihasilkan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Peringkat Perikanan dan Perikanan Perikanan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha (Sudut lain Jasa Pemasaran Penangkapan Ikan yang Berusaha Dokumentasi) Jumlah rekomendasi perikanan berusaha sesuai dengan standar usaha fishing Pengolahan dan Perikanan Hasil Perikanan berproduksi mulai usaha dan tingkat nilai (Rekomendasi) Jumlah Rekomendasi Perikanan Berusaha Penyangga Bidang Pengolahan dan Perikanan Hasil Perikanan (Rekomendasi) Jumlah Usaha dan Informasi Usaha Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan berproduksi mulai usaha dan nilai (Dokumen)				0,00		0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00				
1204231 001 - Peningkatan Perikanan dan Perikanan Perikanan Berusaha Perikanan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Sudut lain Jasa Pemasaran Penangkapan Ikan (Skala Mikro dan Kecil) dengan Perikanan Modal Dalam Negeri					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			RAB SUMEDANG	
Terdapatnya sejumlah peningkatan dan produksi perikanan Perikanan Berusaha (Sudut lain Jasa Pemasaran Penangkapan Ikan (Skala Mikro dan Kecil) dengan Perikanan Modal Dalam Negeri	Perikanan Perikanan dan Perikanan Perikanan Perikanan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha (Sudut lain Jasa Pemasaran Penangkapan Ikan yang Berusaha Dokumentasi)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1204231 003 - Peningkatan Rekomendasi Perikanan Berusaha Penyangga Bidang Pengolahan dan Perikanan Hasil Perikanan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			RAB SUMEDANG	

BIKANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PADU BIKANGIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN			
			2025		2026		2027		2028		2029					2030		
			TARGET	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET				PADU		
(00)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Diinkubasinya Sistemisasi Perencanaan Berusaha/Perungging Bidang Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan	Jumlah Tokoh Kunci Perencanaan Berusaha/Perungging Bidang Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan (Rekomendasi)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
135.362.01.0004. Pelaksanaan verifikasi rencana berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan berdasarkan data usaha dan tingkat risiko					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDANG	
Terdikawatirnya verifikasi rencana berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan berdasarkan data usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi rencana berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan berdasarkan data usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
135.362.01.0005. Penyelidikan Data dan Informasi Usaha Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan skala 1 (data/Desain Kabupaten/Kota berdasarkan data usaha dan risiko)					0,00		0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terseleksi Data dan Informasi Usaha Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan data usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan data usaha dan risiko (dokumen)	1	-	-	0,00	-	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
135.362.01.0006. Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Skala Mikro dan Kecil					75.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00			
Meningkatnya Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan/dukungan Peningkatan Perencanaan Perencanaan Berusaha/Padu Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan sesuai data usaha dan Risiko (Unit usaha)	10	15	20	75.000.000,00	25	90.000.000,00	30	90.000.000,00	35	90.000.000,00	40	90.000.000,00	45	90.000.000,00			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU NOKRAF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.25.30.30.001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengurusan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan sesuai Standar Usaha dan Risiko					75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		KAB. SUMEDANG		
Terdapatnya peningkatan kualitas Pelayanan Pengurusan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan sesuai Standar Usaha dan Risiko	Jumlah Uji Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan yang mendapatkan peningkatan kualitas Pelayanan Pengurusan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan sesuai Standar Usaha dan Risiko (Uji Usaha)	0	15	25	75.000.000,00	25	80.000.000,00	30	85.000.000,00	35	90.000.000,00	40	95.000.000,00				
1.25.30.30.002 - Peningkatan dan Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan dan Jasa (Jasa) Daerah Kabupaten Kota					0,00		20.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00				
Menyediakan Penyediaan dan Penyediaan dan untuk Bahan Baku Industri Pengolahan dan Jasa	Jumlah Pokok Usaha Perikanan, Suku Melayu dan Kaid dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terlokasi (Pokok Usaha)	-	-	-	0,00	-	20.000.000,00	5	40.000.000,00	5	60.000.000,00	5	80.000.000,00				
	Jumlah Perizinan Ketersediaan dan untuk Perizinan dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
1.25.30.30.003 - Peningkatan Ketersediaan dan untuk Koneksi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00		20.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		KAB. SUMEDANG		
Menyediakan Ketersediaan dan untuk Koneksi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan Ketersediaan dan untuk Koneksi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	1,000	20.000.000,00	1,000	40.000.000,00	1,000	60.000.000,00	1,000	80.000.000,00				
1.25.30.30.004 - Peningkatan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Suku Melayu dan Kaid dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		KAB. SUMEDANG		
Terdapatnya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Suku Melayu dan Kaid dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokok Usaha Perikanan, Suku Melayu dan Kaid dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terlokasi (Pokok Usaha)	-	-	-	0,00	-	0,00	5	10.000.000,00	5	20.000.000,00	5	30.000.000,00				

BIDANG/URUSAN/ PROGRAM / OUTPUT KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PERANGKAT SERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
071	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	
1.27.01.01.01.01 PENGUSAHA (DARI RUMAH KUNYU)					15.400.000.000,00		16.000.000.000,00		16.600.000.000,00		17.200.000.000,00		17.800.000.000,00				
1.27.01.01.01.02 PENGUSAHA DARI PEKERJABANGSA/UMUM PEKERJABANGSA					11.900.000.000,00		11.900.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00				
Meningkatnya Persepsi Sosial	Penggunaan/Peserta Sosial (%)	1,75	6,00	6,64	11.900.000.000,00	6,00	11.900.000.000,00	6,00	12.000.000.000,00	6,00	12.000.000.000,00	10,20	12.000.000.000,00	10,20	12.000.000.000,00	12,00	12.000.000.000,00
1.27.01.01.01.01.01 Penggunaan/Peserta Sosial					11.900.000,00		11.900.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00				
Meningkatnya Penggunaan/Peserta Sosial	Jumlah Penggunaan/Peserta Sosial dengan Kemudahan, Tersedia dan Spesifik Lokasi (Laporan)	-	1	1	11.900.000,00	1	11.900.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00
	Jumlah Pendampingan Penggunaan/Peserta Sosial (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		1			
1.27.01.01.01.01.02 Penggunaan/Peserta Sosial					24.075.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		
Meningkatnya Penggunaan/Peserta Sosial	Jumlah Penggunaan/Peserta Sosial dengan Kemudahan, Tersedia dan Spesifik Lokasi (Laporan)	-	1	1	24.075.000,00	1	25.000.000,00	1	26.000.000,00	1	27.000.000,00	1	28.000.000,00	1	28.000.000,00		
1.27.01.01.01.01.03 Pendampingan Penggunaan/Peserta Sosial					107.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Pendampingan Penggunaan/Peserta Sosial	Jumlah Pendampingan Penggunaan/Peserta Sosial (Laporan)	1	1	1	107.000.000,00	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.27.01.01.01.01.04 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat, Pemberdayaan, dan Monev (Organisasi Masyarakat, Koperasi/Kota)					30.000.000,00		30.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		
Meningkatnya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat (Laporan)	-	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	37.000.000,00	-	38.000.000,00	-	38.000.000,00	-	38.000.000,00		
	Jumlah Peningkatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah SDM Masyarakat yang dibekali keterampilan dan pengetahuan (Laporan)	-	-	-		-		-		-		-		-			
1.27.01.01.01.01.05 Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat					30.000.000,00		30.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(Y1)	(Y2)	(Y3)	(Y4)	(Y5)	(Y6)	(Y7)	(Y8)	(Y9)	(Y10)	(Y11)	(Y12)	(Y13)	(Y14)	(Y15)	(Y16)		
Meningkatkan Kualitas SDG Hewai/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Kualitas SDG Hewai/Tanaman (Dokumen)	0	0	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	37.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00				
137/2024/885 - Pemerkakan SDG Hewai/Tanaman					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDANG		
Tamapkukannya SDG Hewai/Tanaman	Jumlah Pemerkakan SDG Hewai/Tanaman (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
137/2024/886 - Pengeraman Komunitas dan Kelembagaan SDG Hewai					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDANG		
Tertampilnya komunitas dan kelembagaan SDG Hewai	Jumlah SDG Hewai yang dilakukan sosialisasi dan penerangan (Seminar)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
137/2024/887 - Pengeraman Mula dan Pembedaan Berbasis Sifat Tanah dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00				
Meningkatkan Mula dan Pembedaan Berbasis Sifat Tanah dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Jumlah Pengeraman Bahan Pakan Pakan Berbasis Sifat/Spesies Pakan Ternak yang Berbasis (Laporan)	-	-	-	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00				
	Jumlah Pengeraman Mula Berbasis Sifat Tanah Pakan/Pakan Tanaman Sifat Rend (Laporan)	-	-	-		1		1		1		1					
137/2024/888 - Pengeraman Mula Berbasis Sifat Tanah Sifat Pakan/Pakan Tanaman Sifat Rend					0,00		20.000.000,00		21.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SUMEDANG		
Tertampilnya Mula Berbasis Sifat Tanah Sifat Pakan/Pakan Tanaman Sifat Rend	Jumlah Pengeraman Mula Berbasis Sifat Tanah Sifat Pakan/Pakan Tanaman Sifat Rend (Laporan)	-	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00				
137/2024/889 - Pengeraman Pembedaan Bahan Pakan/Pakan Berbasis Sifat/Spesies Pakan Ternak					0,00		20.000.000,00		21.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SUMEDANG		
Tertampilnya Pembedaan Bahan Pakan/Pakan Berbasis Sifat/Spesies Pakan Ternak	Jumlah Pengeraman Bahan Pakan/Pakan Berbasis Sifat/Spesies Pakan Ternak yang Berbasis (Laporan)	-	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00				
137/2024/890 - Pengeraman Obat Hewai di Tingkat Pengeram					0,00		10.000.000,00		14.000.000,00		17.000.000,00		10.000.000,00				
Tertampilnya Obat Hewai di Tingkat Pengeram	Jumlah Pemerkakan Mula Maksimal dan Kelembagaan Obat Hewai yang Berbasis (Laporan)	-	-	-	0,00	1	10.000.000,00	1	14.000.000,00	1	17.000.000,00	1	10.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2014	TARGET DAN PADU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETURANGAN		
			2015		2016		2017		2018		2019					2020	
			TARGET	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET				PADU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Penyempurnaan Persewaan dan Persewaan Otak Hewan yang Sirkul (Kumulatif)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1270210001	Perbaikan Mutu, Khasul dan Keamanan Persewaan Otak Hewan				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		KAB. SUMEDANG		
	Terdapatnya Mutu, Khasul dan Keamanan (Otak Hewan yang Sirkul (Laporan)	-	-	-	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	18.000.000,00				
1270210002	Pemeliharaan dan Penyempurnaan Persewaan dan Persewaan Otak Hewan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDANG		
	Terdapatnya Pemeliharaan dan Penyempurnaan Persewaan dan Persewaan Otak Hewan	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1270210003	Pengendalian dan Pengawasan Persewaan dan Persewaan Berhulu Tembak dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00				
	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Persewaan dan Persewaan Berhulu Tembak dan Hewan Pakan Ternak	-	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00				
	Jumlah berhulu tembak dan hewan pakan ternak yang berhulu tembak	-	-	-		1		1		1		1					
	Jumlah berhulu tembak yang berhulu tembak (Laporan)	-	-	-		1		1		1		1					
	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	-	-	-	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
	Jumlah pengendalian dan pengawasan berhulu tembak yang berhulu tembak dan berhulu tembak (Laporan)	-	-	-	1		1		1		1		1				
	Jumlah Pengawasan Mutu Berhulu Tembak dan Hewan Pakan Ternak (Laporan)	-	-	-	1		1		1		1		1				
1270210004	Pengawasan Mutu Berhulu Tembak				0,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		KAB. SUMEDANG		
	Terdapatnya Pengawasan Mutu Berhulu Tembak	-	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00				
1270210005	Pengawasan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan				0,00		30.000.000,00		31.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		KAB. SUMEDANG		
	Terdapatnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	-	-	-	0,00	1.000	30.000.000,00	1.000	31.000.000,00	1.000	32.000.000,00	1.000	33.000.000,00				

BIDANG/URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGATAMAN / SUBSIDIARAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
127.02.23.000 - Pengawasan Produk Berhambit Tembak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan					0,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		KAB SUMEDANG		
Tersedianya Produk Berhambit Tembak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Amplitud Pengawasan Produk Berhambit Tembak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Lapangan)	-	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00				
127.02.23.001 - Pengawasan Peredaran dan Sirkulasi Berhambit Tembak					0,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		KAB SUMEDANG		
Tersedianya pendataan dan sirkulasi berhambit tembak	Amplitud pengawasan pendataan berhambit tembak yang beredar dan bersirkulasi (Lapangan)	-	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00				
127.02.23.004 - Pengawasan Peredaran Berhambit Tembak					0,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		KAB SUMEDANG		
Tersedianya pendataan dan sirkulasi berhambit tembak yang beredar (Lapangan)	Amplitud berhambit tembak yang beredar (Lapangan)	-	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00				
127.02.23.005 - Pengawasan Peredaran Berhambit Tembak dan Hujan Pakan Tembak					0,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		KAB SUMEDANG		
Tersedianya pengawasan berhambit tembak dan hujan pakan tembak	Amplitud berhambit tembak dan hujan pakan tembak yang beredar (Lapangan)	-	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00				
127.02.23.006 - Pengawasan Berhambit Tembak dan Hujan Pakan Tembak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					0.985.426.205,00		11.114.000.000,00		11.008.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00				
Meningkatnya Penyediaan Bahan, Obat Tembak dan Hujan Pakan Tembak	Amplitud bahan tembak yang sumbarnya dari daerah kabupaten/kota lain (Daerah) Amplitud Hujan Pakan Tembak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton) Amplitud Obat tembak yang sumbarnya dari daerah kabupaten/kota lain (Daerah)	-	1.500	3.000	0.985.426.205,00	0.000	11.114.000.000,00	0.000	11.008.000.000,00	0.000	12.000.000.000,00	0.000	12.000.000.000,00				
		-	-	-		100.000		100.000		100.000		100.000					
		12.498	1.701	4.300		4.300		4.300		4.300		4.300					
127.02.23.007 - Pengawasan Hujan Pakan Tembak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					0,00		60.000.000,00		64.250.000,00		71.042.000,00		75.240.425,00		KAB SUMEDANG		
Tersedianya Hujan/Pakan Tembak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	Amplitud Hujan Pakan Tembak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	-	-	-	0,00	100.000	60.000.000,00	100.000	64.250.000,00	100.000	71.042.000,00	100.000	75.240.425,00				
127.02.23.008 - Pengawasan Obat Tembak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					0.702.236.174,00		0.700.000.000,00		11.234.750.000,00		11.710.107.000,00		12.186.754.375,00		KAB SUMEDANG		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PASU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2026		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU				
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terdapatnya total tanah yang subur di daerah Kabupaten/Kota (Tanah)	Jumlah total tanah yang subur di daerah Kabupaten/Kota (Tanah)	12.438	1.701	4.300	10.702.226.175,00	4.300	10.702.000.000,00	4.300	11.234.750.000,00	4.300	11.710.227.000,00	4.300	12.188.754.375,00				
1.27.02.3.04.004 - Penguatan Tanah Subur yang Subur di Daerah Kabupaten/Kota Lain					203.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		KAB SUNDEWAJ		
Terdapatnya tanah subur yang subur di daerah Kabupaten/Kota (Tanah)	Jumlah tanah subur yang subur di daerah Kabupaten/Kota (Tanah)	-	1.500	0.000	203.000.000,00	0.000	200.000.000,00	0.000	200.000.000,00	0.000	300.000.000,00	0.000	300.000.000,00				
1.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMERAWATAN PERALATAN/PELENGKAPAN					1.000.004.700,00		4.000.000.000,00		1.000.000.000,00		8.100.700.000,00		8.300.300.000,00				
Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Peralatan Pertanian	Peningkatan jumlah atau Peralatan yang tersedia dan Dibandingkan (%)	21,71	30,52	7,30	1.000.004.700,00	30,83	4.000.000.000,00	33,13	1.000.000.000,00	70,20	8.100.700.000,00	100	8.300.300.000,00	1,25 3 27 0,00 01:00 30 - Otonomi Peningkatan dan Peralatan			
1.27.02.3.01 - Pengembangan Peralatan Pertanian					30.000.000,00		400.000.000,00		311.000.000,00		542.400.000,00		370.073.000,00				
Meningkatnya Peralatan Pertanian yang Dibandingkan	Jumlah A/S/Alat Peralatan Pertanian, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	-	-	-	30.000.000,00	1	400.000.000,00	-	311.000.000,00	-	542.400.000,00	-	370.073.000,00				
	Jumlah Kebutuhan dan Sistemasi Peralatan Pertanian Lainnya (Lampiran)	-	-	1		1		1		1		1					
	Jumlah peralatan pertanian yang dibandarkan dan dibandarkan (Lampiran)	-	-	-		1		1		1		1					
1.27.02.3.07.001 - Kebutuhan dan Sistemasi Peralatan Pertanian Lainnya					30.000.000,00		33.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		KAB SUNDEWAJ		
Terdapatnya/Kebutuhan dan Sistemasi Peralatan Pertanian Lainnya	Jumlah Kebutuhan dan Sistemasi Peralatan Pertanian Lainnya (Lampiran)	-	-	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00				
1.27.02.3.07.008 - Peralatan dan Peralatan Peralatan Pertanian					0,00		200.000.000,00		270.000.000,00		302.000.000,00		302.750.000,00		KAB SUNDEWAJ		
Terdapatnya dan Tersedianya peralatan yang dibandarkan dan dibandarkan (Lampiran)	Jumlah peralatan pertanian yang dibandarkan dan dibandarkan (Lampiran)	-	-	-	0,00	1	200.000.000,00	1	270.000.000,00	1	302.000.000,00	1	302.750.000,00				
1.27.02.3.07.007 - Peralatan A/S/Alat Peralatan Pertanian, Sarana, Kawasan Pertanian					0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		KAB SUNDEWAJ		
Terdapatnya A/S/Alat Peralatan Pertanian, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah A/S/Alat Peralatan Pertanian, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	-	-	-	0,00	1	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PROJEKSI RENCANA										PERANGKAT CERAK	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PROJ	TARGET	PROJ	TARGET	PROJ	TARGET	PROJ	TARGET				PROJ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terdapat, terakreditasi dan terakreditasi Provisi dan Pelayanan Lainnya	Jumlah Provisi dan Pelayanan yang dibangun (diakreditasi dan diaktifkan) (134)	0	-	-	0,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00				
1.27.01.100.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Baja Besi					0,00		20.000.000,00		275.000.000,00		302.000.000,00		302.700.000,00				KAB. SIAK (SIAK)
terakreditasi dan terakreditasi dengan tingkat keakreditasi	Jumlah jembatan baja besi yang diaktifkan (134)	-	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	275.000.000,00	1	302.000.000,00	1	302.700.000,00				
1.27.01.100.0010 - Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembinaan/Produk Ternak					0,00		20.000.000,00		275.000.000,00		302.000.000,00		302.700.000,00				KAB. SIAK (SIAK)
Terdapatnya dan terakreditasi sarana dan prasarana UPTD Pembinaan/Produk Ternak	Jumlah Provisi unit UPTD Pembinaan/Produk Ternak yang dibangun dan diaktifkan (134)	-	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	275.000.000,00	1	302.000.000,00	1	302.700.000,00				
1.27.01.100.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Lainnya					0,00		20.000.000,00		0,00		0,00		0,00				KAB. SIAK (SIAK)
Terdapat, terakreditasi dan terakreditasi Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Lainnya	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Lainnya yang dibangun, diaktifkan dan diaktifkan (134)	-	-	-	0,00	1	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
1.27.01.100.0010 - Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inspeksi Sapi					0,00		30.000.000,00		385.000.000,00		421.000.000,00		451.000.000,00				KAB. SIAK (SIAK)
Terdapatnya dan terakreditasi sarana dan prasarana UPTD Balai Inspeksi Sapi	Jumlah Provisi unit UPTD IS yang dibangun dan diaktifkan (134)	-	-	-	0,00	1	30.000.000,00	1	385.000.000,00	1	421.000.000,00	1	451.000.000,00				
1.27.01.100.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan operasional Fasilitas					0,00		30.000.000,00		385.000.000,00		421.000.000,00		451.000.000,00				KAB. SIAK (SIAK)
Terdapat, terakreditasi, terakreditasi dan terakreditasi Fasilitas	Jumlah Fasilitas yang dibangun, diaktifkan dan diaktifkan (134)	-	-	-	0,00	1	30.000.000,00	1	385.000.000,00	1	421.000.000,00	1	451.000.000,00				
1.27.01.100.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan operasional Rumah Peningkatan					1.402.004.750,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00				KAB. SIAK (SIAK)
Terdapat, terakreditasi, terakreditasi dan terakreditasi Rumah Peningkatan	Jumlah rumah peningkatan yang dibangun, diaktifkan dan diaktifkan (134)	1	1	1	1.402.004.750,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMPOK OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAJU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.27.01.01 - Peningkatan Wilayah Sumber Biot Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten Kota					0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00				
Meningkatnya Wilayah Sumber Biot Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Didukung dan Dikelola (Laporan)	Jumlah Wilayah Sumber Biot Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Didukung dan Dikelola (Laporan)	-	-	-	0,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1			
	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Biot Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	-	-	-	0,00	1		1		1		1		1			
1.27.01.01.001 - Pemeliharaan dan Pemantauan Wilayah Sumber Biot Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					0,00		30.250.000,00		30.275.000,00		36.400.000,00		40.200.750,00			KAB. SIAK (2044)	
Tertertibnya Pelaksanaan dan Pemantauan Wilayah Sumber Biot Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Biot Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Didukung dan Dikelola (Laporan)	-	-	-	0,00	1	30.250.000,00	1	30.275.000,00	1	36.400.000,00	1	40.200.750,00	1			
1.27.01.01.002 - Peningkatan Wilayah Sumber Biot Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					0,00		30.250.000,00		30.275.000,00		36.400.000,00		40.200.750,00			KAB. SIAK (2044)	
Tertertibnya Wilayah Sumber Biot Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Biot Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	-	-	-	0,00	1	30.250.000,00	1	30.275.000,00	1	36.400.000,00	1	40.200.750,00	1			
1.27.01.04 - Pengembangan Lahan Pengembalian Urus					60.000.000,00		70.000.000,00		101.000.000,00		102.000.000,00		96.410.000,00				
Meningkatnya Lahan Pengembalian Urus yang Dikelola	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Lahan Pengembalian Urus (Laporan)	-	-	-	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	101.000.000,00	1	102.000.000,00	1	96.410.000,00	1			
	Lahan Lahan Pengembalian Urus yang Didukung dan Dikelola (Laporan)	1,48	0,01	1,28		1,4		1,04		1,7		1,87					
	Lahan Lahan Pengembalian Urus yang Didukung dan Dikelola (Laporan)	-	-	-		2		2		2		2					
1.27.01.04.001 - Pemeliharaan dan Pemantauan Lahan Pengembalian Urus					0,00		20.000.000,00		24.200.000,00		29.400.000,00		20.000.000,00			KAB. SIAK (2044)	
Tertertibnya dan Dikelolanya Lahan Pengembalian Urus	Lahan Lahan Pengembalian Urus yang Didukung dan Dikelola (Laporan)	-	-	-	0,00	2	20.000.000,00	2	24.200.000,00	2	29.400.000,00	2	20.000.000,00	2			
1.27.01.04.002 - Peningkatan Lahan Pengembalian Urus					60.000.000,00		60.000.000,00		77.000.000,00		79.000.000,00		87.000.000,00			KAB. SIAK (2044)	
Tertertibnya Lahan Pengembalian Urus	Lahan Lahan Pengembalian Urus yang Didukung dan Dikelola (Laporan)	1,48	0,01	1,28	60.000.000,00	1,4	60.000.000,00	1,04	70.000.000,00	1,7	79.000.000,00	1,87	87.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PASU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN			
			2025		2026		2027		2028		2029					2030		
			TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU				TARGET	PASU	
(T1)	(T2)	(T3)	(T4)	(T5)	(T6)	(T7)	(T8)	(T9)	(T10)	(T11)	(T12)	(T13)	(T14)	(T15)	(T16)	(T17)		
Tertertanya kader posyandu	Jumlah kader posyandu (orang)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
527 04 201 006 - Pelaksanaan Survei Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan					0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			KAB. SLEMAN
Tertertanya pemangku posyandu hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan survei dan posyandu pada Hewan (Desa)	-	-	-	0,00	26	15.000.000,00	26	15.000.000,00	26	15.000.000,00	26	20.000.000,00	26	20.000.000,00			
527 04 201 006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SLEMAN
Tertertanya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang diteliti/diidentifikasi dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Desa)	-	-	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00			
527 04 201 007 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SLEMAN
Tertertanya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status pemenuhan (Desa)	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Desa)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
527 04 201 008 - Pemantauan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					332.676.750,00		365.000.000,00		395.500.000,00		425.000.000,00		457.000.000,00		487.000.000,00			KAB. SLEMAN
Menurutnya tidak terjadi wabah penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang terdapat penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1	332.676.750,00	1	365.000.000,00	1	395.500.000,00	1	425.000.000,00	1	457.000.000,00	1	487.000.000,00			
527 04 201 - Penguatan Pemantauan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00			
Meningkatnya/terwujudnya dan Penguatan Hewan dan Produk Hewan yang Tersebut	Jumlah penguatan pemantauan/pengawasan oleh unit-unit pemantauan dan/atau pengawasan (KMD Daerah)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	17.000.000,00	-	17.000.000,00			
	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan zoonosis pada media pembawa penyakit hewan ternak (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah kegiatan pengujian/pemeriksaan produk hewan (Laporan)	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAJU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PAJU	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU				TARGET	PAJU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Uraian pengembang dan pemeliharaan fasilitas IFM & Perbaikan Tempat Pemukiman IFM (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
137 561 01 0004	Pengawasan dan Pemertajuan Persebaran Salmi untuk Pemukiman Garis-Batas Pengkualan-Nenas, Produk Nenas dan Media Perbaikan Persebaran Nenas Lainnya (IFM)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIAK		
	Terdapatnya pemertajuan persebaran Salmi untuk pemukiman Garis-Batas pengkualan IFM	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
137 561 01 0005	Pengawasan Persebaran Produk Nenas				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIAK		
	Terdapatnya pengawasan persebaran produk nenas	-	-	-	0,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00				
137 561 01 0006	Pengawasan dan Pemertajuan Kesehatan Nenas, Produk Nenas dan Media Perbaikan Persebaran Nenas Lainnya (IFM) & Perbaikan Tempat Pemukiman IFM				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIAK		
	Terdapat dan terpeliharanya fasilitas IFM & Perbaikan Tempat Pemukiman IFM (Laporan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
137 561 01 0007	Analisis Risiko Penyakit Nenas, Anemon, produk nenas dan media perbaikan penyakit nenas lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIAK		
	Terdapatnya Risiko Penyakit Nenas, anemon, produk nenas dan media perbaikan penyakit nenas lainnya (Laporan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
137 561 01 0008	Pengawasan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Mutu Internal dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	Terdapatnya Pengawasan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Mutu Internal	-	-	-	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00				
	Uraian Pelayanan Jasa Mutu Internal (Laporan)	1	0	0		0		0		0		0					
137 561 01 0009	Pemertajuan Pelayanan Jasa Laboratorium				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIAK		

BIDANG/URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT SAHABAT	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terdapatnya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (1 appointment)	-	-	-	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00				
U17M201900 - Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					47.500.000,00		47.500.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		81.000.000,00			KAB. SUMEDANG	
Terdapatnya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (1 appointment)	0	0	0	47.500.000,00	0	47.500.000,00	0	70.000.000,00	0	75.000.000,00	0	81.000.000,00				
U17M2104 - Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Tereapi Kesehatan Masyarakat Veteriner					70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00				
Meningkatnya/Perbaikan dan Pengembangan Pelayanan Tereapi Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dilulus untuk penerapan persyaratan hygiene standar (Jah/Usaha)	25	25	25	70.000.000,00	25	80.000.000,00	25	90.000.000,00	25	90.000.000,00	25	90.000.000,00				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhdap kesehatan dan keselamatan hewan (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Jumlah Pengembangan Fasilitas Hewan dan Produk Hewan (1 appointment)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Jumlah Petugas Tereapi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Keselamatan Hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	30	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-				
	Jumlah produk hewan yang telah dilulus yang memenuhi persyaratan hygiene produk hewan (Produk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Jumlah Rekomendasi Perbaikan dan Penguasaan, Bertindak Hewan dan Industri/Usaha (Dokumen)	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Jumlah unit usaha produk hewan yang dilulus terhdap penerapan cara yang baik (Jah/Usaha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
U17M2104 000 - Pengembangan Fasilitas Hewan dan Produk Hewan					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			KAB. SUMEDANG	
Terdapatnya Fasilitas Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengembangan Fasilitas Hewan dan Produk Hewan (1 appointment)	0	0	0	25.000.000,00	0	25.000.000,00	0	25.000.000,00	0	25.000.000,00	0	25.000.000,00				



BIDANG/URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PADU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET				PADU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tertahunnya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemerintah Kecamatan kegiatan Pradik. fesyen yang sustainable	Jumlah pradik.fesyen yang berkembang yang memenuhi persyaratan kegiatan pradik.fesyen (Pradik)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.27.04.204.0010 - Pengawasan Unit Usaha Pradik Fesyen					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	KAB SUKSES	
Tertahunnya pengawasan pada unit usaha pradik.fesyen	Jumlah unit usaha pradik.fesyen yang dinasui terdapat persyaratan unit.us yang baik (Unit Usaha)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.27.04.205 - Pengawasan dan Pengawasan Penyertaan Ternak Keagungan Fesyen					0,00		7.500.000,00		7.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Menyediakan/Pengawasan dan Pengawasan Penyertaan Ternak Keagungan Fesyen	Jumlah Kasus Pelanggaran Keagungan Fesyen yang (Berang. Hewan) Jumlah unit usaha yang dinasui terdapat persyaratan keagungan fesyen (Unit)	-	-	-	0,00	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	8.500.000,00	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00		
1.27.04.206.0010 Pengawasan dan Pelanggaran Keagungan Fesyen Ternak Keagungan Fesyen					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	KAB SUKSES	
Tertahunnya Pelanggaran Keagungan Fesyen Ternak Keagungan Fesyen	Jumlah Kasus Pelanggaran Keagungan Fesyen yang (Berang. Hewan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.27.04.206.0011 - Pembinaan Pengawasan Keagungan Fesyen pada Unit Usaha					0,00		7.500.000,00		7.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	KAB SUKSES	
Tertahunnya pembinaan pengawasan keagungan fesyen pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dinasui terdapat persyaratan keagungan fesyen (Unit)	-	-	-	0,00	0	7.500.000,00	0	7.500.000,00	0	8.500.000,00	0	9.000.000,00	0	9.000.000,00		
1.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENCANA PESTASAMA					60.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Tertahunnya dan Tertanggungjawab Rencana Pajak Hewan Mercha Strategis	Persentase Wawasan yang Terdapat dari Rencana Pajak Hewan Mercha Strategis (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	100.000.000,00	100	120.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	2.263.273.000,00 00 - Dana Perikanan dan Perikanan	
1.27.05.201 - Pengendalian dan Pengawasaan Rencana Pajak Hewan Mercha Strategis					60.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Menyediakan/Pengendalian dan Pengawasaan Rencana Pajak Hewan Mercha Strategis	Jumlah kegiatan Pengawasaan Rencana Hewan Mercha Perikanan dan Keagungan Fesyen (Rencana)	-	-	-	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PADU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029					
			TARGET	TUNJUK	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET				PADU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah unit usaha Unit Rumah Sakti Hewan, Klinik Hewan, Ambulans, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Pokjasman Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedis veteriner, atau Pusat Hewan yang Dilawat (Laport)	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	Jumlah unit usaha Rumah Paliang Hewan yang Dilawat (Laport)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12192310-001	Penyediaan Perawatan dan Usaha Produk Berhambur Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakti Hewan/Pusat Hewan, Rumah Paliang Hewan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG
	Jumlah Perawatan dan Perawatan dan Usaha Produk Berhambur Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakti Hewan/Pusat Hewan, Rumah Paliang Hewan (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
12192310-002	Pengadaan Perawatan dan Usaha Produk Berhambur Ternak dan Pakan				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00			KAB. SUMEDANG
	Jumlah unit Usaha Produk Berhambur Ternak dan Pakan yang Dilawat (Laport)	-	-	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0		
12192310-003	Pengadaan Perawatan dan Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00			KAB. SUMEDANG
	Jumlah unit Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Dilawat (Laport)	-	-	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0		
12192310-004	Pengadaan Perawatan dan Usaha Rumah Paliang Hewan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. SUMEDANG
	Jumlah unit Usaha Rumah Paliang Hewan yang Dilawat (Laport)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
12192310-005	Pengadaan Perawatan dan Usaha Rumah Sakti Hewan, Klinik Hewan, Ambulans, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Pokjasman Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedis veteriner, atau Pusat Hewan				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00			KAB. SUMEDANG

INDIKATOR PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2015		2016		2017		2018		2019		2020				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	
Terselesaikannya pelaksanaan uji coba Rumah Sakti Hewan (Kuda Hewan, Anjing Hewan, Pabrik Deter Hewan, Mandi/Pukisan Hewan, Tempat Pelemparan Farmasetik hewan, atau Paka Hewan)	Jumlah uji coba Uji Rumah Sakti Hewan, Kuda Hewan, Anjing Hewan, Pabrik Deter Hewan, Mandi/Pukisan Hewan, Tempat Pelemparan Farmasetik hewan, atau Paka Hewan yang dilaksanakan (Laporan)	-	-	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00				
1.27.36.2.01 - Uji Coba Program (Dasi, Renda, Sabun) di Kabupaten Ombia Hewan					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00				
Meningkatnya Rakekonomian Ternak (Udang Pengasap (Dasi, Renda, Sabun) dan Ombia Hewan yang Dihasilkan)	Jumlah Uji Coba Program (Dasi Hewan yang Memenuhi Kriteria Laporan)	-	-	-	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
	Jumlah Uji Coba Program (Dasi Hewan yang Tidak Laporan)	-	-	-		1		1		1		1					
1.27.36.2.01.001 - Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perawatan (Udang Pengasap) Ombia Hewan					0,00		0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00		KAB. SUMEDANG		
Terselesaikannya Pemenuhan Kebutuhan Perawatan (Udang Pengasap) Ombia Hewan	Jumlah Uji Coba Program (Dasi Hewan yang Memenuhi Kriteria Laporan)	-	-	-	0,00	1	0.000.000,00	1	0.000.000,00	1	0.000.000,00	1	0.000.000,00				
1.27.36.2.01.002 - Pemenuhan Pemenuhan (Udang Pengasap) Ombia Hewan					0,00		0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00		KAB. SUMEDANG		
Terselesaikannya Pelaksanaan Uji Coba Program (Udang Pengasap) Ombia Hewan	Jumlah Uji Coba Program (Dasi Hewan yang Tidak Laporan)	-	-	-	0,00	1	0.000.000,00	1	0.000.000,00	1	0.000.000,00	1	0.000.000,00				

**Tabel 4.3.**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas**  
**dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>3.25.3.27.0.00.02.0000 - Dinas Perikanan dan Peternakan</b>				
1.	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.25.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Usaha yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kolektivitas Nelayan Kecil 3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
3.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
4.	3.25.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Penerapan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil	
5.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Populasi Ternak	3.27.02.2.01 - Peningkatan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0001 - Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Kondisi, Tabung dan Spesifikasi Lokasi 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
6.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
7.	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terkendalinya Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 3.27.04.2.01.0006 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
8.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya dan Terangulangnya Bencana Penyakit Hewan Menular Strategis	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 3.27.05.2.01.0004 - Penanggulangan Bencana Non Alam yang Berifat Zoonosis	

### **4.3. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat Perangkat Daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa Program dan Kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025–2029, IKU yang digunakan adalah :

- A. Peningkatan Produksi Perikanan.
- B. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan.
- C. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS).
- D. Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah.

Pemilihan indikator ini dilakukan karena peningkatan produksi perikanan, peningkatan produksi komoditas peternakan, persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS) dan nilai zona integritas Perangkat Daerah merupakan ukuran yang paling relevan dan komprehensif dalam menilai capaian Kinerja utama yang terkait dengan urusan kelautan dan perikanan dan sebagian urusan pertanian (peternakan), serta dalam menilai kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah.

Melalui penetapan indikator utama tersebut, Dinas Perikanan dan Peternakan berkomitmen untuk menempatkan capaian kinerja IKU tersebut sebagai fokus utama dan dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani (pelaku usaha perikanan dan peternakan).

Target peningkatan produksi perikanan, peningkatan produksi komoditas peternakan, dan nilai Zona Integritas Perangkat Daerah telah ditetapkan secara bertahap mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dan terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk target persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS) ditetapkan tetap setiap tahun yaitu 100 persen, yang berarti pengendalian wabah dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian, pencapaian indikator ini menjadi ukuran nyata keberhasilan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menjawab isu strategis utama, yaitu peningkatan produktivitas perikanan dan

peternakan untuk peningkatan Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun**  
**2025 – 2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(07)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.25.3.27.0.00.02.0000- Dinas Perikanan dan Peternakan									
2.	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	11,84	12,17	12,42	12,67	12,92	13,17	13,42	
3.	Peningkatan Produksi Perikanan	%	3,30	3,58	4,10	4,62	5,14	5,66	6,18	
4.	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Diperoleh dari Surveillance Penyakit dari 5 PHMS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	79,33	84,00	88,00	92,00	94,00	96,00	98,00	

#### 4.4. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kontribusi Perangkat Daerah terhadap pencapaian indikator Kinerja Daerah yang bersifat lintas sektor dan dikendalikan oleh perangkat pengampu Program tertentu. IKK umumnya ditetapkan untuk Perangkat Daerah yang memiliki mandat khusus dalam mendukung target prioritas pembangunan Daerah yang bersifat strategis dan terintegrasi.

Dalam konteks Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan dan pembagian kewenangan antar Perangkat Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan ditetapkan sebagai pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- A. Produksi Perikanan Tangkap.
- B. Produksi Perikanan Budidaya.
- C. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan.
- D. Persentase wilayah yang terkontrol dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveillance penyakit dari 5 PHMS).

IKK produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya masing-masing merupakan indikator Kinerja Program pengelolaan perikanan tangkap dan Program pengelolaan perikanan budidaya dengan satuan ton. Sedangkan IKK peningkatan produksi komoditas peternakan



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

#### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan perlu dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan daerah tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Tahun 2025 – 2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
2. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan dan Peternakan setiap tahunnya dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

3. Guna kelancaran pelaksanaan Program, Kegiatan, sub Kegiatan, indikator Kinerja dan target Kinerja yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan ini, maka diharapkan Aparatur Sipil Negara Dinas Perikanan dan Peternakan dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai komitmen untuk keberhasilan pencapaian target serta menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama lima tahun ke depan. Dinas Perikanan dan Peternakan dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 mendukung misi keempat, yaitu “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan tujuan “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Teknologi”.

## **5.2. Pengendalian dan Evaluasi**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **5.3. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan substansi Rencana Strategis, dapat disimpulkan bahwa dokumen ini menjadi pedoman kebijakan dan operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Dinas Perikanan dan Peternakan selama periode 2025-2029. Keberhasilan implementasi Rencana Strategis sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pijakan kerja yang kokoh dan adaptif, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola Dinas Perikanan dan Peternakan yang responsif, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian Visi **“Sumedang Simpati Semakin Maju menuju Indonesia Emas 2045”**.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.  
NIP. 197701042006041002